



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN

LAPORAN INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN TAHUN 2025



Kedeputan Bidang Pengendalian Penduduk
Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

LAPORAN INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

Pengarah:

Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd.

Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos.

Penanggung Jawab:

Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto

Ketua Pelaksana:

I Made Yudhistira Dwipayama, S.Psi., M.Psi

Tim Penyusun:

Anggrayny Putry Mirza, S.Si

Dr. Dian Kristiani Irawaty, S.IP, MAPS

Resti Sri Elwani, S.Pi., M.Si

Wismoyo Nugraha Putra, S.K.M, M.Kes

Liana Indraini, S.K.M

Iffan Rizki Utama, A.Md., Ak.

Mochamad Ricky Fajar Dharmawan, S.I.P

Deniza Lustyana Kusumah, S.Si

Agung Prasetyo, S.I.P

Pembimbing Teknis Pengolahan dan Analisis Data:

Ir. Zainul Hidayat, M.Si

Desain:

Anggrayny Putry Mirza, S.Si

Goldito Aufa Mulia, A.Md. MRA

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

Jl. Permata No.1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650.

Telp: 021-8009029 ext 711

Kunjungi Kami di :



@ditpenduk_kemendukbangga



@ditpenduk_kemendukbangga



@ditpenduk_kemendukbangga



@ditpenduk_kemendukbangga



ditpenduk711@gmail.com



<https://bit.ly/pesat-kemendukbangga>



https://linktr.ee/Layanan_DitpendukBKKBN

SAMBUTAN

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala BKKBN

Isu kependudukan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Tantangan kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini masih sangat kompleks. Penduduk bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan, seperti pengendalian kelahiran, bonus demografi, ketahanan keluarga, dan kualitas sumber daya manusia, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pembangunan berkelanjutan. Diperlukan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan untuk bisa bersama-sama menghadapi hambatan dan tantangan Pembangunan Kependudukan mendatang. Laporan indeks ini hadir untuk mengukur sejauh mana kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tersebut.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendukbangga/BKKBN, Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan memiliki peran penting di bawah koordinasi Kedeputusan Bidang Pengendalian Penduduk. Direktorat ini bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta melakukan pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi dalam bidang pengelolaan kerja sama pendidikan kependudukan. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan Kependudukan dan Pengendalian Penduduk.” Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK), yang menjadi salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami, peduli, dan terlibat dalam berbagai isu kependudukan di Indonesia.

Laporan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) diharapkan menjadi sarana refleksi dan evaluasi untuk memperkuat kinerja Kemendukbangga/BKKBN. Secara khusus, laporan ini dapat dimanfaatkan oleh unit-unit kerja di Kedeputan Bidang Pengendalian Penduduk serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan. Selain itu, laporan IKIK juga diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Tentunya, agar hasil pengukuran ini memberikan dampak nyata, diperlukan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor sehingga laporan ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar menjadi dasar bagi kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Dedikasi, kerja keras, dan kolaborasi yang telah diberikan menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk membangun bangsa yang lebih peduli dan responsif terhadap tantangan kependudukan.

Harapan saya, Laporan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Semoga laporan ini menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, November 2025

**Menetri Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/ Kepala BKKBN,**



Dr. Winaji, S.Ag., M.Pd.

PENGANTAR

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur, Laporan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025 akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai alat penting untuk melihat sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap berbagai dinamika kependudukan di Indonesia, mulai dari pertumbuhan penduduk, bonus demografi, urbanisasi, hingga penuaan penduduk. IKIK tidak hanya menyajikan data dan angka, tetapi juga analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepedulian masyarakat. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah, kalangan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan serta program yang lebih tepat sasaran.

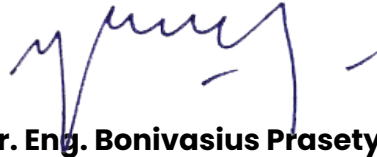
Hasil Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 2025 menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan tingkat kepedulian antarwilayah dan kelompok sosial yang perlu menjadi perhatian bersama. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi kependudukan, penguatan strategi komunikasi yang lebih efektif, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong terwujudnya penduduk yang berkualitas dan keluarga yang tangguh.



Sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi upaya pembangunan kependudukan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jakarta, November 2025

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,



Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto

DAFTAR SIMBOL

$\sqrt[3]{}$ atau $\wedge(1/3)$	: Akar pangkat 3
$\sqrt[4]{}$ atau $\wedge(1/4)$	: Akar pangkat 4
$\geq$	: Lebih besar dari sama dengan
$\leq$	: Kurang dari sama dengan
$<$	: Kurang dari
$>$	: Lebih dari
IF()	: Fungsi logika Excel jika-maka
ABS()	: Fungsi nilai mutlak pada Excel



DAFTAR SINGKATAN

Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CPR	: <i>Contraceptive Prevalence Rate</i>
DBPK	: Desain Besar Pembangunan Kependudukan
ICPD	: <i>International Conference on Population and Development</i>
IKIK	: Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan
IPBK	: Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kemendukbangga	: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
KIE	: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
MDG's	: <i>Millennium Development Goals</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PESAT	: Pusat Edukasi Isu Kependudukan Bagi Masyarakat
PK	: Pendataan Keluarga
Renstra	: Rencana Strategis
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SKAP	: Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
UKP	: Usia Kawin Pertama
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
WUS	: Wanita Usia Subur



DAFTAR ISTILAH

Aborsi	:	Penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.
Absolut	:	Nilai mutlak tanpa tanda positif/negatif.
Afektif	:	Berkaitan dengan perasaan, sikap, atau emosi seseorang.
Akses Sanitasi	:	Akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.
Bagian Integral	:	Unsur penting yang menyatu dan tidak terpisahkan dari suatu sistem atau kebijakan.
Demografi	:	Ilmu yang mempelajari jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk serta perubahan yang terjadi di dalamnya, seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (perpindahan penduduk).
Digitalisasi	:	Proses mengubah sistem manual menjadi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan seluruh operasional, mulai dari pengumpulan data, pemrosesan, analisis, hingga penyebaran informasi statistik.
Dimensi	:	Aspek atau sisi dari suatu hal yang menjadi bagian dalam analisis.
Dinamika	:	Perubahan perkembangan yang terjadi terus-menerus dalam suatu sistem, situasi, atau kelompok.
Disparitas	:	Perbedaan atau kesenjangan antara dua hal.
Dispensasi	:	Kelonggaran atau izin khusus dari aturan yang berlaku.



Distorsi	:	Ketidaktepatan nilai akibat faktor yang memengaruhi hasil dari kondisi sebenarnya.
Efektivitas	:	Tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Fertilitas	:	Tingkat kelahiran dalam suatu populasi, biasanya diukur dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan usia subur.
Globalisasi	:	Keterhubungan antarnegara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi tanpa dibatasi waktu, wilayah, maupun budaya.
Holistik	:	Cara pandang yang melihat suatu hal secara menyeluruh sebagai satu kesatuan.
Indeks	:	Daftar atau ukuran dari kumpulan data yang membantu mempermudah penelusuran dan perbandingan informasi.
Industrialisasi	:	Proses perubahan struktur ekonomi dan sosial dari pertanian tradisional menuju kegiatan industri berbasis teknologi dan produksi.
Inklusif	:	Sikap atau tindakan yang mengikutsertakan semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang.
Integrasi Sosial	:	Proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat agar hidup harmonis dan saling bekerja sama.
Intensitas	:	Seberapa sering suatu kegiatan atau fenomena terjadi.
Intervensi	:	Campur tangan atau tindakan untuk mengubah suatu keadaan.
Kampanye Publik	:	Kegiatan terencana untuk memengaruhi masyarakat agar mendukung suatu tujuan sosial.
Komposit	:	Gabungan beberapa indikator jadi satu ukuran.
Konseling	:	Bimbingan atau bantuan untuk membantu seseorang memecahkan masalah pribadi atau sosial.
Kuartil	:	Metode yang membagi data menjadi empat kelompok untuk melihat sebaran nilai rendah, sedang, dan tinggi.



<i>Long Form SP</i>	:	Rangkaian pelaksanaan sensus penduduk 2020 dimana pendataannya dilakukan secara sample pada tahun 2022. Data yang dikumpulkan terkait dengan parameter demografi (fertilitas, mortalitas, dan mobilitas) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan RPJMN bidang kependudukan.
Migrasi	:	Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah administrasi seperti provinsi atau kabupaten/kota.
Mitigasi	:	Upaya mengurangi dampak dari suatu risiko atau bencana.
Mobilitas	:	Pergerakan individu maupun kelompok dalam dimensi ruang dan waktu.
Moderat	:	Sikap tengah atau tidak ekstrem, baik dalam pandangan maupun tindakan.
Morbiditas	:	Angka kejadian penyakit dalam suatu kelompok penduduk.
Mortalitas	:	Angka atau tingkat kematian dalam suatu wilayah akibat hilangnya semua tanda kehidupan setelah kelahiran hidup secara permanen.
Multiplikatif	:	Menggunakan perkalian antar variabel.
Non-migran	:	Orang yang tidak berpindah tempat tinggal.
<i>Outlier</i>	:	Titik data yang berada jauh berbeda dari sebagian besar data lain dalam satu kumpulan data, baik jauh lebih tinggi maupun jauh lebih rendah.
<i>Pentahelix</i>	:	Model kolaborasi antara lima pihak: pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Per kapita	:	Nilai rata-rata yang dimiliki per orang.
Pertumbuhan Neoklasik	:	Teori ekonomi yang menjelaskan pertumbuhan dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan teknologi.
Politisasi	:	Proses menjadikan suatu isu atau hal sebagai bagian dari kepentingan atau perdebatan politik.



Preferensi	:	Pilihan atau kesukaan seseorang terhadap sesuatu.
Proporsi	:	Perbandingan bagian terhadap keseluruhan.
<i>Proxy</i>	:	Indikator pengganti untuk mewakili variabel yang sulit diukur secara langsung.
Rata-Rata Aritmetik	:	Nilai tengah yang diperoleh dari penjumlahan semua data dibagi jumlah data.
Rata-Rata Geometrik	:	Nilai tengah yang diperoleh dari akar hasil kali semua data, digunakan untuk data berbentuk rasio atau pertumbuhan.
<i>Replacement Level</i>	:	Jumlah rata-rata anak yang diperlukan agar populasi tetap stabil (biasanya sekitar 2,1 anak per wanita).
Revolusi Industri	:	Perubahan besar dalam sistem produksi, ekonomi, dan sosial dari tenaga manusia atau hewan menjadi mesin akibat kemajuan teknologi.
<i>Role Model</i>	:	Teladan atau panutan yang menjadi contoh bagi orang lain.
<i>Scatter plot</i>	:	Grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik.
Sinyal Stagnasi	:	Tanda-tanda bahwa pertumbuhan atau perkembangan berhenti atau melambat.
Stagnasi	:	Keadaan berhenti atau tidak mengalami perkembangan.
Standardisasi	:	Proses menyesuaikan nilai agar berada pada skala yang sama sehingga sebanding.
Strategi Afirmatif	:	Langkah atau kebijakan khusus untuk membantu kelompok yang kurang beruntung agar punya kesempatan yang sama.
Transmigrasi	:	Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
<i>Unmet Need</i>	:	Kebutuhan Pasangan usia subur (PUS) yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegahnya.
Urbanisasi	:	Proses peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, baik karena perpindahan dari desa ke kota maupun karena pertumbuhan kota itu sendiri.

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025

Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran, pemahaman, dan perilaku yang peduli terhadap berbagai persoalan kependudukan yang terus berkembang. Isu-isu tersebut mencakup pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mobilitas penduduk, hingga pelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap kependudukan mencerminkan bentuk tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menghadapi dinamika kependudukan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Bentuk kepedulian ini dapat terlihat melalui pengetahuan, sikap, serta tindakan nyata yang mendukung kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dapat melihat sejauh mana masyarakat dan para pemangku kepentingan memahami serta berpartisipasi aktif dalam mengelola berbagai isu kependudukan secara berkelanjutan. Melalui pengukuran IKIK, tingkat kepedulian masyarakat di berbagai wilayah dapat diketahui, termasuk perbedaan yang muncul antar daerah. Informasi ini penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, IKIK menjadi alat untuk mendorong terwujudnya penduduk Indonesia yang berkualitas, seimbang, dan berdaya saing, menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Hasil penghitungan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) tahun 2025 menunjukkan nilai nasional sebesar 54,5, yang termasuk dalam kategori sedang ($49 \leq \text{IKIK} < 58$). Nilai tersebut merupakan hasil gabungan dari empat dimensi utama, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan lingkungan.



Berdasarkan hasil analisis, dimensi kualitas penduduk tercatat sebagai aspek yang paling kuat, mencerminkan semakin baiknya perhatian masyarakat terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia. Sebaliknya, dimensi mobilitas penduduk menjadi aspek yang paling lemah, menandakan perlunya peningkatan kepedulian terhadap isu migrasi, urbanisasi, dan penyebaran penduduk yang berpengaruh pada pemerataan pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian IKIK nasional tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan sudah mendekati target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang pengendalian penduduk. Namun, masih dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman masyarakat serta mengurangi kesenjangan tingkat kepedulian antarwilayah agar pembangunan kependudukan dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan.

Tingkat Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) antarprovinsi masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Nilainya bervariasi dari 16,7 di Papua Pegunungan hingga 68,4 di Kepulauan Riau. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi yang lebih adaptif dan sesuai konteks lokal, terutama di wilayah dengan capaian rendah seperti kawasan timur Indonesia. Upaya ini penting agar kesadaran dan kepedulian terhadap isu kependudukan dapat tersebar lebih merata di seluruh daerah.

Untuk meningkatkan kepedulian tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat. Pertama, penguatan literasi kependudukan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal agar masyarakat memahami isu-isu kependudukan sejak dini. Kedua, pemanfaatan media dan teknologi informasi perlu dioptimalkan sebagai sarana penyebaran pesan dan kampanye kependudukan yang menarik dan mudah dipahami. Ketiga, isu kependudukan harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah agar menjadi bagian dari kebijakan dan program pemerintah setempat. Keempat, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat untuk memastikan sinergi dalam pengendalian penduduk dan pembangunan manusia.



Salah satu rekomendasi utama untuk memperluas kepedulian terhadap isu kependudukan adalah dengan memperkuat pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, perlu dikembangkan Pusat Edukasi Isu Kependudukan bagi Masyarakat (PESAT) sebagai wadah pembelajaran partisipatif dan advokasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, edukasi kependudukan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

Agar upaya tersebut berjalan efektif, program SSK dan PESAT perlu disinergikan dengan kurikulum pendidikan serta kegiatan berbasis komunitas. Dengan demikian, pesan-pesan kependudukan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai kelompok usia akan menjadi kunci dalam membangun budaya sadar kependudukan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemerataan kepedulian terhadap isu kependudukan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup pendidikan, media, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan komunitas lokal, diharapkan kesenjangan tingkat kepedulian antarwilayah dapat diperkecil, sehingga pembangunan kependudukan yang seimbang dan inklusif dapat terwujud. Akhirnya, hasil penghitungan IKIK diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program pembangunan berwawasan kependudukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, IKIK dapat berperan sebagai alat ukur sekaligus panduan dalam mewujudkan penduduk Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berperan aktif dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.



DAFTAR ISI

• Kata Sambutan	ii
• Kata Pengantar	iv
• Daftar Simbol	vi
• Daftar Singkatan	vii
• Daftar Istilah	viii
• <i>Executive Summary</i>	xii
• Daftar Isi	xv
• Daftar Gambar	xvii
• Daftar Tabel	xix

01 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	3
1.3 Sasaran	4
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Sistematika Penulisan	5

02 TINJAUAN TEORI

2.1 Perkembangan Teori Kependudukan	6
2.2 Isu-Isu Kependudukan	9
2.3 Kebijakan Kependudukan	11
2.4 Pembentukan Variabel Indeks Kepedulian	14
2.5 Kerangka Pikir	16

03 METODE INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN

3.1 Sumber Data	18
3.2 Definisi Operasional Indikator	18
3.3 Metode Perhitungan IKIK	20
3.4 Klasifikasi Nilai IKIK	30



04 INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN INDONESIA/ NASIONAL

4.1 Hasil Capaian IKIK Nasional	33
4.2 Hasil Dimensi IKIK Nasional	34
4.3 Sinergitas IKIK dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	53
4.4 Sinergitas IKIK dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	56

05 INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Hasil Capaian IKIK di Tingkat Provinsi	60
5.2 Hasil Capaian IKIK di Tingkat Kabupaten/Kota	77
5.3 Profil Hasil Capaian IKIK Berdasarkan Wilayah	83

06 PENUTUP

6.1 Kesimpulan	121
6.2 Saran	122

• Daftar Pustaka	127
------------------------	-----

• Lampiran	
------------	--



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1971 – 2025	2
Gambar 2.1	Pembentukan Dimensi dan Variabel IKIK	15
Gambar 2.2	Kerangka Pikir Pembentukan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan	17
Gambar 4.1	Perkembangan Capaian IKIK Tahun 2019 – 2025	33
Gambar 4.2	Perbandingan Nilai Komposit Empat Dimensi IKIK	34
Gambar 4.3	Grafik <i>Scatter Plot</i> IPBK 24 by IKIK 24	55
Gambar 4.4	Grafik <i>Scatter Plot</i> IPM 24 by IKIK 25	58
Gambar 5.1	Distribusi Capaian IKIK Tahun 2025	60
Gambar 5.2	Perbandingan Capaian IKIK Nasional Tahun 2024 dan 2025	61
Gambar 5.3	Peringkat Capaian IKIK di Tingkat Provinsi Tahun 2025	64
Gambar 5.4	Peringkat Capaian Dimensi Kuantitas Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025	66
Gambar 5.5	Peringkat Capaian Dimensi Kualitas Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025	70
Gambar 5.6	Peringkat Capaian Dimensi Mobilitas Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025	73
Gambar 5.7	Peringkat Capaian Dimensi Lingkungan Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025	75
Gambar 5.8	Kesenjangan Capaian IKIK Kabupaten/kota menurut Provinsi, 2025	81
Gambar 5.9	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Aceh	83
Gambar 5.10	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Bali	84
Gambar 5.11	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Banten	85
Gambar 5.12	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Bengkulu	86
Gambar 5.13	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi D. I. Yogyakarta	87
Gambar 5.14	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi DKI Jakarta	88
Gambar 5.15	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Gorontalo	89
Gambar 5.16	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jambi	90
Gambar 5.17	Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jawa Barat	91



Gambar 5.18 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jawa Tengah	92
Gambar 5.19 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jawa Timur	93
Gambar 5.20 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Barat	94
Gambar 5.21 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Selatan	95
Gambar 5.22 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Tengah	96
Gambar 5.23 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Timur	97
Gambar 5.24 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Utara	98
Gambar 5.25 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	99
Gambar 5.26 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kepulauan Riau	100
Gambar 5.27 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Lampung	101
Gambar 5.28 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Maluku	102
Gambar 5.29 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Maluku Utara	103
Gambar 5.30 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Nusa Tenggara Barat	104
Gambar 5.31 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Nusa Tenggara Timur	105
Gambar 5.32 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua	106
Gambar 5.33 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Barat	107
Gambar 5.34 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Barat Daya	108
Gambar 5.35 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Pegunungan	109
Gambar 5.36 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Selatan	110
Gambar 5.37 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Tengah	111
Gambar 5.38 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Riau	112
Gambar 5.39 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Barat	113
Gambar 5.40 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Selatan	114
Gambar 5.41 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Tengah	115
Gambar 5.42 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Tenggara	116
Gambar 5.43 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Utara	117
Gambar 5.44 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sumatera Barat	118
Gambar 5.45 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sumatera Selatan	119
Gambar 5.46 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sumatera Utara	120



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nilai Maksimum dan Minimum setiap Indikator	20
Tabel 4.1	Nilai Indikator Dimensi Kuantitas Tahun 2024 & 2025	35
Tabel 4.2	Nilai Indikator Dimensi Kualitas Tahun 2024 & 2025	39
Tabel 4.3	Nilai Indikator Dimensi Mobilitas Tahun 2024 & 2025	46
Tabel 4.4	Nilai Indikator Dimensi Lingkungan Tahun 2024 & 2025	50
Tabel 5.1	Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Kuantitas	68
Tabel 5.2	Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Kualitas	71
Tabel 5.3	Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Mobilitas	74
Tabel 5.4	Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Lingkungan	76
Tabel 5.5	Nilai IKIK Kabupaten/kota Paling Rendah dan Paling Tinggi menurut Provinsi Tahun 2025	78



1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Isu kependudukan telah menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan global sejak pertengahan abad ke-20. Jumlah penduduk dunia mengalami pertumbuhan yang pesat dari sekitar 2,5 miliar jiwa pada tahun 1950 menjadi 8,2 miliar pada 2024 (United Nations, 2024). Hal ini tentu menimbulkan tantangan multidimensi, mulai dari ketahanan pangan, kualitas hidup, hingga keberlanjutan lingkungan. Fenomena ini memengaruhi semua negara, baik maju maupun berkembang, namun dampaknya sangat signifikan bagi negara-negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan.

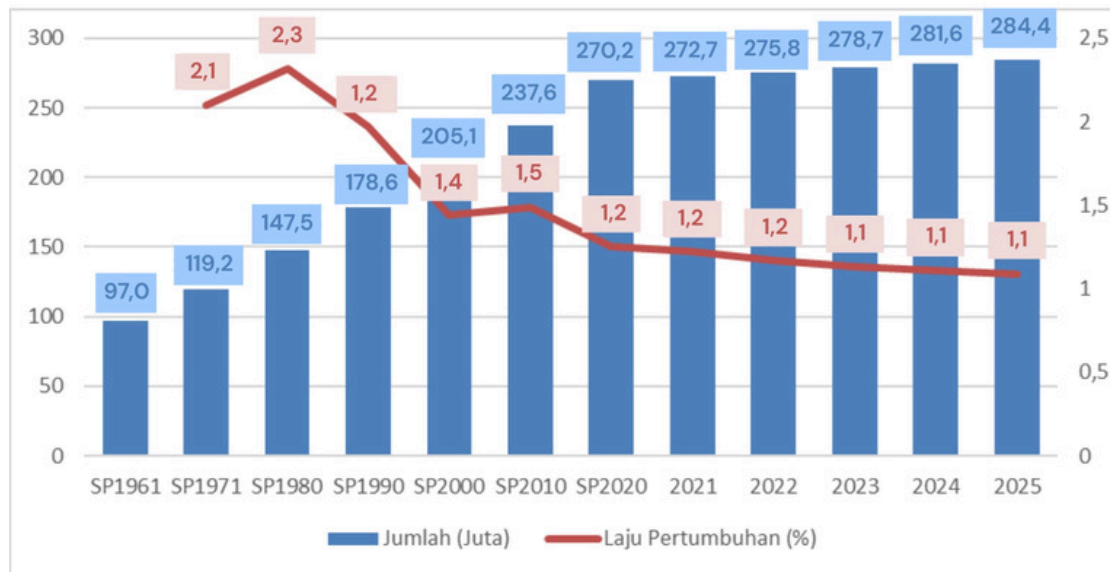
Sejak Konferensi Kependudukan Dunia 1954 hingga *International Conference on Population and Development* (ICPD) 1994 di Kairo, komunitas internasional telah menegaskan keterkaitan erat antara dinamika kependudukan, pembangunan sosial-ekonomi, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan (UNFPA, 2014). Program Aksi ICPD menekankan pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjadi rujukan utama kebijakan kependudukan di banyak negara.

Di era *Sustainable Development Goals* (SDG's) 2015–2030, isu kependudukan semakin kompleks dan menuntut perhatian yang lebih serius. Ketimpangan persebaran penduduk, peningkatan urbanisasi, bonus demografi, serta tekanan terhadap lingkungan dan layanan dasar menjadi isu-isu krusial yang perlu disikapi dengan kebijakan berbasis data dan pemahaman masyarakat yang memadai. Sayangnya, kepedulian terhadap isu-isu kependudukan masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat maupun pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat ukur yang mampu menggambarkan sejauh mana masyarakat memahami, menyikapi, dan bertindak terhadap permasalahan kependudukan melalui penghitungan indeks kepedulian terhadap isu kependudukan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, Indonesia juga mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Indonesia saat ini menempati peringkat keempat negara berpenduduk terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 286,7 juta jiwa pada semester I 2025 menurut laporan Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedikit lebih tinggi dari proyeksi BPS sebesar 284,43 juta jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 2,1 persen pada 1961–1971 menjadi 1,25 persen pada 2010–2020, hingga 1,09 persen periode tahun 2024–2025. Salah satu penyebab utama penurunan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah keberhasilan program Keluarga Berencana.

Melalui penggunaan kontrasepsi, Indonesia berhasil menurunkan angka rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi (TFR) dari 5,6 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,2 anak per wanita usia subur berdasarkan Long Form SP 2020 (BPS, 2025), mendekati angka *replacement level* sebesar 2,1 anak per wanita usia subur. Sementara berdasarkan Data PK 2024 TFR telah mencapai 2,1 anak per wanita usia subur.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1971 – 2025



Sumber: www.BPS.go.id

Di samping laju pertumbuhan penduduk yang mengalami penurunan, secara absolut jumlah penduduk tetap mengalami penambahan setiap tahunnya. Secara struktur penduduk, Indonesia sedang berada pada periode bonus demografi, dengan proporsi usia produktif (15–64 tahun) mencapai 76,7 persen pada 2025. Namun, bonus demografi ini hanya akan berdampak positif jika disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini justru dapat menimbulkan pengangguran, konflik sosial, dan tekanan terhadap sumber daya.

Sayangnya, isu kependudukan saat ini cenderung tidak menjadi prioritas di sebagian besar daerah. Banyak pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan kesesuaian antara jumlah dan kualitas penduduk dengan potensi dan kapasitas wilayah. Akibatnya, terjadi ketimpangan kesejahteraan dan mobilitas penduduk menuju wilayah-wilayah perkotaan yang padat. Pemahaman masyarakat terhadap isu kependudukan pun masih minim. Padahal, pengetahuan menjadi dasar terbentuknya sikap dan perilaku, dan ketiganya sangat berpengaruh dalam menyukseskan kebijakan pengendalian penduduk.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 2013 telah mengembangkan Indeks Pengetahuan terhadap Isu Kependudukan. Pengukuran dilakukan melalui Survei RPJMN dengan kerja sama antara BKKBN dan BPS. Pada Tahun 2018, Survei RPJMN berubah menjadi Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) dan pada tahun 2020 tidak dilanjutkan lagi, sehingga indikator pengetahuan terhadap isu kependudukan diarahkan menjadi Indikator Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dengan pendekatan yang lebih holistik dan memanfaatkan sumber data dari berbagai sumber yang tersedia di BPS setiap tahun.

Perubahan pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan alat ukur yang lebih representatif, relevan, dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebijakan, serta menjadi dasar bagi perumusan strategi pengendalian penduduk yang lebih efektif dan inklusif.

1.2 Tujuan dan Manfaat

IKIK merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki kepedulian terhadap isu-isu kependudukan. Indeks ini mencakup berbagai dimensi kependudukan yang tidak hanya terbatas pada jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas, persebaran, mobilitas, serta dampaknya terhadap pembangunan.

IKIK menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan yang berwawasan kependudukan karena mampu menggambarkan tingkat kepedulian masyarakat secara wilayah-spesifik, sehingga kebijakan dapat disusun lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Tujuan dari penyusunan IKIK adalah sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan melalui dimensi kuantitas, kualitas, mobilitas, dan lingkungan.
2. Menyediakan data dan informasi berbasis wilayah terkait kepedulian terhadap kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.
3. Menyajikan hasil penghitungan dan analisis capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis disparitas antar daerah (provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia.
5. Mendukung upaya perencanaan dan pengembangan program kependudukan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.

Dengan demikian, penyusunan dan penggunaan IKIK memiliki manfaat strategis sebagai berikut:

1. Sebagai alat evaluasi dan pemetaan kondisi kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan di berbagai wilayah.
2. Menjadi panduan dalam pengembangan strategi komunikasi, edukasi, dan advokasi yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat.
3. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kependudukan melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif.
4. Mendorong terciptanya kebijakan publik yang adil, merata, dan berbasis data, yang memperhatikan aspek kependudukan sebagai variabel penting dalam pembangunan.
5. Mengantisipasi dan merespons tantangan kependudukan di masa mendatang dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran dari Laporan Penghitungan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan diantaranya adalah:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud);
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- d. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- f. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
- g. Kementerian Transmigrasi;
- h. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- i. Kementerian Agama;
- j. Kementerian Kesehatan;
- k. Kementerian Sosial;
- l. Kementerian Ketenagakerjaan;
- m. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- n. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- p. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH;
- q. Kementerian Pekerjaan Umum;
- r. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- s. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- t. Kementerian Perhubungan;
- u. Kementerian Komunikasi dan Digital;
- v. Badan Pusat Statistik (BPS);
- w. Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia;

- x. Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- y. Perguruan tinggi / lembaga penelitian/ akademisi; dan
- z. Organisasi Masyarakat/ Organisasi Profesi di bidang kependudukan.

1.4 Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 2.Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- 5.Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
- 6.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 7.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
- 8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Penghitungan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025 terdiri atas Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penghitungan, Capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan Indonesia, Nasional, Kabupaten, dan Kota serta Penutup.

2

TINJAUAN TEORI



2.1 Perkembangan Teori Kependudukan

Menelusuri sejarah pertumbuhan penduduk, diperoleh bukti bahwa inovasi-inovasi baik di bidang pertanian maupun industri, mempunyai pengaruh yang sangat besar (Trewartha, 1969). Hal ini mengisyaratkan bahwa pada akhirnya kebijakan pembangunan berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Hal ini berarti bahwa penduduk berfungsi sebagai variabel dependen. Dengan demikian, ada alur yang tegas antara kondisi penduduk dan pembangunan. Kemungkinan yang lain bisa juga terjadi bahwa yang berfungsi sebagai variabel dependen adalah pembangunan. Artinya, kondisi kependudukan suatu daerah akan mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan dilakukan. Memperhatikan hal tersebut, maka sudah selayaknya apabila pemahaman terhadap teori penduduk terutama yang dikaitkan dengan pembangunan menjadi sangat penting.

Pada zaman kuno hanya terdapat satu pandangan mengenai penduduk yaitu bahwa reproduksi dipandang sebagai suatu usaha untuk mengganti penduduk yang meninggal karena tingkat kematian yang tinggi (Weeks, 2012). Pandangan tersebut mengandung variasi aplikatif yang berbeda antar tempat dan antar waktu. Sebagai contoh, pada zaman Yunani kuno kita temukan suatu pandangan yang ditulis oleh Plato bahwa stabilitas penduduk adalah penting untuk mencapai kesempurnaan manusia. Pandangan ini menarik karena tersirat di dalamnya bahwa kualitas penduduk lebih penting dibandingkan dengan kuantitas.

Perlu dipahami pula bahwa pada masa sebelumnya yaitu pada zaman Cina kuno, para filosofnya mempunyai titik perhatian yang sedikit berbeda. Mereka mempunyai pendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai output per tenaga kerja, menurunkan tingkat kehidupan masyarakat, dan menimbulkan perselisihan. Di samping itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang ideal rasio antara manusia dengan luas lahan (*man-land ratio*) juga menjadi titik perhatian mereka. Lebih jauh lagi, alternatif untuk melakukan hal tersebut adalah dengan memindahkan penduduk dari daerah berpenduduk padat (*overpopulated areas*) ke daerah berpenduduk jarang (*underpopulated areas*). Dalam kaitannya dengan mengoptimalkan rasio penduduk dan lahan, pendapat yang sama juga diutarakan oleh Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato secara tegas mengatakan bahwa suatu negara-kota (*city-state*) yang ideal harus mempunyai jumlah penduduk sebesar 5.040 jiwa.

Tokoh lainnya adalah William Godwin. Ide Godwin sangat dipengaruhi oleh tulisan Marquis de Condorcet. Dia percaya bahwa suplai makanan dapat meningkat dengan drastis melalui kemajuan teknologi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak mendorong terjadinya *overpopulation*, sebab penduduk akan membatasi kelahiran penduduk. Kemiskinan, menurut Godwin, bukan karena kelebihan populasi tetapi karena institusi sosial yang tidak merata.

Robert Malthus menjadi salah satu tokoh awal yang mengangkat isu terkait kekhawatiran terhadap ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya, terutama pangan dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population* (1798). Ia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung dalam deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan hanya dalam deret hitung (Malthus, 1798). Ketimpangan ini, menurutnya, akan menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan pada titik tertentu. Dalam konteks sejarah saat itu, di mana teknologi belum mendukung percepatan produksi pangan, ide Malthus menjadi sangat relevan. Ia menekankan pentingnya pengaturan jumlah penduduk agar tidak melampaui kemampuan alam dalam menyediakan pangan.

Malthus juga mengemukakan bahwa usaha untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, adalah apa yang disebut dengan *preventive check*. Usaha ini berkaitan dengan penundaan perkawinan. Cara yang kedua, adalah *positive check*. *Positive check* mencakup semua faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian. Sebagai contoh adalah kemiskinan, wabah penyakit, perang, kelaparan, dan lain-lainnya.

Isu keterbatasan sumber daya yang dikaitkan dengan ledakan penduduk kemudian diperkuat oleh Paul Ehrlich dalam bukunya *The Population Bomb* (1988). Ehrlich menegaskan bahwa jumlah penduduk yang terlalu besar tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mulai membebani lingkungan hidup (Ehrlich, 1988). Pada era Ehrlich, tekanan penduduk terhadap lingkungan menjadi semakin jelas, ditandai oleh pencemaran udara, kerusakan lingkungan, serta degradasi sumber daya alam akibat kebutuhan penduduk yang meningkat pesat. Pandangan ini merefleksikan pergeseran isu kependudukan dari sekadar ketahanan pangan menuju dimensi ekologis yang lebih luas.

Di sisi lain, revolusi industri membawa isu baru dalam dinamika kependudukan, yaitu ketimpangan ketenagakerjaan dan pengangguran akibat perkembangan teknologi. Karl Marx dan Friedrich Engels menyoroti bahwa pemanfaatan mesin dalam industri telah menciptakan eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak sebagai buruh murah, sementara pria

kelas pekerja kehilangan kesempatan kerja (Sherwood, 1985). Pemanfaatan mesin memang meningkatkan kesejahteraan sebagian pekerja, namun juga memperbesar ketimpangan sosial. Marx melihat bahwa peningkatan upah dapat mendorong peningkatan pernikahan dan kelahiran, serta menurunkan angka kematian anak. Sebaliknya, keluarga miskin melahirkan lebih banyak anak sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, keduanya menyimpulkan bahwa industrialisasi memicu pertumbuhan penduduk dan menciptakan isu pengangguran struktural.

Pertumbuhan penduduk juga menimbulkan tantangan sosial yang lebih kompleks, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Emile Durkheim (1960) menyoroti bahwa tingginya pertumbuhan penduduk akan menciptakan persaingan sosial yang semakin nyata. Dalam konteks masyarakat industri yang padat, penduduk dituntut untuk memiliki pendidikan dan keterampilan guna bersaing dan mempertahankan hidup. Hal ini berbeda dengan masyarakat tradisional yang tidak mengalami persaingan seketat itu. Oleh karena itu, Durkheim menekankan pentingnya pendidikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Sementara itu, John Stuart Mill memberikan perspektif yang lebih individual dan sosial ekonomi. Ia menekankan bahwa taraf hidup merupakan determinan utama fertilitas. Masyarakat dengan tingkat produktivitas dan pendapatan tinggi cenderung menginginkan keluarga kecil. Mill juga menyoroti bahwa peningkatan pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat miskin, akan mendorong kesadaran dalam merencanakan jumlah anak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan karier (Weeks, 1992). Dalam era teknologi dan globalisasi saat ini, Mill melihat bahwa perpindahan penduduk dan perdagangan antar wilayah dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan.

Lebih lanjut, Arsène Dumont melalui teorinya tentang kapilaritas sosial menunjukkan bahwa keinginan individu untuk meningkatkan status sosial-ekonomi akan mendorong kecenderungan memiliki keluarga kecil. Dalam pandangannya, ukuran keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan anak-anak mencapai posisi sosial yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Dumont meyakini bahwa semakin besar ukuran keluarga, semakin besar pula beban sosial dan ekonomi yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat menghambat mobilitas sosial. Pandangannya ini menggambarkan keterkaitan antara dinamika keluarga dan pencapaian sosial dalam masyarakat modern.

Pandangan Dumont memiliki kesamaan dengan teori Thomas Doubleday (1853) yang menyatakan bahwa daya reproduksi manusia justru meningkat saat bahan pangan langka dan menurun saat kemakmuran meningkat. Dalam masyarakat berpendapatan rendah, keluarga besar dianggap sebagai sumber daya ekonomi, sementara di kalangan sejahtera, keluarga kecil lebih umum ditemukan. Doubleday menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, dan akses terhadap sumber daya akan secara tidak langsung menekan laju pertumbuhan penduduk. Meskipun teorinya masih erat dengan isu pangan, pada dasarnya ia menyoroti pentingnya pembangunan kesejahteraan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

Secara keseluruhan, perkembangan teori-teori kependudukan menunjukkan bahwa isu yang dihadapi manusia terus berubah dan berlapis, dari masalah pangan, lingkungan, tenaga kerja, hingga kualitas hidup dan mobilitas sosial. Masing-masing teori mencerminkan tantangan yang khas sesuai dengan konteks zamannya, namun semuanya sepakat bahwa pertumbuhan penduduk tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting untuk menjadi dasar dalam menyusun kebijakan kependudukan yang adaptif dan berkelanjutan.

2.2 Isu-Isu Kependudukan

Isu-isu kependudukan di tingkat global bersifat dinamis, mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai belahan dunia. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perhatian internasional terhadap isu ini dimulai pada tahun 1954 melalui Konferensi Kependudukan Dunia (*World Population Conference*) pertama di Roma (United Nations, 2022). Dalam forum ini, para ahli mendiskusikan variabel-variabel demografi dan situasi kependudukan global khususnya di negara-negara berkembang.

Konferensi-konferensi internasional terkait kependudukan berikutnya mencerminkan perkembangan pemikiran global dalam bidang ini. Pada tahun 1965 di Beograd, fokus utama adalah analisis fertilitas sebagai bagian dari kebijakan perencanaan pembangunan, yang diselenggarakan bersamaan dengan dimulainya berbagai program kependudukan. Kemudian, pada tahun 1974 di Bucharest, dihasilkan dokumen Rencana Aksi Kependudukan Dunia (*World Population Plan of Action*), yang menegaskan keterkaitan erat antara variabel demografi dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Konferensi ini juga menekankan bahwa masalah kependudukan tidak dapat dipisahkan dari isu pembangunan, sehingga kebijakan kependudukan harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Pada tahun 1984 di Mexico City, konferensi ini meninjau dan memperluas *Plan of Action* dengan data terbaru, dengan isu-isu utama yang mencakup hak asasi manusia, kesehatan, kesejahteraan,

ketenagakerjaan, dan pendidikan. Puncak dari perkembangan ini terjadi pada tahun 1994 di Kairo melalui *International Conference on Population and Development* (ICPD), yang menjadi tonggak penting dalam pendekatan pembangunan kependudukan yang lebih komprehensif.

Hasil ICPD menghasilkan Program Aksi yang menjadi dasar berbagai kebijakan nasional dan internasional, mengedepankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan dalam proses pembangunan. Isu-isu utama dalam Program Aksi ICPD mencakup keterkaitan antara kependudukan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, hak dan peran keluarga dalam struktur sosial, struktur dan pertumbuhan penduduk, hak dan kesehatan reproduksi, kesehatan, morbiditas, dan mortalitas, distribusi penduduk, urbanisasi, dan migrasi internal, migrasi internasional, hubungan antara kependudukan dan pendidikan, teknologi dan riset, aksi nasional dan kerja sama internasional, serta keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Tindak lanjut dari ICPD adalah Deklarasi Milenium pada tahun 2000 yang kemudian melahirkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang menetapkan delapan tujuan pembangunan global dengan target tahun 2015 untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Delapan tujuan utama MDGs adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar universal;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

ICPD sebagai landasan dan peta jalan untuk mencapai MDGs, khususnya terkait isu kesehatan dan hak reproduksi, serta pemberdayaan perempuan, yang merupakan komponen kunci dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Aspek kesehatan reproduksi tercermin secara eksplisit dalam tujuan ke-5 dan ke-6, serta secara implisit melalui tujuan terkait pendidikan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Namun, kesehatan reproduksi tidak dijadikan tujuan tersendiri dalam MDGs, salah satunya karena keberatan dari pihak-pihak yang khawatir isu ini akan mengarah pada legalisasi aborsi atau pendidikan seks yang dianggap bertentangan dengan nilai keluarga (White, 2006).

Setelah MDGs berakhir pada 2015, dunia memasuki era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – SDGs) yang mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk dicapai hingga tahun 2030. SDGs mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu, serta menekankan pendekatan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia. Sebagai bagian dari tindak lanjut ICPD, pada tahun 2019 dilaksanakan ICPD25 di Nairobi, yang menghasilkan *Nairobi Statement on ICPD25 – Accelerating the Promise*. Pernyataan ini menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan Program Aksi ICPD dalam konteks pencapaian SDGs (UNFPA, 2020). Lima komitmen utama dari ICPD25 adalah:

1. Mencapai akses universal terhadap kesehatan dan hak seksual dan reproduksi sebagai bagian dari jaminan kesehatan semesta;
2. Memobilisasi pembiayaan untuk mendukung implementasi Program Aksi ICPD;
3. Memanfaatkan peluang demografis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan;
4. Menghapus kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya lainnya; dan
5. Menjamin hak atas layanan kesehatan seksual dan reproduksi dalam situasi krisis dan kemanusiaan.

Komitmen-komitmen tersebut diharapkan menjadi landasan bagi negara-negara, termasuk Indonesia dalam merancang dan menjalankan program-program kependudukan yang sejalan dengan nilai-nilai global, namun tetap relevan secara lokal.

2.3 Kebijakan Kependudukan

Kebijakan kependudukan pemerintah pusat difokuskan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, salah satunya melalui implementasi Program Keluarga Berencana (KB) pada masa Repelita, khususnya dalam era Orde Baru. Program ini dimaksudkan untuk menurunkan angka kelahiran dan memitigasi dampak negatif dari ledakan jumlah penduduk yang cepat. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menekankan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya terkendali jumlahnya, tetapi juga memiliki kualitas yang memadai untuk menghadapi tantangan pembangunan.

Pada saat yang sama, kebijakan kependudukan juga mencakup distribusi penduduk secara merata di seluruh Indonesia. Salah satu upaya utama dalam mencapai hal ini adalah program transmigrasi, yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kepadatan penduduk di Jawa dan Bali. Selain itu,

kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam struktur demografis, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi angkatan kerja yang produktif. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi dengan memastikan pembangunan yang merata dan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu.

Perhatian pemerintah untuk pembangunan kependudukan semakin ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang-Undang tersebut menyoroti aspek pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, serta pengarahan persebaran penduduk agar tercapainya sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Melalui Undang-Undang ini pula diperkenalkan konsep pembangunan keluarga sejahtera. Mengutip Pasal 3 ayat 2, pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pengembangan kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana dalam rangka membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Undang-Undang Kependudukan tersebut kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-Undang tersebut memberikan penekanan yang lebih mendetail pada upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Selain itu, Pasal 3 juga mendeskripsikan prinsip pembangunan kependudukan, yaitu:

1. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
2. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
3. Partisipasi semua pihak dan gotong royong;
4. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
5. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
6. Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
7. Keadilan dan kesetaraan gender.

Dari prinsip-prinsip tersebut, terlihat bahwa pemerintah memperluas cakupan isu pembangunan kependudukan seiring dengan perkembangan Indonesia dan dunia global. Indonesia memasuki fase transformasi baru dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang diarahkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini mencakup peningkatan kesejahteraan melalui pendapatan per kapita yang lebih tinggi, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, penguatan daya

saing sumber daya manusia (SDM), peran yang lebih besar dalam percaturan global, serta komitmen pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam kerangka tersebut, pembangunan kependudukan menjadi fondasi utama transformasi sosial, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui pendekatan kebijakan berbasis siklus hidup, meliputi kesehatan, pendidikan berkualitas, dan sistem perlindungan yang adaptif (Bappenas, 2024).

Untuk mencapai tujuan itu, pembangunan kependudukan diarahkan pada tiga fokus besar diantaranya pertumbuhan penduduk yang seimbang, penguatan keluarga berkualitas, dan penciptaan masyarakat inklusif berbasis keadilan sosial serta kesetaraan gender. Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi kunci, antara lain melalui percepatan penurunan stunting, penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemerataan pendidikan yang inklusif. Tantangan struktural seperti ketimpangan persebaran penduduk, terutama terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di luar wilayah tersebut, dan urbanisasi yang tidak terkelola, menuntut solusi terintegrasi. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan wilayah melalui peningkatan sarana, prasarana, serta konektivitas nasional diharapkan mampu memperkuat kohesi sosial-ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Sebagai instrumen implementatif, Bappenas pada tahun 2025 telah menyusun Dokumen Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk menjawab dinamika kependudukan Indonesia ke depan, dengan visi: "Penduduk Berkualitas dan Berbudaya Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini menekankan terwujudnya penduduk yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai budaya bangsa. DBPK menetapkan tiga pilar strategis, yaitu: (1) pengelolaan kuantitas penduduk, (2) peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, serta inklusi sosial, dan (3) penataan persebaran penduduk. Setiap pilar dilengkapi indikator kinerja, strategi lintas sektor, serta tahapan pembangunan berkelanjutan dari penguatan fondasi (2025–2029) hingga perwujudan Indonesia Emas (2040–2045). Dengan demikian, pembangunan kependudukan menjadi poros utama dalam memastikan transformasi sosial berjalan konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan SDM unggul sebagai motor penggerak kemajuan bangsa menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam penerjemahan RPJPN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah Indonesia menetapkan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

Visi ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan dan kualitas hidup manusia, dengan tagline "Membangun Manusia Seutuhnya: Sejahtera, Adaptif, Berakhlak Mulia, Berbudaya, Maju, Unggul, dan Berdaya Saing". Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya mengedepankan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga aspek kemanusiaan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki kualitas moral, budaya, dan daya saing yang tinggi.

Pencapaian tujuan tersebut direncanakan melalui tiga pilar utama: pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan penguatan modal sosial budaya. Pemenuhan layanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta akses terhadap infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Pembangunan modal manusia berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga individu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sementara itu, penguatan modal sosial budaya bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan norma yang mendukung kemajuan bangsa, termasuk mengutamakan keadilan sosial, keberagaman, serta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan pembangunan ini dilandasi oleh beberapa prinsip, seperti siklus hidup yang memastikan bahwa setiap tahap kehidupan, dari lahir hingga dewasa, mendapat perhatian dan layanan yang sesuai. Pengarusutamaan gender menegaskan pentingnya peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang setara, sementara inklusi sosial memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Selain itu, prinsip penduduk tumbuh seimbang juga menjadi landasan penting untuk memastikan distribusi penduduk yang merata, sehingga tidak terjadi penumpukan di daerah tertentu dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik ini, RPJMN 2025–2029 bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera secara sosial dan berdaya saing di kancah global, menuju visi Indonesia Emas 2045.

2.4 Pembentukan Variabel Indeks Kepedulian

Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dirancang untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami, menyikapi, dan peduli terhadap masalah-masalah kependudukan yang terus berkembang. Penyusunan IKIK didasarkan pada kajian teori-teori kependudukan serta mempertimbangkan perubahan zaman yang mempengaruhi dinamika sosial

dan demografi. Isu-isu utama yang relevan dalam konteks ini mencakup pertumbuhan jumlah penduduk, pengendalian jumlah penduduk, kualitas hidup, mobilitas penduduk, lingkungan, pengangguran, serta kecukupan pangan.

Dalam menentukan dimensi yang terkandung dalam IKIK, perlu dipertimbangkan peran serta tanggung jawab Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) yang terus berkembang baik di masa sekarang maupun masa depan. Oleh karena itu, IKIK terdiri dari empat dimensi utama, yaitu: Dimensi Kuantitas, Kualitas, Mobilitas, dan Lingkungan. Meskipun kecukupan pangan merupakan isu penting dalam teori-teori kependudukan, isu ini tidak dimasukkan dalam IKIK, karena peran Kemendukbangga dalam ketahanan pangan lebih terbatas dan tidak langsung.

Pemilihan indikator untuk masing-masing dimensi IKIK dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek penting: Pengetahuan (*Knowledge*), Sikap (*Attitude*), dan Perilaku (*Practice*) masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Dengan demikian, IKIK berfungsi sebagai alat ukur komprehensif yang menyatukan empat dimensi utama, yaitu Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, dan Lingkungan, yang masing-masing terdiri dari indikator-indikator yang relevan, dan bersama-sama membentuk suatu indeks komposit yang menggambarkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah kependudukan. Ilustrasi indikator yang digunakan pada masing-masing dimensi ditampilkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Pembentukan Dimensi dan Variabel IKIK



Dalam penyusunan indeks komposit dimensi, tidak terdapat ketentuan baku mengenai jumlah minimal atau maksimal indikator. Namun, dari sisi teknis dan kestabilan pengukuran, disarankan untuk menggunakan minimal dua dan maksimal delapan indikator dalam setiap dimensi. Rekomendasi minimal dua indikator dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap kemungkinan fluktuasi nilai akibat sensitivitas ekstrem dari salah satu variabel terhadap kondisi luar biasa (*shock*). Jika hanya satu indikator yang digunakan, maka perubahan ekstrem pada indikator tersebut akan sangat mempengaruhi nilai indeks komposit dimensi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kehadiran indikator tambahan penting untuk menjaga kestabilan nilai indeks komposit dimensi dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, pembatasan jumlah maksimal indikator per dimensi juga perlu dipertimbangkan. Indikator dirancang untuk mendeteksi perubahan antar waktu atau antar wilayah, serta mencerminkan keberhasilan program-program pemerintah dan pemangku kepentingan. Jika terlalu banyak indikator dimasukkan dalam satu dimensi, maka kontribusi program yang hanya menyorot sebagian indikator saja akan sulit tercermin dalam hasil akhir dimensi. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa tidak ada dampak signifikan, padahal upaya telah dilakukan. Oleh karena itu, jumlah indikator perlu dijaga agar tetap proporsional dan relevan terhadap konteks implementasi di lapangan.

Penentuan indikator yang dimasukkan dalam setiap dimensi juga memerlukan pertimbangan terkait ketersediaan data sekunder yang mencakup berbagai wilayah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemilihan 13 indikator yang terbagi dalam empat dimensi Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti SUSENAS, SAKERNAS dan Statistik Indonesia. Data yang digunakan ini sudah mencakup hingga kabupaten/kota, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kependudukan di tingkat daerah.

2.5 Kerangka Pikir

Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan dibangun berdasarkan empat dimensi utama dalam pengukuran ini. Keempat dimensi tersebut adalah Dimensi Kuantitas Penduduk, Dimensi Kualitas Penduduk, Dimensi Mobilitas Penduduk, dan Dimensi Lingkungan Penduduk. Masing-masing dimensi tersebut mencakup berbagai indikator yang relevan dengan isu kependudukan, dan dapat dianggap sebagai variabel komposit yang terdiri dari berbagai faktor lain yang mendasarinya.

Dalam menyusun variabel komposit untuk indeks ini, tidak ada ketentuan jumlah variabel yang harus dipenuhi. Namun, untuk alasan teknis, disarankan agar setiap dimensi memiliki minimal dua variabel dan maksimal delapan variabel. Mengapa demikian? Menetapkan minimal dua variabel dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi nilai indikator yang tidak terduga. Misalnya, jika satu variabel sangat peka terhadap kondisi yang tidak biasa, perubahan mendadak pada variabel tersebut bisa menyebabkan perubahan yang besar pada indikator, yang tentunya dapat mengganggu kestabilan hasil pengukuran. Oleh karena itu, adanya lebih dari satu variabel dalam setiap dimensi membantu menjaga agar nilai indikator lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak terduga.

Sementara itu, penentuan jumlah maksimal variabel yang dimasukkan dalam setiap dimensi juga membutuhkan pertimbangan teknis. Indikator yang dibuat bertujuan untuk mencerminkan perubahan dari waktu ke waktu atau antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Perubahan tersebut biasanya berhubungan langsung dengan program-program pemerintah dan pihak terkait. Jika jumlah indikator terlalu banyak, dan beberapa daerah hanya fokus pada beberapa aspek tertentu, hal ini bisa menyebabkan perubahan nilai indikator tidak terlalu terlihat, sehingga menciptakan kesan bahwa upaya yang dilakukan oleh daerah tersebut kurang berdampak. Oleh karena itu, batasan pada jumlah variabel diperlukan agar indikator tetap efektif dan mencerminkan perubahan yang signifikan yang benar-benar dipengaruhi oleh kebijakan atau program yang dilakukan. Kerangka pikir pembentukan indeks kepedulian terhadap isu kependudukan disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Pembentukan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan





3.1 Sumber Data

Sebagian besar data yang dibutuhkan dalam penghitungan IKIK bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan publikasi rutin Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Statistik Indonesia. Berdasarkan sumber data tersebut, sebanyak 11 indikator bersumber dari Susenas, 1 indikator dari Sakernas, dan 1 indikator lainnya bersumber dari Statistik Indonesia.

3.2 Definisi Operasional Indikator

Penjelasan mengenai indikator yang digunakan dalam penghitungan IKIK sebagai berikut:

1. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat atau cara kontrasepsi menunjukkan proporsi pasangan dengan istri berusia 15–49 tahun yang memakai metode kontrasepsi, baik modern maupun tradisional.

2. Usia Kawin Pertama (UKP) $\geq$ 20 tahun pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 20–29 tahun

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) berusia 20–29 tahun yang pada saat pertama kali menikah berusia $\geq$ 20 tahun merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penyusunan IKIK.

3. Wanita Usia Subur (WUS) dengan Anak $\leq$ 2

Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang berstatus kawin atau pernah kawin dengan jumlah anak dua atau kurang menunjukkan proporsi wanita usia 15–49 tahun yang telah menikah atau pernah menikah dan memiliki maksimal dua anak.

4. Rata-rata Lama sekolah

Nilai rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan suatu penduduk dan menjadi salah satu ukuran penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

5. Kepemilikan Rekening oleh Penduduk Usia $\geq$ 17 Tahun

Persentase penduduk berusia 17 tahun ke atas yang memiliki rekening tabungan di bank atau koperasi simpan pinjam menunjukkan bagian masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan keuangan formal sebagai sarana menyimpan uang. Angka ini juga memberi gambaran tentang akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

6.Tingkat Perceraian

Proporsi jumlah kasus perceraian yang terjadi dalam setahun terhadap jumlah laki-laki usia 15 tahun ke atas yang berstatus menikah dikalikan 1.000.

7.Penolong Persalinan Anak Terakhir

Persentase persalinan anak terakhir yang terjadi dalam dua tahun terakhir yang ditolong tenaga medis menunjukkan proporsi kelahiran yang mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan profesional, seperti dokter, bidan, maupun perawat.

8.Balita punya Akta

Persentase balita yang memiliki akta kelahiran menggambarkan proporsi anak usia di bawah lima tahun yang sudah tercatat secara resmi melalui dokumen akta kelahiran. Indikator ini penting karena kepemilikan akta kelahiran menjadi bukti identitas hukum pertama yang dimiliki seorang anak dan menjadi dasar untuk memperoleh berbagai layanan publik.

9.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase pengangguran terbuka pada angkatan kerja merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari penduduk usia kerja yang sudah masuk dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan dan masih berusaha mencari pekerjaan.

10. Penduduk Non-Migran Usia $\geq$ 25 Tahun

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang tempat lahirnya sama dengan tempat tinggal sekarang menggambarkan proporsi penduduk dewasa yang sejak lahir hingga saat ini tidak mengalami perpindahan tempat tinggal atau masih menetap di daerah kelahirannya.

11.Migrasi Keluar Penduduk Usia $\geq$ 25 Tahun

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggal sekarang menunjukkan proporsi penduduk dewasa yang pernah mengalami perpindahan tempat tinggal dari daerah asal kelahirannya ke daerah lain.

12.Rata-Rata Luas Lantai Per Kapita

Rata-rata luas lantai hunian per kapita dihitung dengan cara membagi total luas lantai rumah yang ditempati sebuah rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga tersebut. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kepadatan hunian sekaligus kualitas tempat tinggal yang dimiliki masyarakat. Semakin besar luas lantai per orang, semakin baik kondisi kelayakan huniannya

13. Akses Terhadap Air Bersih

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih untuk kebutuhan minum sehari-hari menggambarkan proporsi masyarakat yang dapat menggunakan sumber air layak, seperti air kemasan, air isi ulang, air ledeng, sumur bor atau pompa, serta sumur terlindung.

3.3 Metode Perhitungan IKIK

Pada sub-bab ini secara khusus membahas metode perhitungan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK), dengan fokus utama pada tahapan teknis dalam menghitung indeks komposit dari masing-masing dimensi, hingga menghasilkan nilai akhir IKIK secara keseluruhan. Proses perhitungan ini diawali dengan melakukan standardisasi terhadap 13 indikator yang telah ditentukan sebelumnya sebagai komponen utama IKIK.

Dalam penjelasan ini, diasumsikan bahwa data dari ketiga belas indikator tersebut sudah tersedia dan dapat diakses, terutama melalui sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) maupun lembaga penyedia data lainnya. Tahap Pertama yang harus dilakukan adalah menyesuaikan skala atau melakukan standardisasi pada setiap indikator agar nilainya dapat dikombinasikan secara adil dan proporsional dalam perhitungan indeks.

Standardisasi ini memerlukan penetapan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indikator sebagai batas referensi. Nilai maksimum merepresentasikan capaian tertinggi yang mungkin, sedangkan nilai minimum menunjukkan capaian terendah. Kedua nilai ini digunakan untuk mengubah data mentah menjadi skor yang terukur dalam skala yang seragam (biasanya antara 0 dan 1), sehingga indikator yang berbeda-beda bisa dibandingkan secara objektif. Informasi mengenai nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indikator disajikan secara rinci dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai Maksimum dan Minimum setiap Indikator

Dimensi	Variabel	Max	Min	Arah	Sumber Data
1. Kuantitas	a. Angka Pemakaian Kontrasepsi / <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	75	10	Positif	Susenas
	b. Usia Kawin Pertama (UKP) 20+ pada Pasangan Usia Subur (PUS) 20 – 29 th	90	50	Positif	Susenas

Dimensi	Variabel	Max	Min	Arah	Sumber Data
	c. Wanita Usia Subur (WUS) dengan Anak ≤ 2	95	50	Positif	Susenas
2. Kualitas	a. Rata-rata Lama Sekolah	18	6	Positif	Susenas
	b. Kepemilikan Rekening	80	15	Positif	Susenas
	c. Perceraian	20	0	Negatif	Statistik Indonesia
	d. Penolong Persalinan	100	60	Positif	Susenas
	e. Balita punya Akta Lahir	100	25	Positif	Susenas
	f. Pengangguran	10	0	Negatif	Sakernas
3. Mobilitas	a. Non Migran penduduk 25+ th	40	0	Positif, absolut ke 50%	Susenas
	b. <i>Out</i> Migrasi penduduk 25+ th	40	0	Negatif	Susenas
4. Lingkungan	a. Luas Lantai per kapita	50	8	Positif	Susenas
	b. Akses Air Bersih	100	25	Positif	Susenas

Nilai maksimum dan minimum yang telah ditetapkan berperan sebagai acuan untuk menilai posisi relatif capaian setiap indikator IKIK pada masing-masing wilayah di Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai ini membantu menggambarkan sejauh mana suatu daerah memiliki tingkat kepedulian terhadap isu kependudukan dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Untuk mendapatkan nilai yang dapat dibandingkan secara relatif, setiap indikator harus distandardisasi, yakni diubah ke dalam skala yang seragam. Proses standardisasi ini dilakukan dengan menggunakan rumus matematis tertentu yang mempertimbangkan nilai aktual suatu wilayah, serta nilai maksimum dan minimum indikator tersebut secara nasional. Dengan pendekatan ini, setiap skor indikator mencerminkan posisi relatif wilayah tersebut dalam konteks capaian nasional. Adapun rumus standardisasi yang digunakan dijelaskan dalam persamaan berikut:

$$X_i^{std} = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad \text{jika arahnya positif}$$

$$X_i^{std} = \frac{X_{max} - X_i}{X_{max} - X_{min}} \quad \text{jika arahnya negatif}$$

Dimana :

X_i^{std} = Nilai Indikator ke-i yang sudah distandardisasi.

X_i = Nilai Capaian Indikator ke-i secara aktual.

X_{max} = Nilai Maksimum Indikator ke-i yang tersedia di Tabel 3.1.

X_{min} = Nilai Minimum Indikator ke-i yang tersedia di Tabel 3.1.

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan secara detail rumus yang digunakan dalam menghitung standardisasi setiap indikator yang digunakan dalam penghitungan IKIK.

1. Angka Pemakaian Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate (CPR)*:

Pada konteks perhitungan ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum CPR adalah 75 persen, sedangkan nilai minimum adalah 10 persen. Dengan demikian, jika suatu wilayah memiliki capaian CPR yang melebihi angka 75 persen, maka nilai standardisasinya akan dibatasi maksimal pada angka 100 (atau 1 dalam skala 0–1). Sebaliknya, apabila CPR suatu wilayah berada di bawah 10 persen, maka nilai standardisasinya akan berada pada titik terendah, yaitu 0.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi CPR pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 75, 100, IF(X_i < 10, 0, (X_i - 10)/(75 - 10)*100))$$

2. Usia Kawin Pertama (UKP) 20 tahun ke atas pada kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) yang berusia 20–29 tahun:

Pada konteks perhitungan ini, nilai maksimum UKP ditetapkan sebesar 90 persen, sementara nilai minimumnya adalah 50 persen. Artinya, apabila suatu wilayah memiliki proporsi UKP 20+ yang melebihi angka 90 persen, maka skor standardisasinya akan dianggap sempurna, yaitu 100 (atau 1 dalam skala desimal). Sebaliknya, jika persentasenya di bawah 50 persen, maka skor standardisasinya adalah nol (0).

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi UKP 20+ pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 90, 100, IF(X_i < 50, 0, (X_i - 50)/(90 - 50)*100))$$

3. Wanita Usia Subur (WUS) punya anak ≤ 2 :

Dalam hal ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum indikator adalah 95 persen, sedangkan nilai minimum adalah 50 persen. Artinya, apabila suatu wilayah mencatatkan persentase WUS yang memiliki dua anak hidup lebih dari 95 persen, maka capaian tersebut dianggap optimal, dan nilai standardisasinya diberikan nilai penuh, yaitu 100 (atau 1 jika menggunakan skala desimal). Sebaliknya, apabila capaian indikator ini berada di bawah 50 persen, maka wilayah tersebut memperoleh nilai terendah dalam proses standardisasi, yaitu 0.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi WUS punya anak ≤ 2 pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 95, 100, IF(X_i < 50, 0, (X_i - 50)/(95 - 50)*100))$$

4. Rata-rata lama sekolah:

Dalam proses standardisasi indikator ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum yang digunakan sebagai acuan adalah 18 tahun untuk merepresentasikan masa pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, nilai minimum ditetapkan sebesar 6 tahun, yang umumnya mencerminkan penyelesaian pendidikan dasar atau sekolah dasar. Jika suatu wilayah memiliki rata-rata lama sekolah lebih dari 18 tahun, maka nilainya dianggap sudah mencapai kondisi ideal, dan skor standardisasinya akan diberikan nilai penuh, yaitu 100 (atau 1 dalam skala 0–1). Sebaliknya, bila rata-rata lama sekolah di bawah 6 tahun, maka nilai standardisasinya akan dianggap nol, menunjukkan rendahnya akses atau partisipasi pendidikan di wilayah tersebut.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi rata-rata lama sekolah pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 18, 100, IF(X_i < 6, 0, (X_i - 6)/(18 - 6)*100))$$

5. Rekening tabungan:

Dalam proses standardisasi indikator ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum adalah 80%, sedangkan nilai minimum adalah 15%. Dengan kata lain, apabila suatu wilayah memiliki persentase penduduk yang memiliki rekening tabungan melebihi 80%, maka capaian tersebut dianggap optimal dan diberi nilai standardisasi tertinggi, yaitu 100 (atau 1 dalam skala desimal). Sebaliknya, jika persentase tersebut berada di bawah 15%, maka dianggap sangat rendah dan diberi nilai standardisasi terendah, yaitu 0.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi kepemilikan rekening tabungan pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 80, 100, IF(X_i < 15, 0, (X_i - 15)/(80 - 15)*100))$$

6. Perceraian:

Berbeda dengan beberapa indikator lainnya yang bersifat positif (semakin tinggi nilainya, semakin baik), indikator ini memiliki arah negatif. Artinya, semakin tinggi angka perceraian, maka kondisi sosial yang digambarkan justru semakin memprihatinkan.

Dalam proses perhitungan ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum untuk indikator perceraian adalah 20 persen, sedangkan nilai minimumnya adalah 0%. Apabila suatu wilayah memiliki tingkat perceraian lebih dari 20 persen, maka nilai standardisasinya dianggap 0, karena menunjukkan kondisi yang paling tidak ideal. Sebaliknya, wilayah dengan tingkat perceraian mendekati 0 persen dianggap memiliki kondisi sosial yang sangat stabil dalam konteks pernikahan, dan dengan demikian memperoleh skor standardisasi tertinggi, yaitu 100 (atau 1 dalam skala desimal).

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi perceraian pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 20, 0, (20 - X_i)/(20 - 0)*100)$$

7. Penolong persalinan oleh Nakes:

Dalam proses standardisasi, ditetapkan bahwa nilai maksimum indikator ini adalah 100%, yang mencerminkan seluruh persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, atau perawat. Nilai minimum ditetapkan sebesar 60%. Artinya, jika suatu wilayah memiliki cakupan penolong persalinan oleh nakes kurang dari 60%, maka kondisi tersebut dinilai sangat tidak ideal, dan wilayah tersebut akan memperoleh nilai standardisasi terendah, yaitu 0. Sebaliknya, semakin tinggi proporsi persalinan yang ditangani oleh nakes mendekati atau mencapai 100% semakin tinggi pula skor yang diberikan dalam proses standardisasi, karena ini menunjukkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, aman, dan merata.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi penolong persalinan oleh nakes pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$= IF(X_i < 60, 0, (X_i - 60)/(100 - 60)*100)$$

8. Balita punya Akta Lahir:

Dalam proses standardisasi indikator ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum adalah 100 persen, yakni ketika seluruh balita di suatu wilayah telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, nilai minimum ditentukan sebesar 25 persen. Apabila persentase balita yang memiliki akta lahir di suatu wilayah berada di bawah angka ini, maka kondisi tersebut dinilai sangat buruk dan diberi skor standardisasi sebesar 0. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran atau akses masyarakat terhadap pencatatan sipil.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi balita punya akta lahir pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$= IF(X_i < 25, 0, (X_i - 25)/(100 - 25)*100)$$

9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT):

Indikator ini memiliki arah negatif, artinya semakin tinggi nilai TPT, justru mencerminkan situasi yang semakin tidak ideal. Tingginya tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa banyak penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan, sehingga mengindikasikan tantangan dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dalam proses standardisasi indikator ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum TPT adalah 10 persen, sedangkan nilai minimum adalah 0. Jika suatu wilayah memiliki tingkat pengangguran terbuka lebih dari 10 persen, maka kondisi tersebut dianggap sangat buruk dan diberi skor standardisasi terendah, yaitu 0. Sebaliknya, jika suatu wilayah mendekati atau mencapai tingkat pengangguran nol, maka dianggap berada dalam kondisi terbaik dan memperoleh nilai standardisasi tertinggi, yaitu 100 (atau 1 dalam skala desimal).

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi TPT pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 10, 0, (10 - X_i)/(10 - 0)*100)$$

10. Non Migran penduduk 25 tahun ke atas:

Indikator Persentase Penduduk Non Migran Usia 25 Tahun ke Atas secara umum memiliki rentang nilai antara 0 hingga 100. Namun, dalam konteks penghitungan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK), indikator ini tidak ditujukan untuk menunjukkan semakin tinggi semakin baik.

Sebaliknya, pengukuran diarahkan pada kondisi yang seimbang antara penduduk migran dan non migran, karena keseimbangan tersebut dianggap lebih ideal dalam mencerminkan dinamika kependudukan yang sehat dan adaptif.

Oleh karena itu, diperlukan proses transformasi data agar indikator ini mencerminkan nilai ideal saat distribusinya mendekati 50% (seimbang). Transformasi dilakukan dengan menggunakan rumus: $= (50 - \text{ABS}(50 - X_i))$. Rumus ini bekerja dengan menghitung jarak nilai aktual (X_i) dari angka keseimbangan 50, kemudian mengurangnya dari 50. Hasil transformasi ini akan menghasilkan nilai dalam rentang 0 hingga 50, di mana nilai 50 menunjukkan kondisi paling ideal yaitu ketika proporsi non migran sebesar 50%. Semakin jauh dari angka ini, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka nilainya dianggap kurang ideal.

Agar selaras dengan skala standardisasi IKIK lainnya, nilai maksimum setelah transformasi ditetapkan sebesar 40. Artinya, jika hasil transformasi suatu wilayah melebihi 40, maka nilai standardisasinya akan tetap dianggap maksimal, yaitu 100 (atau 1 dalam skala desimal). Sebaliknya, nilai di bawah 40 akan dinilai secara proporsional sesuai tingkat kedekatannya dengan nilai ideal tersebut.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi Non migran penduduk 25 tahun ke atas pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$= \text{IF}(X_i > 40, 100, (X_i - 0)/(40 - 0)*100)$$

11. Out migrasi penduduk 25 tahun keatas:

Dalam proses perhitungan, ditetapkan bahwa nilai maksimum untuk indikator ini adalah 40%, sedangkan nilai minimum adalah 0. Artinya, jika suatu wilayah mencatatkan angka out migrasi lebih dari 40%, maka kondisi tersebut dianggap kurang ideal, karena berpotensi menunjukkan lemahnya daya tarik wilayah tersebut dalam mempertahankan penduduk lokalnya. Dalam hal ini, skor standardisasi yang diberikan adalah 0.

Sebaliknya, semakin rendah persentase out migrasi artinya semakin banyak penduduk yang tetap tinggal di wilayah kelahirannya semakin tinggi pula nilai standardisasi yang diperoleh, karena mencerminkan stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu, indikator ini memiliki arah negatif: nilai yang tinggi justru menunjukkan kondisi yang kurang diharapkan.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi Out migran penduduk 25 tahun ke atas pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$= \text{IF}(X_i > 40, 100, (40 - X_i)/(40 - 0)*100)$$

12. Luas Lantai per kapita:

Dalam proses standardisasi indikator ini, ditetapkan bahwa nilai maksimum adalah 50 m² per orang, sedangkan nilai minimum adalah 8 m² persegi per orang. Artinya, apabila suatu wilayah memiliki capaian rata-rata luas lantai per kapita lebih dari 50, maka kondisi tersebut dianggap sangat baik dan diberikan nilai standardisasi maksimal, yaitu 100 (atau 1 dalam skala desimal). Sebaliknya, apabila rata-rata luas lantai per kapita berada di bawah 8, maka kondisi tersebut dianggap sangat tidak layak dan diberi nilai standardisasi 0.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi luas lantai per kapita pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$=IF(X_i > 50, 100, IF(X_i < 8, 0, (X_i - 8)/(50 - 8)*100))$$

13. Akses sumber air minum bersih:

Dalam proses standardisasi, ditetapkan bahwa nilai maksimum indikator ini adalah 100 persen, yang mencerminkan kondisi ideal di mana seluruh penduduk di suatu wilayah memiliki akses terhadap air minum yang bersih. Sedangkan nilai minimum ditetapkan sebesar 25 persen. Artinya jika capaian suatu wilayah dalam indikator ini berada di bawah 25 persen, maka dianggap sangat buruk dan diberikan nilai standardisasi terendah yaitu 0.

Sebaliknya, semakin tinggi persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih mendekati atau mencapai 100 persen, semakin tinggi pula nilai standardisasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki infrastruktur dasar yang baik dan perhatian yang tinggi terhadap kebutuhan pokok masyarakatnya.

Untuk mempermudah proses perhitungan, dapat menggunakan formula standardisasi Akses sumber air minum bersih pada Microsoft Excel sebagai berikut:

$$= IF(X_i < 25, 0, (X_i - 25)/(100 - 25)*100)$$

Jika tahap pertama sudah dilakukan semua dan setiap indikator yang digunakan sudah distandardisasi, maka Tahap Kedua adalah melakukan perhitungan nilai indeks komposit masing-masing dimensi. Perhitungan indeks komposit ini bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai dari beberapa indikator yang berada dalam satu kelompok dimensi, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang performa suatu wilayah dalam aspek tertentu. Setiap dimensi berfungsi sebagai representasi dari dimensi kunci dalam kepedulian terhadap isu kependudukan

Berdasarkan kerangka pikir pembentukan IKIK, terdapat empat dimensi pembentuk IKIK, yaitu:

A. Dimensi Kuantitas Penduduk

Dimensi ini merupakan komposit dari indikator yang masuk dalam pembentuk kuantitas penduduk. Untuk menghasilkan nilai komposit dari dimensi ini, digunakan metode penggabungan data yang berbeda tergantung pada tingkat administrasi wilayah. Pada level nasional dan provinsi, digunakan metode rata-rata geometrik. Metode ini dianggap lebih tepat karena dapat mengurangi pengaruh ekstrem dari satu indikator terhadap keseluruhan skor, sehingga memberikan hasil yang lebih stabil dan seimbang pada skala besar. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai cara penghitungan komposit dimensi Kuantitas Penduduk di masing-masing tingkat wilayah, rumus perhitungannya akan disajikan pada bagian berikut:

$$\text{Kuantitas Penduduk (D}_1\text{)} = \sqrt[3]{x_1^{\text{std}} * x_2^{\text{std}} * x_3^{\text{std}}}$$

Dimana:

x_1^{std} : Angka Pemakaian Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

x_2^{std} : Usia Kawin Pertama (UKP)

x_3^{std} : Wanita Usia Subur (WUS) punya anak ≤ 2 orang

B. Dimensi Kualitas Penduduk

Dimensi ini merupakan komposit dari indikator pembentuk kualitas penduduk yang terdiri dari 6 indikator. Dalam menghitung nilai komposit dari dimensi ini, digunakan pendekatan yang berbeda tergantung pada level administratifnya. Untuk tingkat nasional dan provinsi, metode yang digunakan adalah rata-rata geometrik, yaitu pendekatan matematika yang lebih cocok digunakan ketika ingin menggabungkan data yang bersifat multiplikatif dan memiliki distribusi relatif seragam. Metode ini memberikan hasil yang lebih seimbang serta mengurangi pengaruh nilai ekstrim pada satu indikator.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai cara penghitungan komposit dimensi Kualitas Penduduk di masing-masing tingkat wilayah, rumus perhitungannya akan disajikan pada bagian berikut:

$$\text{Kualitas Penduduk (D}_2\text{)} = \sqrt[6]{x_4^{\text{std}} * x_5^{\text{std}} * x_6^{\text{std}} * x_7^{\text{std}} * x_8^{\text{std}} * x_9^{\text{std}}}$$

Dimana:

x_4^{std} : Rata-rata Lama Sekolah

x_5^{std} : Rekening Tabungan

x_6^{std} : Perceraian

x_7^{std} : Penolong Persalinan Nakes

x_8^{std} : Balita Punya akta lahir

x_9^{std} : Tingkat pengangguran Terbuka

C. Dimensi Mobilitas Penduduk

Dimensi ini merupakan komposit dari indikator mobilitas yang terdiri dari non migran dan out migrasi. Untuk menghasilkan nilai komposit dari dimensi ini, digunakan metode penggabungan data yang berbeda tergantung pada tingkat administrasi wilayah. Pada level nasional dan provinsi, digunakan metode rata-rata geometrik. Metode ini dianggap lebih tepat karena dapat mengurangi pengaruh ekstrem dari satu indikator terhadap keseluruhan skor, sehingga memberikan hasil yang lebih stabil dan seimbang pada skala besar. Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai cara penghitungan komposit dimensi Mobilitas Penduduk di masing-masing tingkat wilayah, rumus perhitungannya akan disajikan pada bagian berikut:

$$\text{Mobilitas Penduduk } (D_3) = \sqrt[2]{x_{10}^{\text{std}} * x_{11}^{\text{std}}}$$

Dimana:

x_{10}^{std} : Non Migran

x_{11}^{std} : Out Migrasi

D. Dimensi Lingkungan

Untuk menghitung nilai komposit dari dimensi lingkungan ini, pendekatan yang digunakan berbeda tergantung pada tingkat wilayah administratif. Di tingkat nasional dan provinsi, digunakan metode rata-rata geometrik, yang dianggap lebih sesuai untuk menggabungkan indikator yang memiliki distribusi relatif seragam dan bersifat saling melengkapi. Rata-rata geometrik juga lebih tahan terhadap pengaruh nilai ekstrem dan memberikan hasil yang lebih proporsional ketika indikator memiliki skala yang berbeda.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai cara penghitungan komposit dimensi Lingkungan di masing-masing tingkat wilayah, rumus perhitungannya akan disajikan pada bagian berikut:

$$\text{Lingkungan Penduduk } (D_4) = \sqrt[2]{x_{12}^{\text{std}} * x_{13}^{\text{std}}}$$

Dimana:

x_{12}^{std} : Luas Lantai per kapita

x_{13}^{std} : Akses Sumber air minum

Tahap ketiga adalah menghitung Indeks komposit IKIK secara keseluruhan. Indeks IKIK ini merupakan indeks komposit dari empat dimensi yang telah dihitung pada tahap kedua. Indeks ini diperoleh dengan menggabungkan nilai dari keempat dimensi utama yang telah dihitung pada tahap sebelumnya, yakni dimensi yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam isu kependudukan seperti kuantitas, kualitas, lingkungan, dan mobilitas penduduk.

Untuk menghitung indeks komposit IKIK, digunakan metode rata-rata geometrik. Pemilihan metode ini bukan tanpa alasan. Rata-rata geometrik memiliki sifat khusus, yaitu lebih sensitif terhadap nilai rendah (ekstrem bawah) dan lebih tahan terhadap nilai tinggi (ekstrem atas). Artinya, apabila salah satu dimensi memiliki nilai yang sangat rendah, maka hal itu akan secara signifikan menurunkan hasil akhir indeks IKIK. Sebaliknya, nilai yang sangat tinggi pada satu dimensi tidak akan terlalu mendongkrak skor keseluruhan.

Konsekuensi dari sifat tersebut adalah bahwa semua dimensi wajib tumbuh dan diperhatikan secara seimbang. Tidak boleh ada satu dimensi pun yang diabaikan, karena jika ada satu dimensi yang tertinggal misalnya pendidikan, kesehatan, atau akses lingkungan, maka keseluruhan indeks akan terdampak secara negatif. Hal ini mendorong pendekatan pembangunan yang holistik dan menyeluruh dalam meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap isu kependudukan.

Untuk menjelaskan secara teknis bagaimana perhitungan indeks IKIK dilakukan, berikut ini formula matematis yang digunakan:

$$IKIK = \sqrt[4]{D_1 * D_2 * D_3 * D_4}$$

Atau rumus menggunakan Excel

$$IKIK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4)^{(1/4)}$$

Dimana:

D_1 : Indeks Komposit Dimensi Kuantitas Penduduk

D_2 : Indeks Komposit Dimensi Kualitas Penduduk

D_3 : Indeks Komposit Dimensi Mobilitas

D_4 : Indeks Komposit Dimensi Lingkungan

3.4 Klasifikasi Nilai IKIK

Klasifikasi nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) sangat penting sebagai dasar dalam menilai sejauh mana kepedulian masyarakat maupun pemangku kebijakan terhadap isu kependudukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pemangku kepentingan dapat lebih mudah melakukan evaluasi serta merumuskan strategi peningkatan capaian IKIK di masa mendatang. Melalui klasifikasi capaian yang berbasis pendekatan kuartil pada setiap dimensi, analisis dapat disajikan secara lebih objektif dan terukur. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi wilayah atau aspek yang masih memerlukan perhatian khusus, sehingga intervensi kebijakan

dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya memberikan gambaran kondisi terkini, tetapi juga menjadi dasar perumusan langkah strategis untuk memperkuat capaian IKIK di periode selanjutnya.

Untuk menganalisis sebaran nilai IKIK pada masing-masing dimensi, digunakan pendekatan kuartil sebagai landasan pengklasifikasian. Dengan menggunakan pendekatan kuartil tersebut, maka dapat dihitung kuartil bawah (Q1) dan Kuartil atas (Q3) IKIK. Klasifikasi nilai IKIK dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. $IKIK < 49$ = Rendah
- b. $49 \leq IKIK < 58$ = Sedang
- c. $58 \leq IKIK < 75$ = Tinggi
- d. $IKIK \geq 75$ = Sangat Tinggi

Klasifikasi Indeks Kepedulian Isu Kependudukan (IKIK) memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan di wilayahnya, yang mencakup empat pilar utama yaitu kuantitas, kualitas, mobilitas, dan lingkungan.

Nilai IKIK di bawah 49 dikategorikan Rendah, yang menunjukkan masih minimnya pemahaman dan keterlibatan terhadap isu kependudukan. Nilai IKIK rendah menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kepedulian terhadap permasalahan kependudukan di sekitarnya; isu-isu terkait pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, dinamika mobilitas, serta dampak lingkungan belum menjadi perhatian utama.

Sementara itu, rentang 49 hingga kurang dari 58 dikategorikan Sedang, mencerminkan adanya kesadaran dasar namun belum diikuti dengan partisipasi aktif atau kebijakan yang konsisten. IKIK sedang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kependudukan, meskipun perhatian tersebut belum merata pada seluruh pilar dan masih terdapat aspek-aspek yang kurang diperhatikan.

Selanjutnya, nilai 58 hingga kurang dari 75 diklasifikasikan sebagai Tinggi, menandakan bahwa kepedulian terhadap isu kependudukan sudah cukup kuat dan mulai terintegrasi dalam tindakan nyata. Pada kategori IKIK tinggi, sebagian besar masyarakat telah menunjukkan kepedulian yang nyata terhadap isu kependudukan dan mulai berperan aktif dalam upaya penyelesaiannya, meskipun masih ada beberapa pilar yang belum sepenuhnya optimal.

Adapun nilai 75 ke atas termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, menunjukkan tingkat kesadaran, komitmen, dan respons yang optimal baik pada tataran individu, komunitas, maupun kelembagaan dalam mendukung agenda pembangunan kependudukan secara berkelanjutan. Adapun IKIK sangat tinggi menggambarkan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian komprehensif terhadap seluruh dimensi kependudukan baik dari sisi kuantitas, kualitas, mobilitas, maupun lingkungan sehingga menunjukkan kesiapan dan komitmen yang kuat dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

4

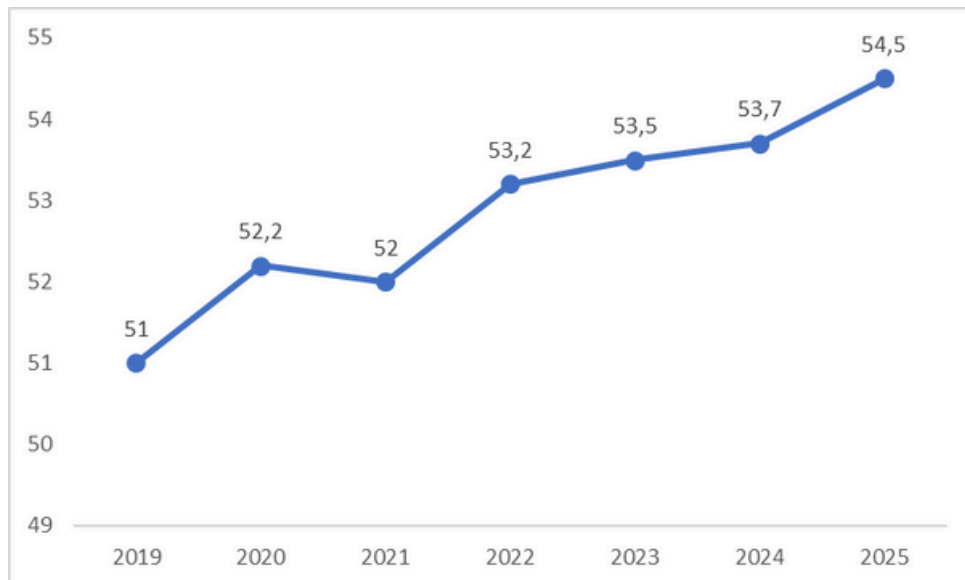
INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN INDONESIA/ NASIONAL



4.1 Hasil Capaian IKIK Nasional

Pada tahun 2025, nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) adalah 54,5 dengan klasifikasi status sedang. Capaian IKIK tahun 2025 ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 53,7 dengan klasifikasi status sedang, dan tahun 2023 sebesar 53,5 dengan klasifikasi status sedang. Gambar 4.1 memperlihatkan tren peningkatan IKIK yang konsisten sejak tahun 2021 hingga 2025. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penanganan kepedulian terhadap isu-isu kependudukan, yang turut dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 serta dinamika demografis akibat pemekaran wilayah, terutama di Papua. Peningkatan IKIK juga mencerminkan bahwa pembangunan lintas sektor yang terus digalakkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas kependudukan di Indonesia.

Gambar 4.1 Perkembangan Capaian IKIK Tahun 2019 - 2025



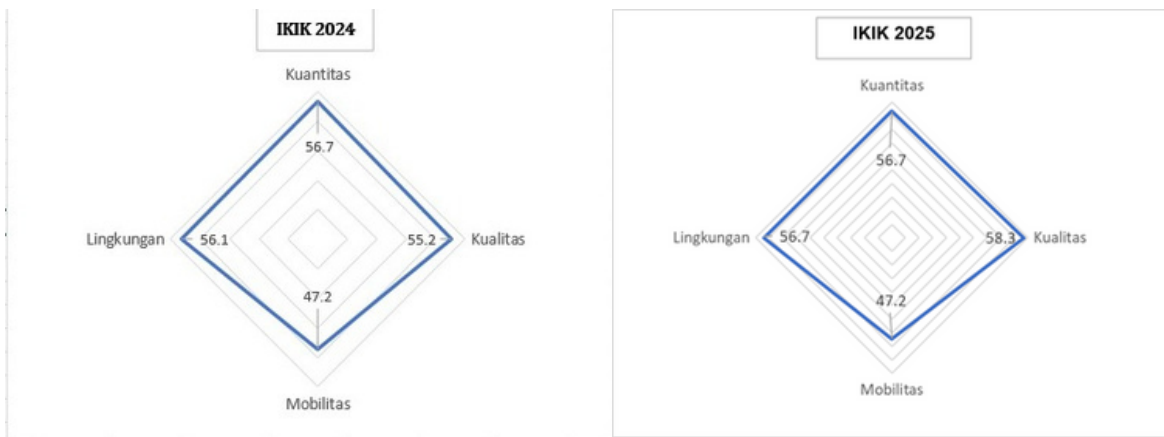
Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2019 - 2025

Menganalisis capaian IKIK antar tahun merupakan hal yang penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana perkembangan kepedulian terhadap isu-isu kependudukan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, serta bagaimana hal tersebut dapat menjadi dasar dalam memahami tantangan dan peluang pembangunan ke depan.

4.2 Hasil Dimensi IKIK Nasional

Seiring dengan peningkatan capaian IKIK pada tahun 2025, perkembangan pada masing-masing dimensinya menunjukkan dinamika yang beragam. Gambar 4.2 memperlihatkan bagaimana perkembangan dan perbandingan nilai antar dimensi pada tahun 2024 dan 2025.

Gambar 4.2 Perbandingan Nilai Komposit Empat Dimensi IKIK



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2019 – 2025

Penjelasan mengenai bagaimana dinamika di setiap dimensi akan dijelaskan pada subbab berikut ini.

A. Dimensi Kuantitas

Dimensi kuantitas mencerminkan tingkat kesadaran dan kendali yang dimiliki oleh keluarga dalam merencanakan jumlah anak serta menentukan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Dimensi ini diukur melalui tiga variabel utama, yaitu *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), Usia Kawin Pertama (UKP), dan proporsi Wanita Usia Subur (WUS) yang memiliki anak ≤ 2 . Ketiga indikator tersebut berperan sebagai tolok ukur penting dalam upaya mewujudkan perencanaan keluarga yang berkualitas dan saling melengkapi dalam membentuk fondasi keluarga yang tangguh dan produktif. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) mencerminkan tingkat akses dan pemanfaatan layanan Keluarga Berencana (KB), sementara Usia Kawin Pertama (UKP) merepresentasikan upaya pencegahan perkawinan usia anak serta kesiapan individu dalam membina rumah tangga. Di sisi lain, indikator proporsi Wanita Usia Subur (WUS) yang memiliki anak kurang dari 2 anak atau sebanyak 2 anak menggambarkan preferensi terhadap ukuran keluarga kecil.

Nilai dimensi Kuantitas pada tahun 2025 tercatat tetap di angka 56,7, sama seperti tahun sebelumnya. Meski secara keseluruhan nilai dimensi ini tidak berubah, terdapat pergerakan yang signifikan di tingkat indikator yang dapat diamati pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Nilai Indikator Dimensi Kuantitas Tahun 2024 & 2025

Tahun	CPR	UKP	WUS	Dimensi Kuantitas
2024	55,5	68,2	75,8	56,7
2025	56,3	68,7	74,7	56,7

Berdasarkan Tabel 4.1 terdapat dua indikator yang mengalami peningkatan, yaitu CPR yang naik dari 55,5 menjadi 56,3, serta UKP yang meningkat dari 68,2 menjadi 68,7. Peningkatan ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keluarga dan kecenderungan menunda usia pernikahan. Namun demikian, nilai dimensi kuantitas tidak mengalami kenaikan karena capaian pada indikator WUS dengan dua anak atau kurang dari 2 anak justru menurun dari 75,8 menjadi 74,7. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain preferensi keluarga, pengaruh sosial budaya, ataupun karena masih adanya keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di sejumlah wilayah.

Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai masing-masing indikator yang mempengaruhi tingkat capaian pada Dimensi Kuantitas. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap dinamika perubahan nilai dimensi tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran.

a) Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan pada indikator *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), yaitu dari 55,5 pada tahun 2024 menjadi 56,3 pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan alat kontrasepsi. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, terutama dalam memperluas akses terhadap layanan dan alat kontrasepsi. Selain itu, tren positif ini juga menunjukkan efektivitas penyebaran pesan “Berencana Itu Keren” yang mulai diterima sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Peningkatan CPR secara nasional tersebut menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan layanan Keluarga Berencana (KB), baik metode modern maupun tradisional, masih terjaga dengan baik. Namun demikian, laju peningkatan tersebut tergolong relatif lambat dan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dikarenakan masih adanya disparitas dalam capaian indikator CPR ini.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kemendukbangga/BKKBN Tahun 2024, terdapat hal-hal yang menjadi penyebab belum tercapainya target CPR antara lain: (1) belum optimalnya pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pemerintah dalam pelayanan KB (Puskesmas dalam pelayanan KB, termasuk sebagai pembina FKTP di wilayah kerjanya); (2) belum optimalnya keterlibatan RS dalam pelaksanaan pelayanan KB, termasuk dukungan pembiayaan JKN untuk pelayanan KB; (3) belum semua tenaga kesehatan (dokter dan bidan) mendapatkan pelatihan CTU IUD/Implant dan memiliki sertifikat kompetensi karena terbatasnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan tersebut; dan (4) pembiayaan KB pascapersalinan di rumah sakit yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan persalinan di rumah sakit (baik normal maupun dengan tindakan seperti operasi sesar) dibayar menggunakan sistem paket (INA-CBGs). Artinya, semua komponen biaya yang berkaitan dengan proses persalinan termasuk tindakan medis, obat, tenaga kesehatan, dan rawat inap sudah digabung menjadi satu tarif paket. Sehingga, pelayanan KB pascapersalinan, seperti pemasangan alat kontrasepsi (IUD, implan, suntik, atau pil pasca melahirkan), tidak memiliki alokasi biaya tersendiri di luar paket tersebut. Akibatnya, banyak rumah sakit tidak memberikan prioritas atau menunda pelayanan KB pascapersalinan, karena tidak ada biaya pengganti tambahan dari BPJS. Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan CPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menysasar pasangan usia muda/pasangan milenial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana yang dikemas secara digital dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini.

b) Usia Kawin Pertama (UKP)

Usia Kawin Pertama (UKP) pada tahun 2025 meningkat dari 68,2 menjadi 68,7. Peningkatan 0,5 poin ini menunjukkan tren penundaan usia kawin pertama yang sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak serta promosi usia ideal menikah (21 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki) sebagaimana dianjurkan oleh BKKBN. Pendewasaan usia kawin berdampak positif pada kesehatan reproduksi, kesiapan psikososial, serta pengendalian kelahiran secara lebih terencana. Namun, pergeseran perilaku ini masih sangat lambat. Data terbaru menunjukkan sekitar 31,3 persen pasangan usia subur (PUS) usia 20–29 tahun pernah menikah di bawah usia 20 tahun, mencerminkan masih tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia (BPS, 2025).

Perkawinan anak merupakan isu kompleks yang dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, ketidaksetaraan gender, norma budaya, hingga minimnya akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi (UNICEF, 2024). Studi menemukan remaja sering kali tidak memahami risiko hubungan seksual maupun fungsi kontrasepsi, yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan dan mendorong perkawinan usia dini. Bahkan, adanya dispensasi kawin dari pengadilan semakin memperkuat keberlanjutan praktik tersebut (INFID, 2024). Temuan penelitian Chae & Ngo (2017) juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi dan konseling mampu meningkatkan pengetahuan seksual, penggunaan kontrasepsi, serta menurunkan angka kehamilan remaja (UNICEF, 2024).

Upaya pencegahan perkawinan anak menuntut intervensi komprehensif dan berbasis komunitas. Pemerintah daerah, seperti Indramayu, telah melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja sebagai strategi konkret (INFID, 2024). Program nasional juga terus digalakkan melalui Sekolah Siaga Kependudukan, PIK-Remaja, hingga pelatihan bagi calon pengantin. Strategi penguatan anak perempuan melalui informasi, peningkatan kapasitas, dan dukungan sosial terbukti efektif mencegah perkawinan anak hingga 57 persen (Chae & Ngo, 2017). Oleh karena itu, meskipun peningkatan UKP menunjukkan arah positif, edukasi kesiapan menikah dan perencanaan keluarga perlu diperkuat sejak dini dengan pendekatan adaptif, lintas sektor, serta kontekstual terhadap nilai sosial budaya masyarakat.

c) Wanita Usia Subur (WUS) dengan anak ≤ 2

Indikator proporsi Wanita Usia Subur (WUS) dengan anak ≤ 2 orang mengalami penurunan dari 75,8 pada tahun 2024 menjadi 74,7 pada tahun 2025, atau turun sebesar 1,1 poin dalam satu tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan yang memiliki lebih dari dua anak. Kondisi ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam mengarahkan rata-rata jumlah anak per keluarga menuju tingkat ideal pengganti generasi (*replacement level*) sebesar 2,1, yang menjadi salah satu prasyarat tercapainya struktur penduduk seimbang dan pembangunan keluarga berkualitas (LKIP Kemendukbangga, 2024).

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren ini antara lain kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) yang masih relatif tinggi, terutama pada WUS yang ingin menghentikan kelahiran. Penyebabnya meliputi masih kuatnya mitos dan kekhawatiran terkait efek samping kontrasepsi, keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil, serta komunikasi antarpribadi dari petugas lapangan yang belum optimal. Di sisi lain, capaian MCPR (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*) memang meningkat menjadi 61,7 persen, tetapi masih di bawah target 63,4 persen. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa banyak pasangan berhenti menggunakan KB setelah

memiliki dua anak, sehingga mendorong kenaikan proporsi WUS dengan anak lebih dari dua (LKIP Kemendukbangga, 2024).

Kemendukbangga/BKKBN menyoroti pentingnya penguatan layanan KB pascapersalinan dikarenakan periode pascapersalinan merupakan momentum strategis untuk mencegah kehamilan terlalu cepat maupun yang tidak diinginkan. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator ini ialah dengan peningkatan konseling KB pascapersalinan, perluasan layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), integrasi distribusi alat kontrasepsi melalui aplikasi SIRIKA-SIGA, serta penguatan peran bidan dan tenaga lini lapangan dalam KIE berbasis komunitas (LKIP, Kemendukbangga, 2024). Selain itu, narasi “Berencana Itu Keren” dapat dimanfaatkan sebagai strategi komunikasi utama untuk menanamkan kembali nilai-nilai keluarga berkualitas, khususnya melalui media komunitas dan berbagai program seperti PESAT, Mitra Kerja Peduli Kependudukan, serta inisiatif lintas sektor lainnya.

Dengan demikian, meskipun penurunan proporsi WUS dengan anak ≤ 2 orang tampak kecil, indikator ini menjadi sinyal penting perlunya intervensi sistematis, adaptif, dan lintas sektor untuk menekan *unmet need*, menjaga kesinambungan penggunaan KB, dan mendukung penurunan TFR secara konsisten (LKIP Kemendukbangga, 2024).

B. Dimensi Kualitas

Dimensi kualitas mencerminkan tingkat kesejahteraan, kemandirian, dan ketangguhan keluarga dalam membangun kehidupan yang layak, sehat, dan produktif. Dimensi ini menekankan pada peningkatan kapasitas manusia serta akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi yang menunjang kualitas hidup keluarga.

Dimensi kualitas diukur melalui enam variabel utama yang saling berkaitan. Pertama, rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan anggota keluarga sebagai fondasi untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan peluang ekonomi. Kedua, kepemilikan rekening bank menunjukkan tingkat inklusi keuangan keluarga dalam sistem ekonomi formal, yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan dan akses terhadap layanan keuangan modern.

Ketiga, tingkat perceraian menjadi indikator stabilitas dan ketahanan keluarga; semakin rendah angka perceraian, semakin kuat fondasi sosial dan emosional dalam keluarga. Keempat, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan mencerminkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan sistem kesehatan ibu dan anak.

Kelima, proporsi balita yang memiliki akta lahir menandakan pengakuan hukum terhadap identitas anak dan jaminan hak-hak sipilnya, yang menjadi dasar penting bagi pembangunan manusia. Keenam, tingkat pengangguran menggambarkan kemampuan keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Keenam variabel tersebut membentuk satu kesatuan yang merefleksikan kualitas hidup keluarga Indonesia secara menyeluruh. Semakin tinggi capaian dalam variabel-variabel tersebut, semakin kuat pula pondasi keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan, ketangguhan, dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pada Dimensi Kualitas, terjadi peningkatan yang konsisten pada seluruh indikator penyusunnya, sehingga nilai dimensi ini meningkat dari 55,2 menjadi 58,3 pada tahun 2025.

Tabel 4.2 Nilai Indikator Dimensi Kualitas Tahun 2024 & 2025

Tahun	Lama Sekolah	Rekening Tabungan	Perceraian	Penolong Persalinan	Akta Lahir	TPT	Dimensi Kualitas
2024	9,1	47,8	6,8	95,8	83,4	5,3	55,2
2025	9,2	50,5	5,8	96,9	85,1	4,9	58,3

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa peningkatan terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah, kepemilikan rekening tabungan, penurunan angka perceraian, meningkatnya proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran balita, serta membaiknya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan konsisten, sejalan dengan program-program peningkatan sumber daya manusia yang dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya, akan diuraikan secara spesifik perkembangan indikator-indikator yang membentuk Dimensi Kualitas.

a) Rata Rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan dari 9,1 pada tahun 2024 menjadi sebesar 9,2 pada tahun 2025. Meskipun mengalami kenaikan, tren ini masih belum menunjukkan kemajuan yang cukup progresif, serta mencerminkan kondisi akses pendidikan yang relatif stabil. Data tahun 2025 juga menunjukkan adanya kesenjangan capaian antar daerah yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kualitas dan integrasi muatan kependudukan dalam sistem pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan akses pendidikan perlu disertai dengan strategi penguatan konten yang relevan dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan pondasi penting dalam penguatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) bertujuan untuk menguji apakah model pertumbuhan neoklasik (Solow) mampu menjelaskan variasi pendapatan per kapita antarnegara apabila diperluas dengan memasukkan unsur modal manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika modal manusia dimasukkan ke dalam model, hasil empiris—meliputi koefisien dan kemampuan menjelaskan variasi pendapatan—menjadi lebih konsisten dengan teori serta data lintas negara. Dalam penelitian tersebut, mereka menggunakan proxy berupa tingkat partisipasi pendidikan (seperti angka partisipasi sekolah menengah) sebagai ukuran atau stok modal manusia, dan menemukan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita (Mifrahi & Rahmat, 2022). Hasil studi yang telah dilakukan oleh Haryati, H. U. (2023) dan Balaj, M., et al. (2024) menunjukkan bahwa seiring peningkatan pendidikan dapat meningkatkan kesehatan & harapan hidup dan persepsi yang lebih baik tentang lingkungan, kesempatan, sumber daya, dan lingkungan fisik serta sosial.

Namun demikian, permasalahan putus sekolah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya. Data menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk keluar dari sekolah lebih awal dibandingkan anak dari keluarga mampu. Selain itu, nilai-nilai budaya dan norma sosial di beberapa komunitas juga mempengaruhi persepsi terhadap pentingnya pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga memperkuat motivasi belajar dan dukungan dari lingkungan sosial sekitar.

Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan tema perencanaan keluarga yang baik dalam modul Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan PESAT, khususnya terkait kesiapan menjalankan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Selain itu, kampanye visual edukatif melalui platform SSK, Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka-PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN-PK), dan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan. Upaya ini juga dapat diperkuat melalui penyebaran cerita-cerita inspiratif dari alumni PIK-R, Duta Genre, SSK, maupun Pramuka-PK, sebagai bentuk pendekatan afektif untuk meningkatkan aspirasi dan motivasi remaja dalam melanjutkan pendidikan.

b) Kepemilikan Rekening

Jumlah kepemilikan rekening per populasi adalah salah satu indikator inklusi keuangan. Inklusi keuangan sendiri adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menjadi katalisator 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indikator kepemilikan rekening menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam dua tahun terakhir. Capaian meningkat dari 47,8 pada tahun 2024 menjadi 50,5 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses serta literasi keuangan masyarakat, terutama di kalangan perempuan.

Peningkatan kepemilikan rekening memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian individu maupun keluarga. Akses terhadap layanan keuangan tidak hanya memperkuat kontrol atas pengambilan keputusan rumah tangga, tetapi juga mendukung perencanaan keuangan keluarga secara lebih efektif. Hal ini berdampak langsung pada aspek pengasuhan anak, pengelolaan kebutuhan dasar, serta pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Lebih lanjut, peningkatan indikator ini juga merefleksikan keberhasilan program inklusi keuangan dan sinergi lintas sektor yang semakin luas, seperti kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan mikro. Namun demikian, capaian ini masih menyisakan kesenjangan, terutama pada wilayah khusus dan kelompok tertentu yang belum memiliki akses penuh terhadap infrastruktur dan layanan keuangan formal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat lintas sektor dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan materi literasi keuangan ke dalam perpanjangan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

khususnya pada segmen sasaran perempuan dan pasangan muda. Selain itu, produksi konten edukatif digital seperti infografik, video pendek atau podcast tentang manfaat rekening dalam perencanaan keluarga dan pemberdayaan perempuan perlu diperkuat sebagai strategi komunikasi publik. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi kunci, terutama dalam memperluas akses layanan keuangan di wilayah-wilayah khusus melalui pendekatan jemput bola. Kampanye publik melalui media sosial dan komunitas lokal mengenai pentingnya fungsi ekonomi dalam keluarga juga dapat meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

c) Perceraian

Capaian indikator perceraian menunjukkan tren penurunan secara nasional dalam periode 2024 hingga 2025. Pada tahun 2024, indikator perceraian sebesar 6,8 dan menurun sebesar 1 poin menjadi 5,8 pada tahun 2025. Penurunan angka perceraian ini merupakan sinyal positif yang mencerminkan semakin membaiknya kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam membina kehidupan berkeluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak pasangan yang mampu mempertahankan rumah tangga, baik karena kesiapan mental, kondisi ekonomi yang lebih stabil, maupun komunikasi yang lebih sehat.

Selain itu, tren penurunan ini juga memperlihatkan keberhasilan upaya pembangunan keluarga. Namun demikian, capaian positif ini belum merata di seluruh wilayah. Di beberapa daerah, terutama yang masih menghadapi tantangan tingginya angka pernikahan usia dini, perceraian dini tetap menjadi isu yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang terintegrasi dan kontekstual. Dalam Laporan Kinerja Kemendukbangga Tahun 2024, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan peran keluarga dalam menyukseskan bonus demografi dan *care economy* dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya implementasi pembangunan keluarga.

d) Penolong Persalinan

Indikator penolong persalinan menunjukkan tren peningkatan capaian yang positif, dari 95,8 pada tahun 2024 menjadi 96,9 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan sistem pelayanan kesehatan dalam memperluas jangkauan layanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Capaian ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya ibu hamil dan keluarganya, terhadap pentingnya proses persalinan yang aman, higienis, dan sesuai standar medis.

Meskipun indikator penolong persalinan menunjukkan angka yang tinggi secara nasional, capaian ini masih menyisakan tantangan, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan. Di wilayah-wilayah khusus, hambatan akses geografis sering kali diperparah oleh masih kuatnya praktik-praktik budaya persalinan non medis yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian secara kuantitatif belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas layanan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah konkret dan kolaboratif lintas sektor yang dapat dilakukan. Merujuk pada Laporan Kinerja Kemendukbangwa Tahun 2024, dalam mengurai permasalahan ini dapat dilakukan dengan peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), kemudian peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi.

e) Balita mempunyai Akta kelahiran

Selama tiga tahun terakhir, indikator kepemilikan akta kelahiran pada balita mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, tercatat sebesar 83,4, dan terus meningkat menjadi 85,1 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan, khususnya akta kelahiran, semakin membaik. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil, baik melalui dinas terkait maupun integrasi layanan di tingkat desa/kelurahan.

Akta kelahiran merupakan dokumen identitas dasar yang sangat penting bagi setiap anak karena menjadi bukti legalitas status hukum dan dasar pemenuhan hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Meskipun capaian kepemilikan akta kelahiran pada balita terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun capaian tersebut belum merata, terutama di wilayah-wilayah khusus seperti daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, kawasan transmigrasi, dan wilayah miskin di perkotaan. Tantangan-tantangan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan sipil, rendahnya literasi administrasi di kalangan masyarakat, serta belum optimalnya penyediaan layanan proaktif dari instansi terkait. Selain itu, masih ditemui persepsi keliru di masyarakat bahwa akta kelahiran hanya dapat diterbitkan apabila orang tua anak telah menikah secara hukum. Padahal, regulasi saat ini telah memungkinkan penerbitan akta kelahiran meskipun hanya dengan mencantumkan nama ibu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sejumlah strategi terpadu. Beberapa di antaranya meliputi edukasi masyarakat melalui media sosial tentang pentingnya akta kelahiran dan prosedur pembuatannya, termasuk bagi anak dari orang tua yang tidak memiliki pernikahan formal; kampanye bersama komunitas dan sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran; serta penyediaan layanan keliling atau jemput bola oleh pemerintah daerah yang terintegrasi dengan layanan dasar seperti Posyandu, PAUD, dan Puskesmas.

Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu dimensi utama dalam menjamin perlindungan hak-hak sipil anak sekaligus mendukung pembangunan kependudukan yang inklusif. Semakin tinggi cakupan kepemilikan akta kelahiran, semakin banyak pula anak yang tercatat secara hukum dan memperoleh akses terhadap layanan dasar yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan hak individu, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam penguatan ketahanan keluarga serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan pada indikator ini akan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya generasi unggul yang tangguh, sebagai bagian dari upaya strategis dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

f) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, yakni dari 5,3 pada tahun 2024 menjadi 4,9 pada tahun 2025. Capaian ini memberikan sinyal positif bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin membaik, serta mencerminkan mulai terbukanya peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Namun demikian, penurunan angka pengangguran secara nasional belum sepenuhnya mengatasi tantangan struktural yang masih ada. Meskipun terjadi penurunan, ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara sistem pendidikan dan lapangan kerja yang masih menjadi isu penting dalam ketenagakerjaan (LKIP Kemnaker, 2024).

Oleh karena itu, upaya pengurangan pengangguran perlu diiringi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar kerja di tingkat lokal maupun nasional. Adapun langkah dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (LKIP Kemnaker, 2024).

Selain itu, pelibatan berbagai aktor di tingkat masyarakat, seperti Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Duta Genre, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Pramuka Peduli Kependudukan, serta Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), sangat penting dalam menggerakkan program pengabdian masyarakat. Melalui program ini, aktor-aktor tersebut berperan sebagai pelopor dalam kampanye "Produktif Sejak Dini," yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih intensif antara berbagai elemen ini perlu didorong untuk menciptakan dampak yang lebih luas.

Upaya ini perlu diperkuat dengan advokasi kepada pemerintah daerah agar menggunakan data kependudukan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan dan perencanaan pasar kerja lokal. Di sisi lain, kolaborasi multi pihak (*pentahelix*) antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media perlu ditingkatkan dalam rangka menyusun peta kebutuhan tenaga kerja lokal serta memperluas akses terhadap peluang wirausaha yang relevan dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah.

C. Dimensi Mobilitas

Dimensi mobilitas mencerminkan dinamika pergerakan penduduk yang memengaruhi keseimbangan persebaran dan potensi pembangunan di berbagai wilayah. Dimensi ini menggambarkan kemampuan dan kecenderungan keluarga untuk menetap maupun berpindah tempat tinggal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dimensi ini diukur melalui dua variabel utama. Pertama, penduduk non-migran usia ≥ 25 tahun yang mencerminkan tingkat keterikatan dan stabilitas penduduk terhadap wilayah asalnya, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam membangun kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga di daerah tempat tinggal. Kedua, migrasi keluar penduduk usia ≥ 25 tahun yang menunjukkan mobilitas penduduk dewasa dalam mencari peluang kerja, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik di wilayah lain.

Kedua variabel tersebut memberikan gambaran keseimbangan antara penduduk yang menetap dan yang berpindah sebagai refleksi dari dinamika pembangunan wilayah. Tingkat mobilitas yang terukur dan terarah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan penduduk, penguatan keluarga, serta pengelolaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Untuk Dimensi Mobilitas, nilai tetap berada pada 47,2 di tahun 2024 dan 2025.

Tabel 4.3 Nilai Indikator Dimensi Mobilitas Tahun 2024 & 2025

Tahun	Non Migran	Out Migran	Dimensi Mobilitas
2024	86,5	13,4	47,2
2025	86,6	13,4	47,2

Tabel 4.3 menunjukkan perubahan pada indikator Dimensi Mobilitas, dengan proporsi penduduk non-migran yang sedikit meningkat dari 86,5 pada tahun 2024 menjadi 86,6 pada tahun 2025, sementara angka migrasi keluar tetap stabil pada 13,4 di tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini menyebabkan nilai Dimensi Mobilitas tetap berada pada angka yang sama pada kedua tahun tersebut. Meskipun terjadi perubahan kecil pada indikator penyusunnya, perubahan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong pergeseran nilai dimensi mobilitas secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di daerah tersebut masih terbatas, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesempatan kerja lokal, daya tarik ekonomi daerah asal, dan biaya migrasi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas peluang di daerah asal untuk mendorong mobilitas yang lebih terencana dan produktif.

Berbeda dengan dimensi lainnya, Dimensi Mobilitas dalam IKIK menggambarkan dinamika indikator yang secara kuantitatif mungkin tampak bertolak belakang. Namun, keduanya tetap dapat bernilai positif dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian dalam dimensi ini sebaiknya tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus terus meningkat secara absolut. Sebaliknya, tujuan yang lebih penting adalah mencapai titik keseimbangan yang ideal suatu kondisi di mana mobilitas penduduk terjadi secara terencana, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial serta ekonomi. Dalam hal ini, mobilitas bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas dan dampak jangka panjangnya bagi pembangunan wilayah.

Perlu dipahami bahwa dimensi Mobilitas tidak mengukur seberapa banyak penduduk yang berpindah atau menetap, melainkan menilai apakah keputusan mobilitas tersebut dilakukan secara sadar, rasional, dan berlandaskan perencanaan. Dalam hal ini, kombinasi antara indikator Non Migran dan Migrasi Keluar digunakan untuk mencerminkan dinamika mobilitas yang terjadi. Proporsi penduduk yang tidak bermigrasi dalam jumlah terlalu besar dapat menjadi indikasi adanya potensi stagnasi di suatu wilayah, baik dari sisi ekonomi maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sebaliknya, tingginya angka migrasi keluar tanpa disertai perencanaan yang matang berisiko menyebabkan kehilangan tenaga kerja produktif di daerah asal.

a) Penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak bermigrasi (non migran)

Berdasarkan data pada Tabel 4.3, terdapat sedikit peningkatan dalam proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak bermigrasi, yakni dari 86,5 persen pada tahun 2024 menjadi 86,6 persen pada tahun 2025. Peningkatan kecil ini menunjukkan kecenderungan stabilitas dalam mobilitas penduduk pada kelompok usia dewasa. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, tren ini tetap penting untuk dicermati. Hal ini dapat mencerminkan adanya faktor-faktor lokal yang semakin menarik bagi penduduk untuk tetap tinggal di daerah asal, seperti meningkatnya peluang ekonomi, perbaikan infrastruktur, atau stabilitas sosial yang lebih terjamin. Dalam konteks pembangunan, stabilitas dalam angka non-migran bisa menandakan bahwa daerah asal memiliki daya tarik yang memadai untuk mempertahankan penduduknya, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan lokal yang lebih berkelanjutan dan merata.

Namun, perlu dicatat bahwa angka non-migran yang tinggi, meskipun mencerminkan daya tahan wilayah, juga bisa menjadi indikator stagnasi dalam hal pengembangan potensi tenaga kerja di luar daerah. Keterbatasan mobilitas ini mungkin menunjukkan keterbatasan dalam akses ke peluang yang lebih luas, seperti pendidikan atau pekerjaan yang lebih baik di luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun proporsi penduduk yang tidak bermigrasi bisa mencerminkan stabilitas, hal ini juga perlu dilihat dalam konteks kebijakan pembangunan daerah yang mengutamakan peningkatan kesempatan yang setara bagi penduduk usia produktif untuk mengembangkan potensi mereka, baik di daerah asal maupun di luar wilayah.

Mobilitas penduduk merupakan bagian penting dari dinamika pembangunan, namun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi penduduk usia produktif yang memilih untuk tetap tinggal di daerah asal. Di sejumlah wilayah, keputusan untuk tidak bermigrasi masih dipersepsikan sebagai pilihan yang kurang menjanjikan secara ekonomi, sehingga potensi sosial dan ekonomi kelompok non migran belum tergarap secara optimal. Padahal, daerah tujuan migrasi yang umumnya berupa kota-kota besar, kini menghadapi berbagai permasalahan kompleks seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kriminalitas, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kondisi tersebut menjadikan kawasan perkotaan semakin kurang nyaman sebagai tempat tinggal maupun sebagai pusat kegiatan ekonomi, sehingga mempertimbangkan untuk tetap tinggal dan berkontribusi di daerah asal dapat menjadi pilihan yang rasional dan berkelanjutan bagi sebagian penduduk usia produktif. Program pemberdayaan, baik dari sisi peningkatan keterampilan, akses ekonomi, maupun partisipasi sosial, belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu, literasi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan mobilitas masih terbatas, baik dalam pendidikan formal maupun dalam komunikasi di lingkungan keluarga.

Sebagai respon atas kondisi tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong kebijakan yang mengangkat peran strategis kelompok non migran sebagai penggerak pembangunan lokal. Narasi positif tentang pentingnya membangun daerah asal perlu diperkuat melalui pendidikan kependudukan dan pendekatan berbasis komunitas. Materi seperti “Perencanaan Mobilitas” dan “Produktif di Daerah Sendiri” dapat diintegrasikan dalam program pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Peran tokoh lokal, penyuluh, dan tenaga lapangan sangat penting dalam mendampingi masyarakat agar mampu melihat pilihan menetap sebagai langkah strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, keputusan untuk tidak bermigrasi tidak lagi dipandang sebagai keterbatasan, melainkan sebagai bentuk kemandirian dan komitmen terhadap kemajuan daerah asal.

b) Penduduk usia 25 tahun ke atas yang bermigrasi keluar

Persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang melakukan migrasi keluar tetap berada pada angka yang sama, yaitu 13,4 persen pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya proporsi penduduk non migran pada periode yang sama, yang menunjukkan kecenderungan lebih banyak

penduduk usia dewasa memilih untuk tetap tinggal di daerah asal. Kondisi ini dapat mencerminkan mulai tumbuhnya daya tarik ekonomi dan sosial di tingkat lokal, sehingga kebutuhan untuk berpindah ke daerah lain, terutama ke kota besar, menjadi berkurang. Fenomena tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk adaptasi penduduk terhadap perubahan sosial dan ekonomi, di mana keputusan untuk tidak bermigrasi dilakukan secara lebih rasional dan mempertimbangkan keseimbangan antara peluang ekonomi, kualitas hidup, dan kenyamanan lingkungan. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa dinamika mobilitas penduduk di Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Meskipun tren migrasi keluar menunjukkan penurunan yang relatif kecil, fenomena ini tetap menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam kerangka pembangunan berwawasan kependudukan. Salah satu isu penting yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa keputusan untuk tetap tinggal maupun bermigrasi dilakukan secara terencana dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Rendahnya literasi masyarakat mengenai migrasi yang terencana, terutama dalam hal perencanaan ekonomi, sosial, serta pengelolaan dampak terhadap keluarga yang ditinggalkan, masih menjadi kendala dalam menciptakan mobilitas penduduk yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan pendampingan bagi masyarakat terkait perencanaan mobilitas dan kesiapan keluarga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan migrasi yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat edukatif, preventif, dan kolaboratif. Salah satu upaya strategis adalah meningkatkan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya perencanaan migrasi melalui berbagai kanal komunikasi. Dalam kerangka pembangunan berwawasan kependudukan, mobilitas yang dilakukan secara sadar dan terencana memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Oleh karena itu, migrasi yang berlandaskan perencanaan matang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan sosial dan pembangunan wilayah asal maupun tujuan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana kualitas penduduk, termasuk dalam aspek kesiapan mobilitas, menjadi dimensi utama dalam mencapai kemajuan bangsa secara inklusif dan berkelanjutan.

D. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan mencerminkan kondisi tempat tinggal dan akses keluarga terhadap fasilitas dasar yang mendukung kehidupan yang sehat, layak, dan berkelanjutan. Dimensi ini menekankan pentingnya kualitas hunian dan ketersediaan sarana pendukung yang memengaruhi kesejahteraan fisik maupun sosial keluarga.

Dimensi ini diukur melalui dua variabel utama. Pertama, rata-rata luas lantai per kapita yang mencerminkan tingkat kelayakan tempat tinggal keluarga. Semakin luas ruang hunian per individu, semakin baik kualitas kehidupan karena memberikan kenyamanan, privasi, dan ruang tumbuh yang memadai bagi anggota keluarga. Kedua, akses terhadap air bersih yang menunjukkan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan sumber air yang aman dan sehat, yang menjadi prasyarat penting bagi kesehatan dan kualitas hidup.

Kedua variabel tersebut berperan sebagai indikator penting dalam menilai kondisi lingkungan tempat keluarga hidup dan berkembang. Lingkungan yang layak huni dan akses air bersih yang memadai menjadi fondasi utama bagi terciptanya keluarga yang sehat, produktif, dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pada Dimensi Lingkungan, terdapat peningkatan dari 56,1 pada tahun 2024 menjadi 56,7 pada tahun 2025.

Tabel 4.4 Nilai Indikator Dimensi Lingkungan Tahun 2024 & 2025

Tahun	Luas Lantai	Air Bersih	Dimensi Lingkungan
2024	25,4	81,9	56,1
2025	25,3	83,7	56,7

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa pergerakan indikator di dalamnya menunjukkan arah yang berlawanan. Indikator luas lantai per kapita justru mengalami sedikit penurunan dari 25,4 pada tahun 2024 menjadi 25,3 pada tahun 2025, yang kemungkinan disebabkan oleh pertambahan jumlah anggota rumah tangga atau keterbatasan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Sebaliknya, indikator sumber air bersih mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 81,9 menjadi 83,7 pada tahun 2025, yang mencerminkan keberhasilan program penyediaan akses air bersih, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Dimensi Lingkungan dalam IKIK merepresentasikan kualitas ruang hidup keluarga yang layak, sehat, dan mendukung terciptanya kehidupan yang bermartabat. Dua indikator utama yang digunakan dalam dimensi ini adalah Luas Lantai per Kapita dan Akses terhadap Air Bersih. Kedua indikator tersebut menjadi cerminan konkret dari pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, khususnya dalam aspek tempat tinggal yang memadai dan akses sanitasi yang sehat.

a) Luas Lantai per Kapita

Indikator Luas Lantai per Kapita mengukur rasio antara total luas lantai hunian yang ditempati oleh rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat kepadatan hunian yang langsung berpengaruh pada kualitas hidup keluarga. Pada tahun 2024, indikator ini tercatat sebesar 25,4, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 25,3 pada tahun 2025.

Meskipun penurunan ini tidak signifikan, hal ini perlu dicermati sebagai sinyal adanya stagnasi dalam upaya pemerataan akses terhadap hunian yang layak dan sehat. Kepadatan hunian yang tinggi dapat berisiko terhadap kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas anggota keluarga, terutama anak-anak. Oleh karena itu, peningkatan luas lantai per kapita harus menjadi prioritas dalam pembangunan perumahan yang berkelanjutan, guna mengurangi risiko masalah kesehatan dan memastikan hunian yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman yang mengatur luas lantai minimal rumah tinggal dan rumah deret. Pasal 22 ayat 3 UU No.11 Tahun 2011 merumuskan “Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi”. Namun, melalui uji materi, ketentuan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan prinsip keterjangkauan. Di lapangan, masih ditemukan Rumah Sederhana Sehat (RSS) dengan luas lantai berkisar antara 18–22 m², yang tidak memenuhi standar minimum hunian yang telah ditetapkan. RSS merupakan bagian dari program Rumah Inti Tumbuh, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002, dengan pertimbangan utama adalah keterjangkauan ekonomi.

Hunian yang sehat dan layak menjadi ruang tumbuh yang mendukung tumbuh kembang anggota keluarga, meningkatkan kenyamanan, dan mendorong produktivitas individu dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang memadai berkontribusi dalam memperkuat fungsi-fungsi dasar keluarga, seperti perlindungan, pendidikan, dan pembentukan karakter. Dengan demikian, peningkatan kualitas hunian merupakan bagian integral dari strategi pembangunan SDM unggul yang adaptif terhadap tantangan masa depan, serta menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada penyediaan hunian layak dan terjangkau, dengan memperhatikan keseimbangan antara keterjangkauan ekonomi, kelayakan ruang hidup, serta akses terhadap fasilitas dasar, agar setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

b) Akses terhadap air bersih

Indikator Akses terhadap Air Bersih menunjukkan tren yang stagnan, yaitu sebesar 81,9 pada tahun 2024 menjadi 83,7 pada tahun 2025. Kondisi capaian ini menjadi sinyal yang memerlukan perhatian serius, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kesehatan masyarakat, kualitas sanitasi lingkungan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Penurunan akses terhadap air bersih berpotensi meningkatkan risiko penyakit, memperburuk kondisi lingkungan tempat tinggal, serta memperlebar kesenjangan kualitas hidup.

Meskipun capaian nasional akses terhadap air bersih menunjukkan angka yang tergolong tinggi, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan masih nyata

terjadi, khususnya di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, kawasan transmigrasi, serta daerah miskin perkotaan. Di wilayah-wilayah tersebut, banyak keluarga masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang layak dan aman. Hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kualitas sumber air yang belum memadai menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar ini. Ketidaksetaraan akses air bersih tersebut berisiko memperlebar disparitas kualitas hidup dan berpotensi mengganggu ketahanan keluarga, khususnya dalam aspek kesehatan dan sanitasi.

Akses terhadap air bersih bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian penting dari ketahanan keluarga yang memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup, terutama di wilayah rentan dengan infrastruktur terbatas. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan intervensi terpadu yang mencakup edukasi tentang pentingnya air bersih dan sanitasi dalam program pendidikan kependudukan, pelibatan aktif penyuluh dan kader di lapangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur air bersih oleh pemerintah daerah di wilayah prioritas. Pendekatan kolaboratif antar unsur *pentahelix* juga perlu diperkuat untuk mengembangkan solusi alternatif yang didukung oleh kampanye publik yang masif dan mudah dipahami masyarakat, guna menegaskan bahwa air bersih adalah hak dasar dan fondasi utama bagi pembangunan keluarga dan masyarakat yang berkelanjutan.

4.3 Sinergitas IKIK dan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

IKIK mengukur tingkat pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam merespons berbagai isu kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, bonus demografi, ketenagakerjaan, kesehatan reproduksi, dan ketahanan keluarga. Indeks ini penting untuk memahami sejauh mana masyarakat dan pemerintah mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam kebijakan dan tindakan pembangunan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap masalah kependudukan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap dinamika demografis yang terjadi di suatu wilayah.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 angka 4, Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan daerah memperhatikan aspek kependudukan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Kedua indeks ini memiliki keterkaitan yang erat, karena pembangunan yang berwawasan kependudukan hanya

dapat efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap isu kependudukan.

IPBK bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Semakin tingginya nilai IPBK, dapat dikatakan bahwa suatu pembangunan sudah dilaksanakan secara semakin baik dengan menempatkan posisi penduduk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang menjalankannya. IPBK menilai sejauh mana prinsip kependudukan diintegrasikan ke dalam pembangunan melalui lima dimensi, yakni: Dimensi Partisipasi, Dimensi Keberlanjutan, Dimensi Inklusivitas, Dimensi Holistik Integratif, dan Dimensi Kesetaraan (Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024). IPBK juga dapat memberikan gambaran dasar perumusan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah.

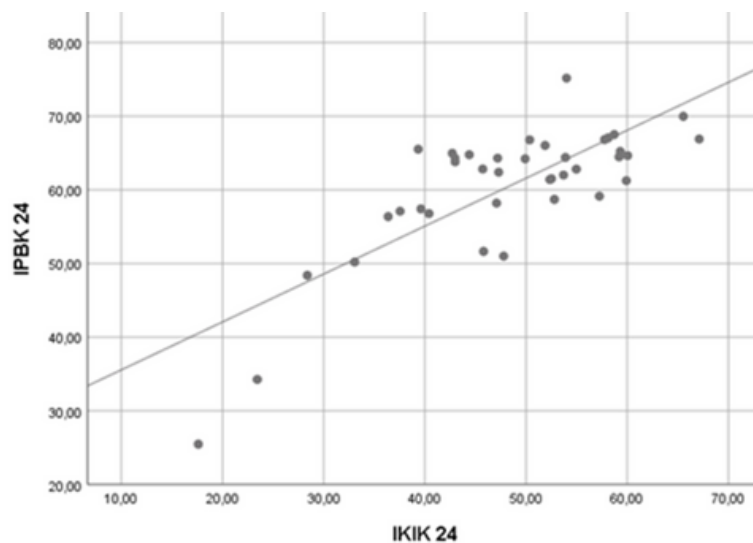
Suatu pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat terlepas dari isu kependudukan, dalam konteks ini IPBK mencerminkan integrasi aspek kependudukan dalam pembangunan. Guna mendukung pencapaian IPBK, perlu adanya pula instrumen yang dapat mengukur tingkat kepedulian terhadap isu kependudukan di seluruh wilayah. Dalam hal inilah, Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) memiliki peran sebagai indeks yang menilai bagaimana tingkat perhatian suatu wilayah terhadap persoalan kependudukan, baik dari aspek kuantitas dan kualitas penduduk, mobilitas, dan juga aspek lingkungan.

Hubungan antara kedua indeks, yakni IPBK dan IKIK, sangat penting untuk dibahas dan dikaji karena kedua indeks tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang maupun hambatan dalam memperkuat sinergi pembangunan yang dikaitkan dengan isu kependudukan. Keterkaitan antara IPBK dan IKIK dapat dibuktikan melalui analisis korelasi yang mengukur ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan pada kedua indeks. Berdasarkan hasil analisis data IPBK 2024 dan IKIK 2024 yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,78. Wilayah yang memiliki capaian nilai IKIK yang baik cenderung juga berhasil mengintegrasikan isu kependudukan dalam pembangunan yang direfleksikan dengan capaian IPBK yang tinggi pula.

Hubungan antara IPBK dan IKIK juga dapat dianalisis melalui keterkaitan antar dimensi yang membentuk kedua indeks tersebut. Contohnya, pada Dimensi partisipasi dalam IPBK akan berjalan optimal apabila adanya tingkat kepedulian yang digambarkan pada Dimensi Kualitas yang ada dalam IKIK,

masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik dan juga tingkat pengangguran masyarakat yang rendah, akan mendorong produktivitas keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan. Contoh lainnya pada Dimensi Inklusivitas yang ada dalam IPBK, menekankan pada keberpihakan pemerintah dalam pembangunan, sangat dipengaruhi oleh perhatian terhadap mobilitas penduduk dalam IKIK. Ketika isu migrasi, urbanisasi, dan persebaran penduduk menjadi perhatian, maka kebijakan yang inklusif dapat dirancang untuk menjawab tantangan integrasi sosial dan pelayanan dasar pada pembangunan berwawasan kependudukan.

Gambar 4.3 Grafik Scatter Plot IPBK 24 by IKIK 24



Sumber: Hasil Penghitungan Korelasi Data IPBK 2024 dan IKIK 2024

Grafik *scatter plot* pada Gambar 4.3 memperkuat bahwa adanya hubungan antara IPBK dan IKIK, titik data yang cenderung naik ke arah kanan atas menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kedua indeks. Adanya *outlier* yang ditunjukkan dengan titik jauh di bawah garis juga menunjukkan adanya wilayah yang belum konsisten dengan capaian IKIK rendah dan juga IPBK yang rendah sehingga tidak searah dengan tren wilayah lainnya. Pola sebaran titik-titik pada grafik tersebut secara visual memperkuat hasil statistik yang mana daerah-daerah dengan nilai IKIK tinggi cenderung memiliki IPBK yang juga tinggi.

Dari hasil analisis korelasi Pearson dan juga *scatter plot* menggambarkan keterkaitan IPBK dan IKIK dalam pembangunan berwawasan kependudukan sebagai dua alat ukur yang saling melengkapi dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan berbasis kependudukan. Keduanya memiliki dimensi yang berbeda namun saling beririsan secara fungsional. IPBK menilai sejauh mana prinsip-prinsip kependudukan diintegrasikan ke dalam pembangunan, sedangkan IKIK menilai tingkat perhatian dan pemahaman terhadap isu-isu kependudukan.

Hubungan antara IKIK dan IPBK dapat dijelaskan melalui keterkaitan dimensi penyusunnya. IKIK mencakup dimensi pemahaman, sikap, dan partisipasi masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap isu-isu kependudukan. Sementara itu, IPBK disusun dari dimensi perencanaan pembangunan, implementasi program, serta kelembagaan yang mengintegrasikan aspek kependudukan. Misalnya, tingginya pemahaman masyarakat tentang bonus demografi (dimensi IKIK) akan mendorong lahirnya partisipasi dalam program peningkatan kualitas tenaga kerja muda, yang pada gilirannya memperkuat dimensi perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan dalam IPBK. Demikian pula, sikap positif masyarakat terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk akan memperkuat efektivitas kebijakan keluarga berencana yang menjadi bagian dari implementasi pembangunan berwawasan kependudukan. Hal ini pada gilirannya meningkatkan skor IPBK karena pembangunan daerah lebih terarah sesuai dengan dinamika demografi.

Sebaliknya, peningkatan IPBK juga berpotensi memperkuat IKIK. Daerah yang menerapkan pembangunan berwawasan kependudukan akan menciptakan lingkungan sosial dan kebijakan publik yang mendorong literasi kependudukan masyarakat. Misalnya melalui penyediaan program edukasi, integrasi isu kependudukan dalam kurikulum sekolah, serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Upaya ini akan menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan secara berkelanjutan, sehingga menciptakan siklus positif antara kebijakan pembangunan dan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, keterkaitan IKIK dan IPBK mencerminkan hubungan saling memperkuat antara aspek kesadaran sosial dan kebijakan pembangunan. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan akan mempercepat pencapaian pembangunan yang berwawasan kependudukan, dan sebaliknya, pembangunan yang responsif terhadap dinamika demografi akan menumbuhkan kepedulian masyarakat secara luas. Integrasi keduanya menjadi strategi penting untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

4.4 Sinergitas IKIK dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IKIK merupakan instrumen yang mencerminkan tingkat pemahaman, perhatian, dan keterlibatan masyarakat maupun pemangku kepentingan dalam merespons persoalan kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, ketenagakerjaan, serta kualitas

keluarga. Sementara itu, IPM menjadi indikator komposit yang mengukur pencapaian pembangunan dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Nainggolan et al., 2022). Kedua indeks ini memiliki keterkaitan yang erat, karena kualitas pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kependudukan terbentuk dan diwujudkan dalam perilaku serta kebijakan.

IPM merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. IPM dijadikan sebagai acuan penting dalam menyusun strategi pembangunan di tingkat kabupaten/kota bahkan provinsi. Peningkatan IPM sering dipandang sebagai bukti keberhasilan suatu daerah, karena mendorong setiap daerah untuk terus meningkatkan capaian di bidang pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak masyarakat. Capaian IPM dari tahun ke tahun secara keseluruhan terus mengalami tren kenaikan, misalnya IPM Indonesia mencapai angka 75 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian sebesar 74,4 dan meningkat sebesar 1,5 dibandingkan tahun 2022 (72,9). IPM menyediakan data yang dapat membantu pembuat kebijakan merumuskan strategi pembangunan prioritas yang lebih efektif dan berkelanjutan.

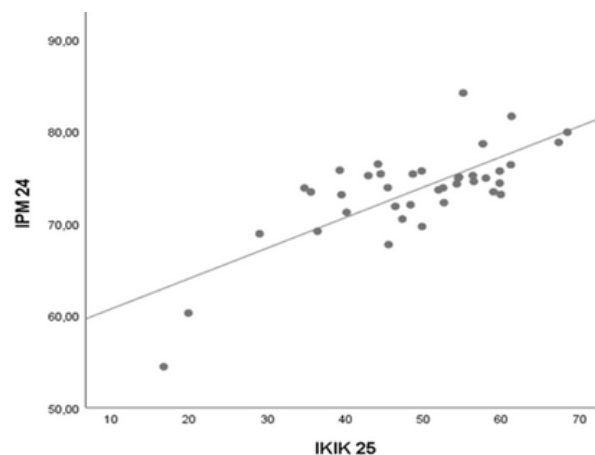
Namun, pencapaian IPM yang optimal tidak dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa adanya kesadaran dan pengelolaan yang baik terhadap isu-isu kependudukan yang mendasarinya. Keberagaman kondisi wilayah di Indonesia menimbulkan tantangan kependudukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan tidak bisa bersifat seragam, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Untuk mendukung efektivitas proses pembangunan, sangat penting untuk membangun kesadaran terhadap isu-isu kependudukan yang ada di setiap wilayah. Dalam konteks ini, IKIK menjadi indikator pelengkap yang sangat penting bagi IPM. Jika IPM menitikberatkan pada capaian pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, maka IKIK menilai sejauh mana kepedulian terhadap isu kependudukan diintegrasikan dalam pembangunan. IKIK mengukur tingkat kepedulian terhadap isu-isu kependudukan dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang kondisi kuantitas dan kualitas penduduk, mobilitas, dan lingkungan.

Keterkaitan antara IKIK dan IPM seringkali menjadi pertanyaan dari beberapa pihak, seberapa kuat hubungan antara kedua indeks tersebut dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat ditunjukkan secara statistik melalui analisis korelasi yang dapat menghasilkan nilai hubungan antara kedua indeks. Analisis korelasi dilakukan antara IKIK 2025 dan IPM 2024 karena

kedua indeks menggunakan data yang dipublikasikan pada tahun 2024. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara capaian IPM 2024 dan IKIK 2025, diperoleh hasil nilai korelasi Pearson sebesar 0,75. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kedua indeks, artinya semakin tinggi tingkat kepedulian dan pengelolaan terhadap isu kependudukan di suatu wilayah yang direfleksikan oleh capaian IKIK, maka semakin tinggi pula nilai capaian IPM di wilayah tersebut. Hasil ini memperlihatkan bahwa adanya kepedulian dan perhatian pada isu kependudukan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Hubungan IKIK dan IPM jika digambarkan secara visual, dapat dilihat melalui pola sebaran data pada diagram pencar (*scatter plot*) pada Gambar 4.4. Titik-titik pada grafik cenderung membentuk pola positif yang berarti semakin tinggi IKIK, semakin tinggi pula IPM. Pola ini memperkuat hasil perhitungan statistik yang menunjukkan konsistensi hubungan positif keduanya. Diagram ini juga menunjukkan tren korelasi positif yang konsisten, di mana titik-titik data cenderung menyebar dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini memperkuat hasil statistik bahwa daerah-daerah dengan nilai IKIK tinggi cenderung memiliki IPM yang juga tinggi.

Gambar 4.4 Grafik Scatter Plot IPM 24 by IKIK 25



Sumber: Hasil Penghitungan Korelasi Data IPM 2024 dan IKIK 2025

Analisis korelasi dan diagram pencar di atas antara IKIK dan IPM membuktikan bahwa upaya peningkatan IPM akan lebih efektif jika didukung oleh kesadaran yang tinggi terhadap permasalahan kependudukan di setiap wilayah. Korelasi antara IKIK dan IPM dapat dipahami melalui mekanisme peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingginya IKIK di suatu wilayah mendorong terciptanya kebijakan yang responsif terhadap dinamika demografi, misalnya melalui pengendalian angka kelahiran, peningkatan akses pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang lebih merata. Kondisi

tersebut akan berkontribusi langsung pada peningkatan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan penghasilan per kapita, yang semuanya merupakan komponen IPM. Dengan kata lain, kesadaran kolektif terhadap isu kependudukan menjadi faktor kunci yang memperkuat efektivitas program pembangunan manusia.

Selain itu, hubungan timbal balik juga terjadi, di mana peningkatan IPM akan memperkuat IKIK. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas kritis yang lebih tinggi dalam memahami persoalan kependudukan, serta lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung program-program pemerintah, seperti perencanaan keluarga, penyiapan generasi muda produktif, dan penguatan ketahanan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya siklus positif, di mana peningkatan kepedulian terhadap isu kependudukan mendukung percepatan pembangunan manusia, dan sebaliknya, peningkatan kualitas manusia memperkuat kesadaran kependudukan.

Dengan demikian, IKIK dapat menjadi pelengkap sekaligus pondasi yang penting untuk menjadi perhatian semua pihak terkait dalam proses pembangunan, terutama dalam pembangunan kependudukan. Integrasi IKIK dan IPM dapat menjadi pendekatan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan. Upaya meningkatkan IPM tidak hanya melalui intervensi pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan literasi kependudukan masyarakat. Hubungan positif yang kuat dan signifikan antara IKIK dan IPM membuktikan bahwa upaya peningkatan IPM akan lebih efektif jika didukung oleh kesadaran yang tinggi terhadap permasalahan kependudukan di setiap wilayah. Oleh karena itu, apabila kedua indeks ini dikelola secara terpadu, maka target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan lebih mudah dicapai, karena pembangunan manusia yang berkualitas akan berjalan beriringan dengan kesadaran demografis yang kuat.

5

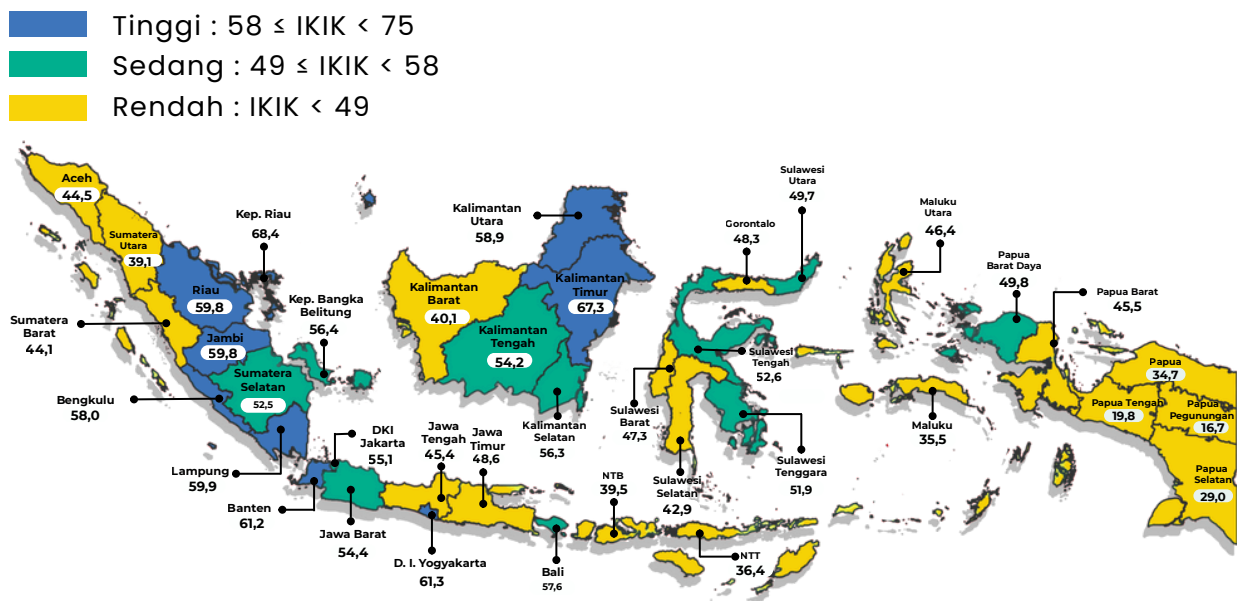
INDEKS KEPEDULIAN TERHADAP ISU KEPENDUDUKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA



5.1 Hasil Capaian IKIK di Tingkat Provinsi

Analisis capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan di berbagai wilayah Indonesia. Pengukuran ini penting sebagai dasar dalam memahami variasi tingkat kesadaran dan partisipasi penduduk antarprovinsi. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi wilayah dengan capaian tinggi yang dapat menjadi contoh praktik baik, serta wilayah dengan capaian lebih rendah yang memerlukan intervensi kebijakan dan program penguatan.

Gambar 5.1 Distribusi Capaian IKIK Tahun 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

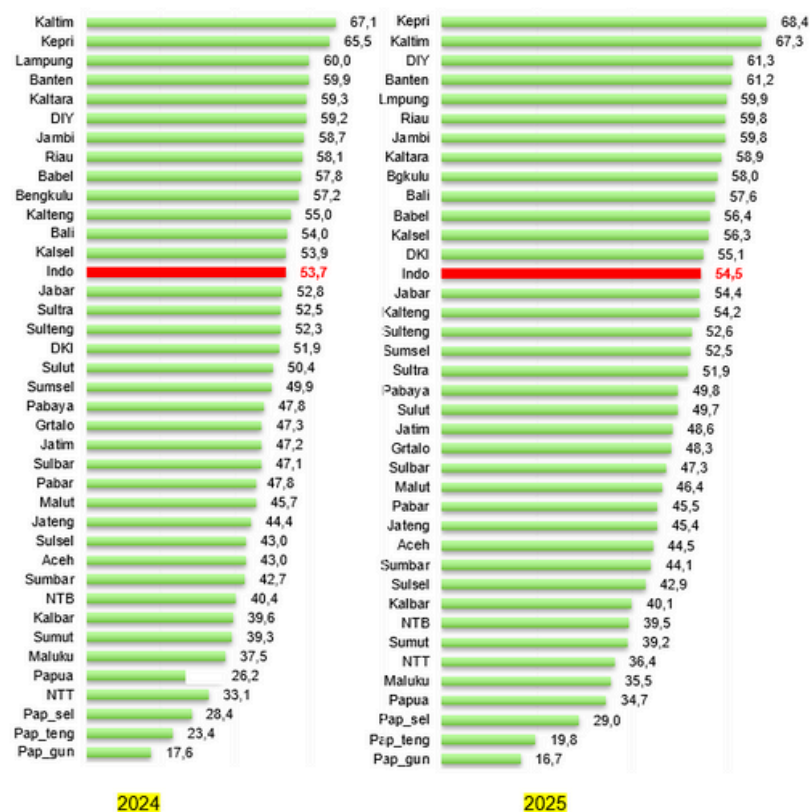
Gambar 5.1 menyajikan capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) di tingkat provinsi. Dalam gambar tersebut ditampilkan distribusi nilai IKIK dari seluruh provinsi di Indonesia, yang dikelompokkan berdasarkan rentang kategori tertentu. Melalui penyajian ini, dapat terlihat perbandingan tingkat kepedulian antarwilayah secara lebih jelas dan memahami posisi masing-masing provinsi dalam klasifikasi IKIK nasional.

Berdasarkan Gambar 5.1, terdapat 9 provinsi (23,7 persen) yang memiliki nilai IKIK dalam kategori tinggi ($58 \leq \text{IKIK} < 75$). Provinsi-provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, D.I. Yogyakarta, Banten, Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, dan Bengkulu. Sementara itu, terdapat 11 provinsi (28,9 persen) dengan nilai IKIK kategori sedang ($49 \leq \text{IKIK} < 58$), yaitu Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Utara. Provinsi-provinsi dalam kategori ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai IKIK-nya dan mencapai atau melampaui rata-rata nasional. Adapun 18 provinsi lainnya (47,4 persen)

masih berada pada kategori rendah (IKIK < 49). Provinsi tersebut meliputi Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Provinsi dengan kategori rendah ini memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan serta memperkuat pelaksanaan program-program yang relevan di daerah masing-masing.

Distribusi capaian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada provinsi yang masuk dalam kategori nilai IKIK “sangat tinggi”. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan masih perlu ditingkatkan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang lebih intensif, terarah, dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kepedulian tersebut. Upaya ini penting agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kependudukan dapat terus tumbuh dan merata di semua provinsi.

Gambar 5.2 Perbandingan Capaian IKIK Nasional Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan Gambar 5.2, pada tahun 2024 terdapat 8 provinsi yang memiliki nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) berada di atas rata-rata nasional. Provinsi-provinsi ini menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu kependudukan, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun partisipasi masyarakat. Sementara itu, terdapat tiga belas provinsi dengan nilai IKIK yang berada di sekitar rata-rata nasional. Kelompok ini mencerminkan capaian yang tergolong moderat dan masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui penguatan program dan edukasi kependudukan. Adapun 25 provinsi lainnya memiliki nilai IKIK di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah masih memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut, terutama dalam upaya meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat terhadap berbagai isu kependudukan.

Jika dibandingkan antara capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) tahun 2024 dan tahun 2025, terlihat bahwa terdapat perubahan nilai yang cukup bervariasi antarprovinsi. Secara keseluruhan, sebanyak 11 provinsi mengalami penurunan nilai IKIK pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Sementara itu, terdapat 23 provinsi yang menunjukkan peningkatan nilai IKIK pada tahun 2025. Provinsi-provinsi yang mengalami kenaikan tersebut antara lain Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D. I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan yang berbeda-beda di setiap wilayah, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta efektivitas program kependudukan yang dijalankan di masing-masing daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) secara nasional terus meningkat, masih ada beberapa wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaan program kependudukan. Penurunan capaian di sejumlah provinsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat lokal. Karena itu, strategi intervensi tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masing-masing wilayah. Pendekatan yang kontekstual dan spesifik berdasarkan indikator pada setiap dimensi IKIK akan membantu pemerintah mengenali kekuatan dan kelemahan di tiap daerah. Dengan cara

ini, upaya peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan kependudukan, dan kualitas generasi muda dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang nyata.

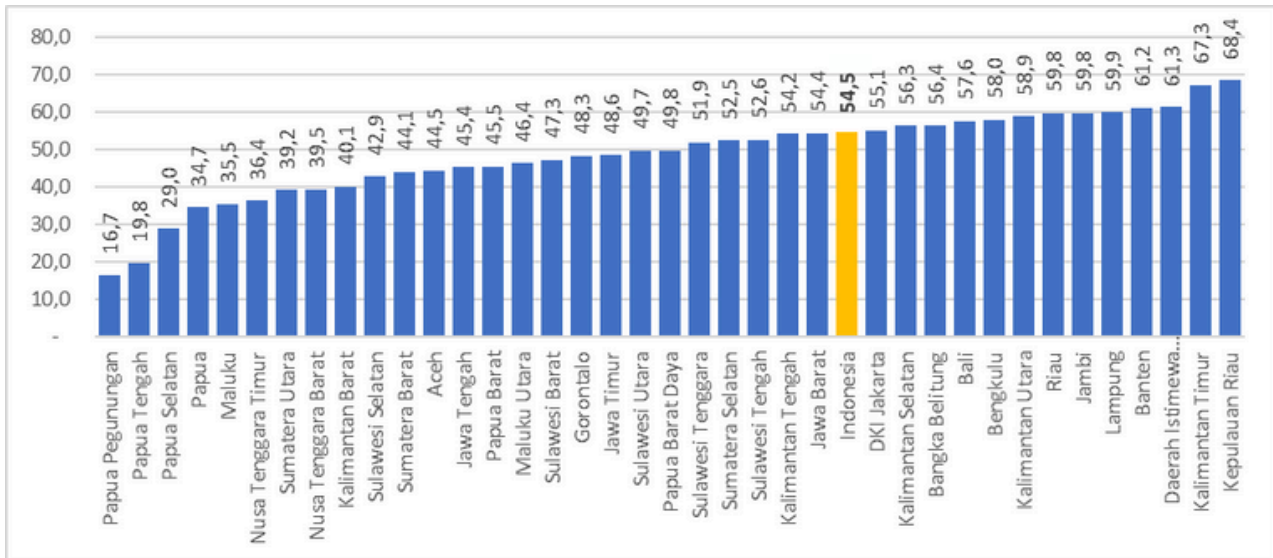
Pada tahun 2025, terdapat 4 provinsi yang mencatat capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) di atas angka 60. Capaian ini mencerminkan tingkat kepedulian yang tinggi masyarakat terhadap isu-isu kependudukan. Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi secara nasional dengan nilai 68,4, meningkat dari 65,5 pada tahun 2024. Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan kinerja yang konsisten dengan sedikit peningkatan dari 67,1 menjadi 67,3. Sementara itu, 2 provinsi yang sebelumnya belum masuk dalam kelompok dengan capaian tertinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten berhasil mencatat peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai IKIK sebesar 61,3, sedangkan Banten mencapai 61,2. Di sisi lain, Provinsi Lampung yang pada tahun 2024 masih termasuk dalam kelompok provinsi dengan nilai di atas 60, pada tahun 2025 mencatatkan nilai sebesar 59,9. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari 60,0 pada tahun sebelumnya, capaian Lampung tetap tergolong baik dan menunjukkan kondisi yang relatif stabil.

Pada tahun 2025, terdapat 8 provinsi yang mencatat nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) di bawah 40. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat di wilayah tersebut masih tergolong rendah dan perlu menjadi perhatian bersama. Provinsi Papua Pegunungan kembali menempati posisi terendah secara nasional dengan nilai IKIK sebesar 16,7, sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 17,6. Penurunan serupa juga terjadi di Provinsi Papua Tengah dari 23,4 menjadi 19,8. Selain itu, Provinsi Maluku mengalami penurunan dari 37,5 menjadi 35,5, dan Provinsi Sumatera Utara turun tipis dari 39,3 menjadi 39,2. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada tahun 2024 memiliki nilai 40,4 kini turun ke angka 39,5, sehingga masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kepedulian rendah.

Berbeda dengan 5 provinsi yang mengalami penurunan, Provinsi Papua Selatan justru menunjukkan peningkatan nilai IKIK, dari 28,4 pada tahun 2024 menjadi 29,0 pada tahun 2025. Provinsi Nusa Tenggara Timur, meningkat dari 33,1 menjadi 36,4. Provinsi Papua mengalami peningkatan yang signifikan dari 26,2 menjadi 34,7. Meskipun ketiga provinsi tersebut masih berada di bawah ambang nilai 40, tren perbaikan ini memberikan sinyal positif terhadap meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat berhasil keluar dari kategori rendah setelah mencatat kenaikan dari 39,6 menjadi 40,1. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian

wilayah mengalami penurunan, terdapat pula daerah yang terus memperbaiki capaian IKIK. Hal ini menegaskan pentingnya pemantauan berkala untuk memahami dinamika capaian antarwilayah serta merumuskan strategi peningkatan kepedulian kependudukan yang lebih efektif dan kontekstual.

Gambar 5.3 Peringkat Capaian IKIK di Tingkat Provinsi Tahun 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarprovinsi. Nilai indeks berkisar antara 16,7 di Papua Pegunungan hingga 68,4 di Kepulauan Riau. Secara nasional, rata-rata IKIK berada pada angka 54,4. Angka ini menggambarkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan secara umum masih berada pada kategori sedang, namun dengan kesenjangan yang cukup lebar antarwilayah.

Beberapa provinsi menunjukkan tren peningkatan capaian IKIK, salah satunya adalah Kepulauan Riau yang berhasil mencatat nilai tertinggi secara nasional, yaitu 68,4. Capaian ini menandakan meningkatnya literasi kependudukan dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu kependudukan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam RPJMD, disertai dukungan aktif dari berbagai pihak.

Keterlibatan sektor swasta, media lokal, dan organisasi masyarakat turut memperkuat kampanye mengenai program keluarga berencana dan ketahanan keluarga di daerah tersebut. Selain itu, karakteristik masyarakat Kepulauan Riau yang mayoritas tinggal di wilayah perkotaan membuat mereka lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik, sehingga mempercepat peningkatan kesadaran terhadap isu kependudukan.

Nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) yang rendah di beberapa provinsi, seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi kependudukan belum merata karena kondisi geografis yang menantang. Wilayah pegunungan dan kepulauan dengan infrastruktur transportasi terbatas membuat pelaksanaan program penyuluhan serta sosialisasi menjadi kurang optimal. Selain itu, jumlah tenaga penyuluh kependudukan yang masih terbatas dan kemampuan yang belum merata turut memengaruhi penyebaran informasi dan edukasi kependudukan. Akibatnya, peningkatan kesadaran masyarakat, terutama dalam dimensi kuantitas penduduk, belum berjalan secara maksimal. Faktor sosial budaya juga memiliki pengaruh yang besar. Rendahnya penerimaan terhadap program keluarga berencana, masih tingginya praktik perkawinan usia muda, serta kuatnya nilai-nilai tradisional tertentu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan kependudukan. Di sisi lain, dukungan kelembagaan dan sinergi antar sektor di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Akibatnya, isu kependudukan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terpadu antara peningkatan akses layanan dasar, penguatan kapasitas penyuluh, serta strategi komunikasi yang sensitif terhadap konteks sosial budaya agar kepedulian masyarakat terhadap isu kependudukan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Sebaliknya, tingginya capaian IKIK di beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran kelembagaan yang kuat, sinergi lintas sektor, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media dalam memperluas informasi serta edukasi kependudukan. Pemanfaatan media massa dan teknologi informasi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi kependudukan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki akses komunikasi dan informasi yang lebih baik. Selain itu, dukungan terhadap inovasi program dan pendekatan berbasis data turut memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan kependudukan di daerah-daerah tersebut.

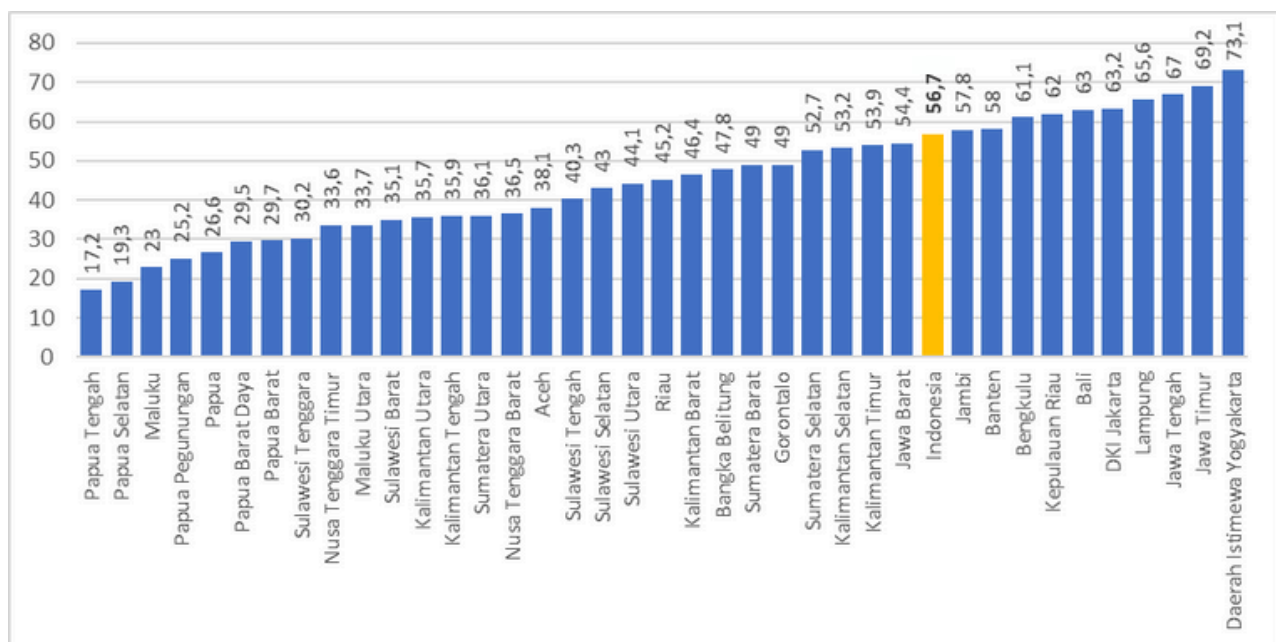
A. Dimensi Kuantitas

Pada tahun 2025, capaian Dimensi Kuantitas Penduduk di tingkat provinsi menunjukkan dinamika yang relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 10 provinsi tercatat memiliki nilai di atas rata-rata nasional, jumlah yang sama seperti pada tahun 2024. Beberapa di antaranya

bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menempati posisi teratas dengan nilai 73,1, sedikit menurun dari tahun sebelumnya namun tetap mempertahankan peringkat pertama. Provinsi Jawa Timur menyusul di peringkat kedua dengan nilai 69,2, mengalami peningkatan cukup signifikan dari 65,9 pada tahun 2024. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan nilai 67,0, naik dari 65,4 pada tahun sebelumnya. Ketiga provinsi ini menggambarkan keberhasilan daerah yang telah menjadikan isu kuantitas penduduk sebagai bagian penting dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerahnya.

Meskipun terdapat peningkatan capaian di beberapa provinsi, hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah dengan nilai terendah pada dimensi kuantitas penduduk masih didominasi oleh kawasan Indonesia Timur. Provinsi Papua Tengah mencatat nilai terendah secara nasional sebesar 17,2, disusul oleh Papua Selatan (19,3) dan Maluku (23,0). Selain itu, 4 provinsi lainnya juga berada di bawah skor 30, yaitu Papua Pegunungan (25,2), Papua (26,6), Papua Barat Daya (29,5), dan Papua Barat (29,7). Dengan demikian, terdapat 7 provinsi yang masih memiliki capaian di bawah 30. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap isu kuantitas penduduk masih sangat terbatas di beberapa wilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih serius.

Gambar 5.4 Peringkat Capaian Dimensi Kuantitas Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Capaian Dimensi Kuantitas Penduduk pada Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi. Provinsi dengan nilai terendah tercatat di Papua Tengah (17,2), Papua Selatan (19,3), dan Maluku (25,2). Sementara itu, capaian tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (73,1), Jawa Timur (69,2), dan Jawa Tengah (67,0). Secara nasional, rata-rata IKIK untuk dimensi ini berada pada angka 55,7, yang menggambarkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu kuantitas penduduk masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Provinsi-provinsi dengan nilai indeks yang rendah, seperti Papua Tengah dan Papua Selatan, menunjukkan masih terbatasnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam isu pengendalian jumlah penduduk. Kondisi ini tercermin dari rendahnya penggunaan kontrasepsi modern, tingginya angka kelahiran yang tidak terencana, dan lemahnya penerapan program keluarga berencana. Faktor geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta minimnya jumlah tenaga penyuluh turut menjadi kendala utama yang memperlambat peningkatan kepedulian masyarakat di wilayah tersebut.

Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan capaian tinggi seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Keberhasilan ini didukung oleh infrastruktur kesehatan yang lebih memadai, ketersediaan tenaga penyuluh yang aktif, serta pelaksanaan sosialisasi program kependudukan yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya pengendalian jumlah penduduk sebagai bagian dari pembangunan keluarga sejahtera.

Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan capaian tertinggi dalam dimensi kuantitas penduduk. Keberhasilan ini tidak lepas dari integrasi yang baik antara program keluarga berencana dan layanan kesehatan primer. Selain itu, dukungan pendidikan formal dan nonformal turut meningkatkan literasi kependudukan di masyarakat. Tingginya partisipasi warga dalam perencanaan keluarga juga menjadi faktor penting, diperkuat oleh budaya lokal yang terbuka dan adaptif terhadap program pemerintah. Kombinasi berbagai faktor tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai indeks di provinsi ini.

Sebaliknya, beberapa daerah lain masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Papua Selatan, misalnya, mencatat penurunan capaian akibat tingginya angka putus pakai kontrasepsi dan terbatasnya fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan reproduksi belum menjangkau

seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kurangnya akses terhadap edukasi dan pendampingan berkelanjutan turut memperlambat peningkatan kepedulian terhadap isu kependudukan di wilayah tersebut.

Pada Tabel 5.1 menyajikan gambaran dimensi kuantitas pada 2 provinsi yang menunjukkan dinamika paling menonjol, yaitu peningkatan tertinggi dan penurunan tertinggi. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai wilayah dengan peningkatan tertinggi, sedangkan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan penurunan paling signifikan dalam capaian indikator pada dimensi kuantitas. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan peningkatan tertinggi pada dimensi kuantitas, tercermin dari kenaikan signifikan pada indikator WUS berpengetahuan tentang kesehatan reproduksi (WUS) dari 28,6 pada tahun 2024 menjadi 33,6 pada tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada indikator CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*), UKP (*Unmet Need for Family Planning*), dan dimensi kuantitas keluarga berkualitas, yang menggambarkan perbaikan dalam aspek kesejahteraan dan pengetahuan keluarga. Sebaliknya, Provinsi Papua mengalami penurunan terbesar pada dimensi kuantitas. Nilai WUS menurun tajam dari 62,0 pada tahun 2024 menjadi 56,2 pada tahun 2025, disertai penurunan CPR dari 29,6 menjadi 27,2 serta penurunan nilai dimensi kuantitas secara keseluruhan dari 33,6 menjadi 26,5. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan pembangunan kependudukan antarwilayah, khususnya antara kawasan timur dan barat Indonesia. Rendahnya capaian Papua mengindikasikan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi serta rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan program keluarga berencana.

Tabel 5.1 Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Kuantitas

Peningkatan Tertinggi				
Provinsi NTT	CPR	UKP	WUS	Dimensi Kuantitas
2024	40,7	72,4	54	28,6
2025	40,8	72,6	56,4	33,6
Penurunan Tertinggi				
Provinsi Papua	CPR	UKP	AMH	Dimensi Kuantitas
2024	29,6	68,9	62	33,6
2025	27,2	70,4	56,2	26,5

Perbedaan capaian antarprovinsi pada dimensi kuantitas penduduk menunjukkan adanya variasi dalam kualitas layanan, intensitas sosialisasi, serta kesiapan kelembagaan kependudukan di setiap daerah. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Daerah dengan capaian rendah dapat difokuskan pada penguatan layanan KB pascapersalinan dan peningkatan pendampingan bagi keluarga. Sementara itu, praktik baik dari daerah dengan capaian tinggi seperti DI Yogyakarta dan Jawa Timur perlu direplikasi agar hasil yang dicapai dapat merata di seluruh provinsi.

B. Dimensi Kualitas

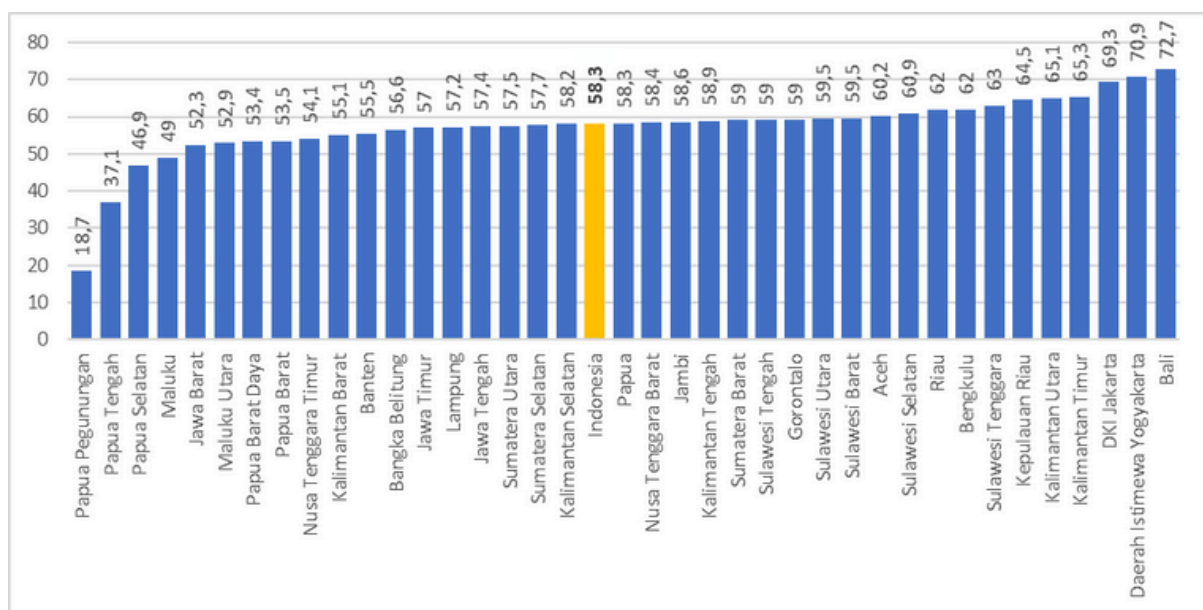
Gambar 5.5 menampilkan capaian Dimensi Kualitas Penduduk di tingkat provinsi tahun 2025. Secara nasional, terdapat 20 provinsi yang mencatat nilai di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga provinsi dengan capaian tertinggi masih sama seperti tahun 2024, menandakan konsistensi kinerja yang baik. Provinsi Bali kembali menempati posisi pertama dengan nilai 72,7, diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 70,9, dan DKI Jakarta dengan capaian 69,3. Ketiganya mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur layanan dasar yang baik, integrasi program kependudukan dalam pembangunan daerah, serta tingkat literasi masyarakat yang relatif tinggi.

Sebaliknya, capaian terendah masih didominasi oleh provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan nilai terendah, yaitu 18,7, dengan selisih yang cukup jauh dibandingkan provinsi lainnya. Papua Tengah menempati posisi kedua terendah dengan nilai 37,1, menunjukkan tantangan besar dalam peningkatan kualitas penduduk. Selain itu, Papua Selatan (46,9) juga termasuk dalam kelompok provinsi dengan capaian terendah. Meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, perbaikannya masih bersifat gradual dan belum cukup signifikan untuk mengubah posisi mereka. Rendahnya nilai di wilayah ini menunjukkan masih terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang merata. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan tenaga penyuluh, serta rendahnya literasi kependudukan turut memperlebar kesenjangan kualitas penduduk dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia.

Provinsi dengan capaian kategori sedang, seperti Maluku (49,0), Jawa Barat (52,3), dan Kalimantan Barat (55,1), menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan kualitas antarwilayah. Di beberapa kabupaten/kota perkotaan, capaian indikator kependudukan relatif tinggi, sedangkan di wilayah pedesaan masih tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya intensitas program penyuluhan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya kemajuan yang positif dalam dimensi kualitas penduduk, terutama di provinsi-provinsi dengan capaian tinggi. Namun, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama. Upaya peningkatan kualitas SDM perlu terus difokuskan pada wilayah dengan capaian rendah agar pemerataan pembangunan manusia dapat tercapai secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Gambar 5.5 Peringkat Capaian Dimensi Kualitas Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Tabel 5.2 menggambarkan dinamika dimensi kualitas di 2 provinsi dengan perubahan paling signifikan, yakni peningkatan tertinggi dan penurunan tertinggi. Provinsi Papua mencatat peningkatan paling besar, dengan nilai dimensi kualitas naik dari 50,7 pada tahun 2024 menjadi 58,2 pada tahun 2025. Kenaikan ini terutama didorong oleh perbaikan pada beberapa indikator utama, seperti meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan dari 88,7 menjadi 90,6 persen, serta lonjakan kepemilikan akta kelahiran dari 60,0 menjadi 68,7 persen. Walaupun rata-rata lama sekolah dan kepemilikan rekening tabungan belum menunjukkan perubahan besar, tren positif ini menandakan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan administrasi kependudukan di Provinsi Papua.

Sebaliknya, Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan paling menonjol pada dimensi kualitas. Nilai IKIK di provinsi ini relatif stagnan, dari 46 pada tahun 2024 menjadi 46,9 pada tahun 2025. Penurunan terutama terjadi pada indikator kepemilikan akta kelahiran yang turun cukup tajam dari 54,3 menjadi 47,3 persen, serta sedikit penurunan pada rata-rata lama sekolah dari 9,0 menjadi 8,9 tahun. Walaupun terdapat sedikit peningkatan pada indikator penolong persalinan dan Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPT), capaian tersebut belum cukup kuat untuk menutupi penurunan di aspek lainnya.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas keluarga di Indonesia masih bersifat tidak merata antarwilayah, dengan Papua memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan dalam pelayanan dasar dan pencatatan sipil, sedangkan Papua Selatan masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, ekonomi, dan identitas hukum keluarga.

Tabel 5.2 Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Kualitas

Peningkatan Tertinggi							
Provinsi Papua	Lama Sekolah	Rekening Tabungan	Perceraian	Penolong Persalinan	Akta Lahir	TPT	Dimensi Kualitas
2024	10,6	59,2	7,5	88,7	60	6,9	50,7
2025	10,7	59,1	1,3	90,6	68,7	6,5	58,2
Penurunan Tertinggi							
Provinsi Papua Selatan	Lama Sekolah	Rekening Tabungan	Perceraian	Penolong Persalinan	Akta Lahir	TPT	Dimensi Kualitas
2024	9	43,8	7,5	81,3	54,3	3,4	46
2025	9	43,9	1,3	83,2	47,3	4	46,9

Secara nasional, capaian Dimensi Kualitas Penduduk IKIK berada di angka 58,3, yang menempatkannya pada kategori sedang. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ada provinsi-provinsi yang sudah unggul, kesenjangan antarwilayah masih menjadi persoalan utama. Untuk mempersempit disparitas, strategi afirmatif perlu diarahkan ke wilayah dengan capaian rendah melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas keluarga berencana, serta pendekatan sosialisasi berbasis komunitas yang sesuai dengan konteks sosial budaya lokal.

C. Dimensi Mobilitas

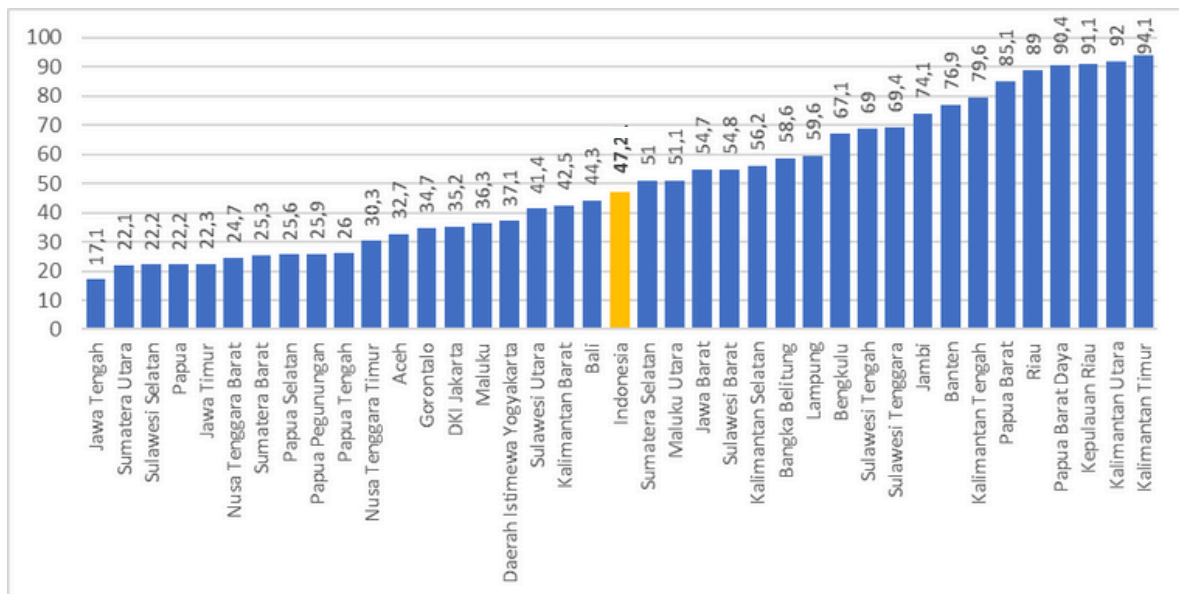
Gambar 5.6 memperlihatkan capaian Dimensi Mobilitas Penduduk di tingkat provinsi tahun 2025. Secara keseluruhan, terdapat 19 provinsi yang memiliki nilai dimensi mobilitas penduduk di atas rata-rata nasional, meningkat dari 18 provinsi pada tahun sebelumnya. Provinsi Kalimantan Timur mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan nilai tertinggi, yakni 94,1, meningkat dari 93,7 pada tahun sebelumnya. Kalimantan Utara tetap berada di peringkat kedua dengan nilai 92,0, diikuti oleh Kepulauan Riau di posisi ketiga dengan 91,1 (turun sedikit dari 91,9 pada tahun 2024). Sementara itu, Papua Barat Daya naik ke peringkat keempat dengan capaian 90,4, melampaui Provinsi Riau, yang sebelumnya berada di peringkat keempat namun kini turun ke posisi kelima dengan nilai 89,0. Nilai tinggi pada provinsi-provinsi tersebut umumnya mencerminkan tingkat migrasi masuk yang signifikan, baik karena faktor ekonomi seperti pertambangan dan industri, maupun karena peran wilayah-wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi provinsi dengan nilai terendah dalam dimensi mobilitas penduduk, yakni 17,1, sedikit turun dari tahun sebelumnya (16,5). Posisi ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di provinsi ini merupakan penduduk asli setempat dan angka migrasi masuk sangat rendah. Jawa Timur, yang tahun lalu berada di posisi kedua terbawah, kini naik satu peringkat, meskipun masih termasuk lima provinsi dengan nilai terendah, dengan capaian 22,3. Provinsi-provinsi lain yang juga mencatat nilai mobilitas penduduk yang rendah pada tahun 2025 adalah Sumatera Utara (22,1), Sulawesi Selatan (22,2), dan Papua (22,2). Kondisi ini menunjukkan adanya pola migrasi keluar yang lebih tinggi dibanding migrasi masuk, serta keterbatasan daya tarik wilayah-wilayah tersebut sebagai tujuan perpindahan penduduk.

Dimensi ini menampilkan adanya disparitas antar provinsi yang masih cukup besar. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih tepat dalam mendorong pemerataan pembangunan dan distribusi penduduk. Selain tantangan dalam pemerataan ekonomi dan infrastruktur, persepsi negatif terhadap penduduk migran yang masih sering dipolitisasi juga

menjadi hambatan tersendiri. Padahal, dari sudut pandang pembangunan, mobilitas penduduk merupakan salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, mobilitas perlu dikelola secara bijak melalui kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan mendukung integrasi sosial.

Gambar 5.6 Peringkat Capaian Dimensi Mobilitas Penduduk di Tingkat Provinsi Tahun 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Tabel 5.3 menyajikan gambaran dimensi mobilitas pada 2 provinsi yang menunjukkan dinamika paling menonjol, yaitu peningkatan tertinggi dan penurunan tertinggi. Berdasarkan hasil analisis dimensi migrasi dalam Indeks Kualitas Keluarga Indonesia (IKIK), terlihat adanya perbedaan tren antarprovinsi yang cukup signifikan. Provinsi DKI Jakarta mencatat peningkatan tertinggi pada dimensi ini, dengan nilai IKIK dimensi mobilitas meningkat dari 30,3 pada tahun 2024 menjadi 35,2 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dinamika mobilitas penduduk yang relatif tinggi di wilayah perkotaan, termasuk meningkatnya proporsi penduduk non-migran (dari 57,98 menjadi 58,5) yang menunjukkan stabilitas hunian, serta perbaikan pada kelompok out-migran yang mengalami penurunan moderat dari 36,3 menjadi 35,0, menandakan keseimbangan mobilitas keluar dan kemampuan adaptasi sosial-ekonomi di ibu kota.

Sebaliknya, Provinsi Bengkulu mengalami penurunan tertinggi pada dimensi migrasi. Nilai dimensi mobilitas di provinsi ini turun dari 70,5 pada tahun 2024 menjadi 67,06 pada tahun 2025. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada kategori non-migran (dari 76,00 menjadi 77,89) dan out-migran (dari 6,9 menjadi 7,5), penurunan pada dimensi mobilitas secara keseluruhan menunjukkan adanya keterbatasan dalam dinamika perpindahan penduduk

yang produktif. Hal ini dapat mengindikasikan berkurangnya kesempatan ekonomi atau keterbatasan akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Secara umum, tren ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk sebagai bagian dari kualitas keluarga masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah. Daerah perkotaan seperti DKI Jakarta menunjukkan kemampuan adaptif yang lebih baik terhadap dinamika migrasi, sementara wilayah seperti Bengkulu masih memerlukan penguatan kebijakan pemerataan kesempatan ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah.

Tabel 5.3 Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Mobilitas

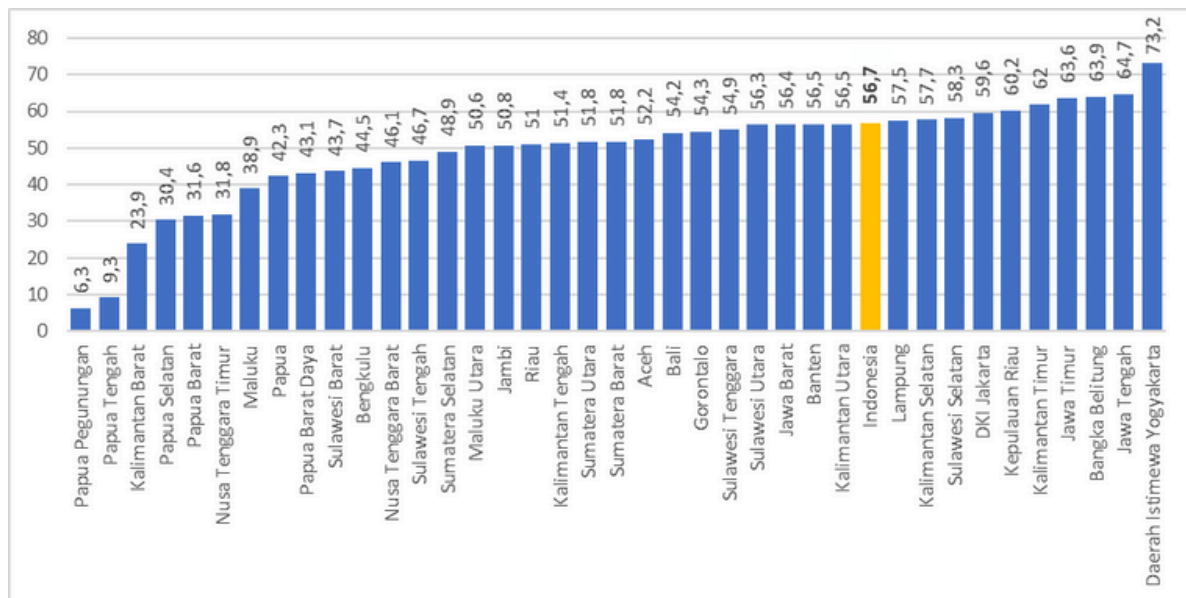
Peningkatan Tertinggi			
Provinsi DKI Jakarta	Non Migran	Out Migran	Dimensi Mobilitas
2024	57,98	36,3	30,3
2025	58,5	35	35,2
Penurunan Tertinggi			
Provinsi Bengkulu	Non Migran	Out Migran	Dimensi Mobilitas
2024	7.600	69	70,5
2025	77,89	7,5	67,06

D. Dimensi Lingkungan

Pada Gambar 5.7 ditampilkan capaian Dimensi Lingkungan di tingkat provinsi berdasarkan data tahun 2025. Secara keseluruhan, terdapat 10 provinsi yang mencatat capaian dimensi lingkungan di atas nilai rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan masih menjadi tantangan utama bagi sebagian besar provinsi di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan nilai tertinggi, dengan capaian sebesar 73,2, meningkat dari tahun sebelumnya (70,1). Sementara itu, Jawa Tengah mencatat nilai 64,7 dan menempati peringkat ketiga, sedikit menurun dari posisi kedua tahun 2024 (65,4). Kalimantan Timur yang sebelumnya berada di posisi ketiga kini turun ke peringkat keempat dengan capaian 62,0. Di sisi lain, beberapa provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti Provinsi Kepulauan Riau yang naik dari peringkat kesembilan dengan nilai 57 menjadi posisi keenam dengan capaian 60,2.

Capaian terendah kembali ditempati oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai hanya 6,3, menurun dari tahun 2024 (8,4), menjadikannya provinsi dengan kondisi lingkungan paling rentan. Papua Tengah juga tetap berada di peringkat kedua terbawah dengan nilai 9,3, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (17,4). Kedua provinsi ini, bersama dengan beberapa provinsi lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat, menghadapi tantangan serius dalam penyediaan air bersih.

Gambar 5.7 Peringkat Capaian Dimensi Lingkungan di Tingkat Provinsi Tahun 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Capaian menengah terlihat pada provinsi seperti Kalimantan Tengah (52,8), Jambi (51,8), dan Sumatera Utara (51,4), yang menunjukkan adanya kepedulian sedang namun masih memerlukan penguatan kebijakan dan advokasi. Provinsi-provinsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan capaian melalui optimalisasi program berbasis komunitas, penguatan kapasitas kader penyuluh, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dalam penyediaan infrastruktur lingkungan dasar.

Tabel 5.4 menggambarkan dimensi lingkungan pada 2 provinsi yang mencatat peningkatan tertinggi dan penurunan tertinggi. Berdasarkan hasil analisis dimensi lingkungan dalam Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK), terlihat adanya perbedaan capaian yang cukup mencolok antarprovinsi. Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan tertinggi, dengan nilai dimensi lingkungan naik dari 52,9 pada tahun 2024 menjadi 57,7 pada tahun 2025. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan pada indikator luas lantai per kapita, yang naik dari 22,9 menjadi 25,4, serta ketersediaan air bersih yang meningkat dari 84,0 menjadi 85,4. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan dan akses

masyarakat terhadap fasilitas dasar yang menunjang kualitas hidup keluarga.

Sebaliknya, Provinsi Papua Tengah mengalami penurunan terbesar pada dimensi lingkungan, di mana nilai IKIK-nya turun drastis dari 17,4 pada tahun 2024 menjadi 9,31 pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya akses air bersih, dari 38,85 menjadi 30,04, serta penurunan luas lantai per kapita dari 14,85 menjadi 12,55. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut, yang berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan keluarga, terutama dalam hal kesehatan, kebersihan, dan kelayakan tempat tinggal.

Secara keseluruhan, tren dimensi lingkungan dalam IKIK menggambarkan adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur dan sumber daya lingkungan antarwilayah. Daerah dengan akses lebih baik terhadap air bersih dan pengelolaan lahan, seperti Kalimantan Selatan, menunjukkan peningkatan kualitas hidup keluarga, sementara wilayah timur seperti Papua Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 5.4 Provinsi dengan Peningkatan dan Penurunan Tertinggi Dimensi Lingkungan

Peningkatan Tertinggi			
Provinsi Kalsel	Luas Lantai	Air Bersih	Dimensi Lingkungan
2024	22,9	84	52,9
2025	25,4	85,4	57,7
Penurunan Tertinggi			
Provinsi Papua Tengah	Luas Lantai	Air Bersih	Dimensi Lingkungan
2024	14,8	38,8	17,4
2025	12,5	30	9,3

Rata-rata nasional capaian Dimensi Lingkungan IKIK berada di kisaran 56,7, menandakan bahwa secara umum tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan keluarga masih pada level sedang. Disparitas antarprovinsi ini mengindikasikan perlunya strategi afirmatif yang lebih difokuskan pada daerah tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas lingkungan hidup keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan kependudukan berkelanjutan.

5.2 Hasil Capaian IKIK di Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil perhitungan IKIK Tahun 2025, diketahui bahwa hanya terdapat 1 kabupaten/kota atau sebesar 0,002 persen yang memiliki nilai IKIK dengan kategori sangat tinggi ($IKIK \geq 75$). Selanjutnya terdapat 89 kabupaten/kota atau sebesar 17,3 persen yang memiliki nilai IKIK dengan kategori tinggi ($58 \leq IKIK < 75$), kemudian terdapat 129 kabupaten/kota atau sebesar 25,1 persen dengan nilai IKIK yang termasuk kategori sedang ($49 \leq IKIK < 58$). Kabupaten/Kota yang berada pada kategori ini sangat berpotensi untuk melakukan peningkatan dan mengejar nilai rata-rata nasional. Sisanya sebanyak 295 kabupaten/kota atau sebesar 57,4 persen termasuk ke dalam kategori dengan nilai IKIK rendah ($IKIK < 49$) yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kepedulian dan kualitas program kependudukan.

Tabel 5.5 menyajikan nilai Indeks Kependudukan untuk Indonesia yang Kompetitif (IKIK) terendah dan tertinggi di setiap provinsi, yang memberikan gambaran ringkas mengenai disparitas capaian antar kabupaten/kota. Sementara hasil lengkapnya dapat dilihat dalam tabel lampiran, ringkasan ini memudahkan identifikasi ketimpangan capaian di dalam masing-masing provinsi.

Hasil capaian IKIK tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian yang besar antarwilayah. Secara nasional, kabupaten/kota dengan nilai IKIK tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan nilai 75,3, menggantikan posisi Kabupaten Sleman dari tahun sebelumnya. Sleman sendiri tetap menunjukkan capaian tinggi dengan nilai 74,6. Sementara capaian terendah secara nasional tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dengan nilai hanya 13,3, menggambarkan tantangan besar dalam pembangunan kependudukan yang kompetitif di wilayah tersebut.

Sebagaimana terlihat di Gambar 5.8, kesenjangan capaian antar kabupaten/kota masih sangat mencolok di beberapa provinsi. Provinsi Bali mencatat deviasi tertinggi antara Kabupaten Karangasem (27,6) dan Kabupaten Badung (75,3), dengan selisih sebesar 47,7 poin. Disusul Provinsi Papua Tengah, yang memiliki selisih capaian sebesar 38,8 poin antara Kabupaten Intan Jaya (13,3) dan Kabupaten Nabire (52,1). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya ketimpangan signifikan dalam aspek-aspek yang diukur dalam IKIK. Beberapa provinsi lain juga menunjukkan kesenjangan internal yang besar. Misalnya, di Provinsi Jawa Timur, capaian terendah tercatat di Kabupaten Bangkalan (30,4), sedangkan tertinggi di Kabupaten Sidoarjo (72,9). Di Jawa Barat, Kabupaten Garut menjadi wilayah dengan nilai terendah (30,5), sedangkan Kota Depok mencatat nilai tertinggi (70,7). Perbedaan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan pembangunan yang lebih merata.

Sementara itu, beberapa provinsi menunjukkan rentang capaian yang relatif lebih sempit, seperti Provinsi Kalimantan Timur, dengan Mahakam Ulu (47,1) sebagai yang terendah dan Kota Samarinda (71,2) sebagai yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan kondisi yang lebih seimbang dalam pembangunan antar kabupaten/kota di wilayah tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan kependudukan dan kepedulian terhadap isu kependudukan masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan. Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjembatani ketimpangan ini, melalui penguatan infrastruktur dasar dan akses terhadap layanan publik di wilayah-wilayah dengan capaian IKIK yang masih rendah.

Tabel 5.5 Nilai IKIK Kabupaten/kota Paling Rendah dan Paling Tinggi menurut Provinsi Tahun 2025

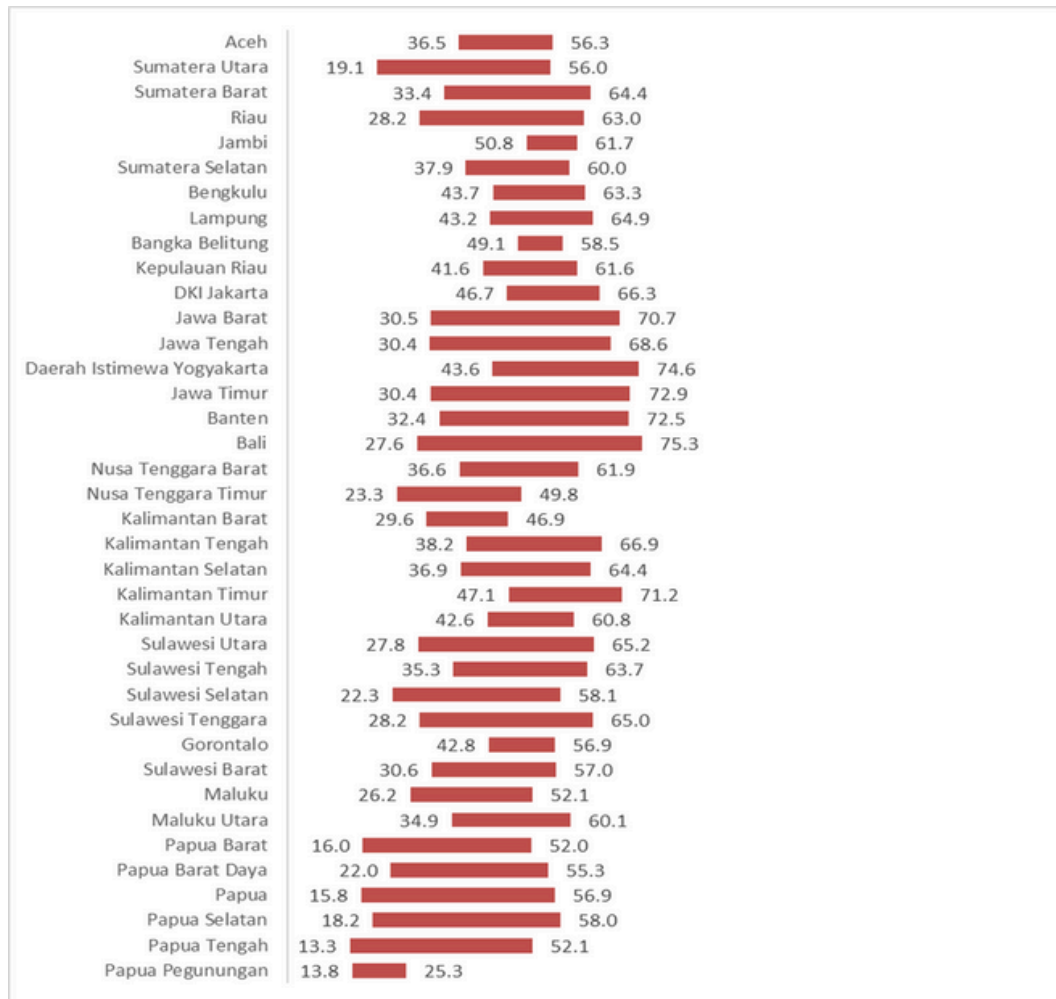
Provinsi	Nilai IKIK Kabupaten/Kota			
	Paling Rendah		Paling Tinggi	
Aceh	Aceh Utara	36,5	Nagan Raya	56,3
Sumatera Utara	Nias Selatan	19,1	Deli Serdang	56
Sumatera Barat	Padang Pariaman	33,4	Dharmasraya	64,4
Riau	Kepulauan Meranti	28,2	Pelalawan	63
Jambi	Tanjung Jabung Barat	50,8	Kota Sungai Penuh	61,7

Provinsi	Nilai IKIK Kabupaten/Kota			
	Paling Rendah		Paling Tinggi	
Sumatera Selatan	Empat Lawang	37,9	Kota Prabumulih	60
Bengkulu	Lebong	43,7	Bengkulu Utara	63,3
Lampung	Lampung Barat	43,2	Tulang Bawang Barat	64,9
Bangka Belitung	Bangka Barat	49,1	Belitung	58,5
Kepulauan Riau	Lingga	41,6	Bintan	61,6
DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	46,7	Kota Jakarta Utara	66,3
Jawa Barat	Garut	30,5	Kota Depok	70,7
Jawa Tengah	Wonosobo	30,4	Kota Semarang	68,6
Daerah Istimewa Yogyakarta	Gunung Kidul	43,6	Sleman	74,6
Jawa Timur	Bangkalan	30,4	Sidoarjo	72,9
Banten	Lebak	32,4	Kota Tangerang Selatan	72,5
Bali	Karangasem	27,6	Badung	75,3
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	36,6	Kota Mataram	61,9
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	23,3	Kota Kupang	49,8
Kalimantan Barat	Sambas	29,6	Kota Pontianak	46,9
Kalimantan Tengah	Murung Raya	38,2	Kota Palangka Raya	66,9
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	36,9	Kota Banjar Baru	64,4

Provinsi	Nilai IKIK Kabupaten/Kota			
	Paling Rendah		Paling Tinggi	
Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	47,1	Kota Samarinda	71,2
Kalimantan Utara	Malinau	42,6	Tana Tidung	60,8
Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	27,8	Minahasa Utara	65,2
Sulawesi Tengah	Donggala	35,3	Banggai	63,7
Sulawesi Selatan	Tana Toraja	22,3	Luwu Utara	58,1
Sulawesi Tenggara	Muna	28,2	Kolaka Timur	65
Gorontalo	Gorontalo	42,8	Pohuwato	56,9
Sulawesi Barat	Majene	30,6	Mamuju Tengah	57
Maluku	Maluku Tenggara	26,2	Buru	52,1
Maluku Utara	Kepulauan Sula	34,9	Kota Ternate	60,1
Papua Barat	Pegunungan Arfak	16	Manokwari	52
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	22	Kota Sorong	55,3
Papua	Mamberamo Raya	15,8	Kota Jayapura	56,9
Papua Selatan	Mappi	18,2	Merauke	58
Papua Tengah	Intan Jaya	13,3	Nabire	52,1
Papua Pegunungan	Yahukimo	13,8	Jayawijaya	25,3

Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Gambar 5.8 Kesenjangan Capaian IKIK Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2025



Sumber: Hasil Perhitungan IKIK Tahun 2025

Data Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antarprovinsi di Indonesia. Provinsi dengan capaian IKIK tinggi umumnya berada di Pulau Jawa dan Bali, seperti Bali (27,6–75,3), DI Yogyakarta (43,6–74,6), Banten (32,4–72,5), Jawa Timur (30,4–72,9), Jawa Barat (30,5–70,7), dan Jawa Tengah (30,4–68,6). Wilayah ini memiliki dukungan infrastruktur yang kuat, akses pendidikan dan kesehatan yang relatif merata, serta kelembagaan kependudukan yang mapan. Tingginya nilai IKIK di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa isu kependudukan telah cukup terinternalisasi dalam perencanaan pembangunan, meskipun masih diperlukan inovasi komunikasi publik untuk menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Provinsi dengan capaian menengah tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara. Misalnya, Sumatera Barat (33,4–64,4), Kalimantan Tengah (38,2–66,9), Kalimantan Selatan (36,9–64,4), Sulawesi Tengah (35,3–63,7), Maluku Utara (34,9–60,1), dan Nusa Tenggara Barat (36,6–61,9). Capaian ini mengindikasikan adanya kesadaran kependudukan yang sudah tumbuh, namun masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Faktor penghambat yang muncul antara lain disparitas antarwilayah dalam satu provinsi, rendahnya literasi kependudukan di daerah pedesaan, serta keterbatasan sinergi lintas sektor dalam program kependudukan.

Sebaliknya, wilayah Indonesia bagian timur masih menghadapi tantangan serius. Provinsi dengan capaian IKIK rendah terutama berada di kawasan Papua, Maluku, dan sebagian Sulawesi, seperti Papua Pegunungan (13,8–25,3), Papua Tengah (13,3–52,1), Papua (15,8–56,9), Papua Selatan (18,2–58,0), Papua Barat (16,0–52,0), Maluku (26,2–52,1), dan Sulawesi Barat (30,6–57,0). Rendahnya capaian IKIK di wilayah ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dasar, isolasi geografis, ketidakmerataan layanan keluarga berencana, serta masih minimnya literasi kependudukan. Kondisi ini memerlukan strategi afirmatif, seperti peningkatan kapasitas penyuluh KB, pemanfaatan media lokal berbasis budaya, serta pendampingan teknis berkelanjutan dari pemerintah pusat dan provinsi.

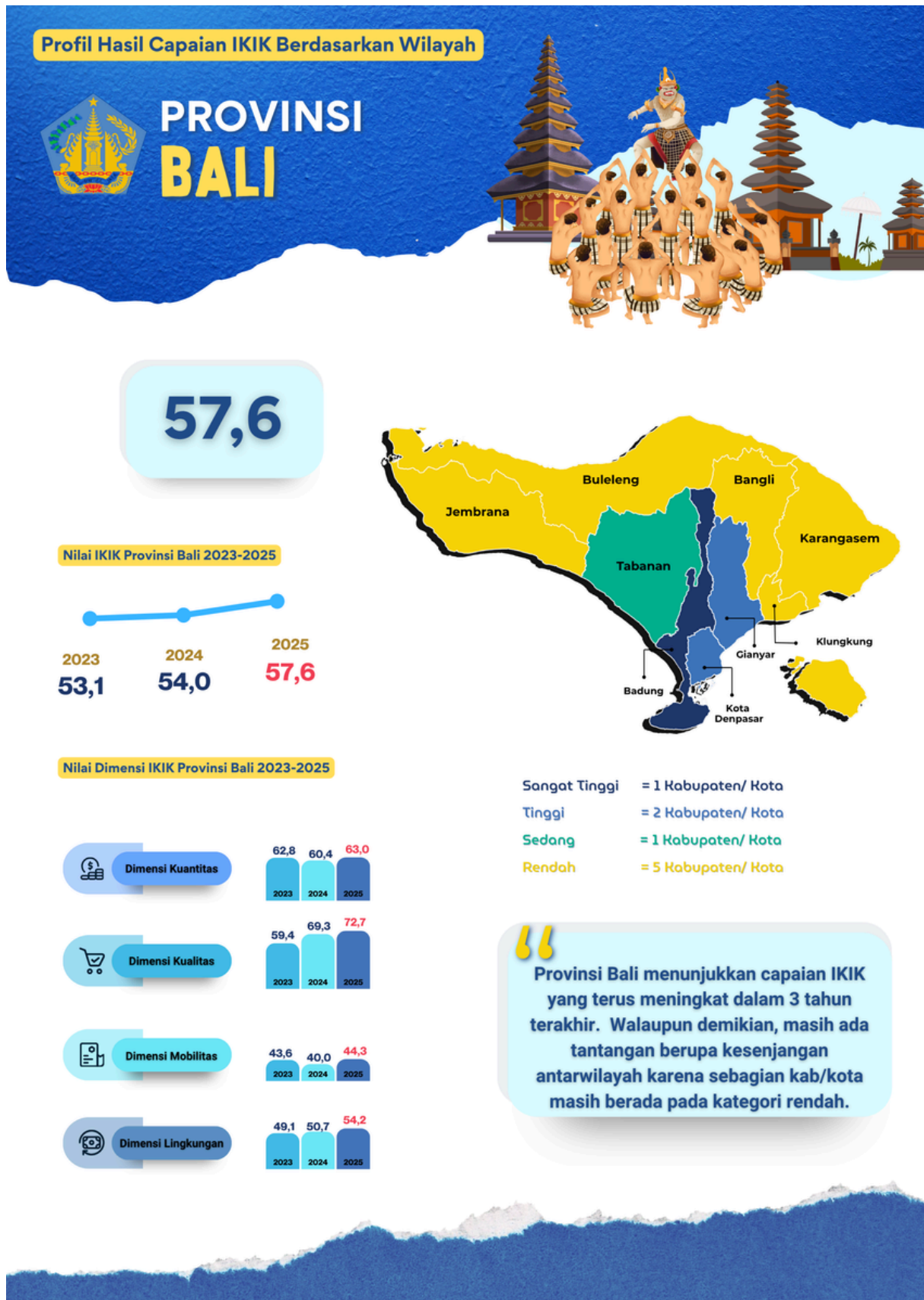
Dengan demikian, pola disparitas IKIK di Indonesia memperlihatkan konsentrasi capaian tinggi di Jawa dan sebagian Kalimantan, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi afirmatif berbasis wilayah, penguatan literasi kependudukan melalui pendidikan formal dan nonformal, serta pengembangan model intervensi berbasis komunitas untuk mempersempit kesenjangan IKIK antarprovinsi.

5.3 Profil Hasil Capaian IKIK Berdasarkan Wilayah

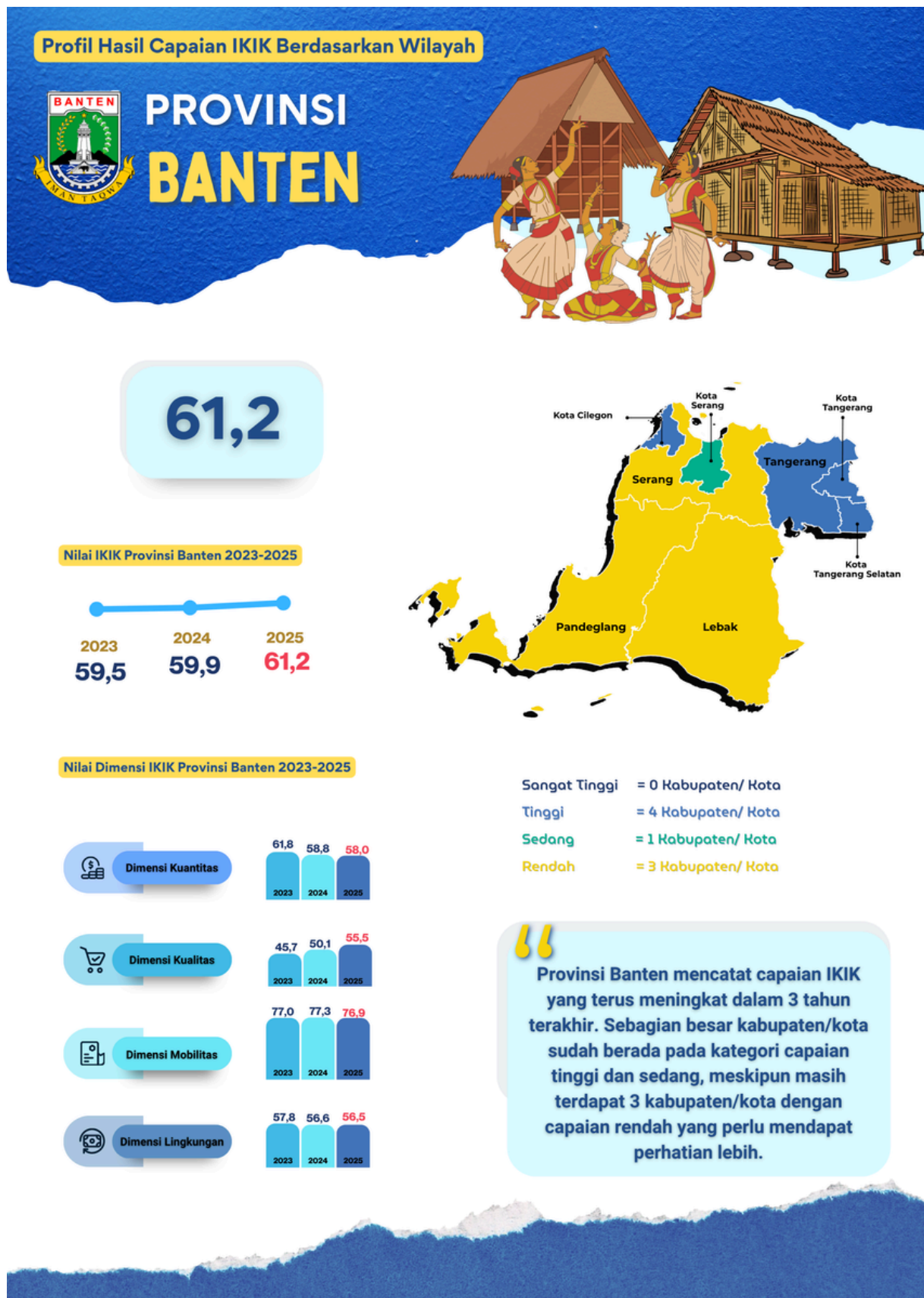
Gambar 5.9 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Aceh



Gambar 5.10 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Bali



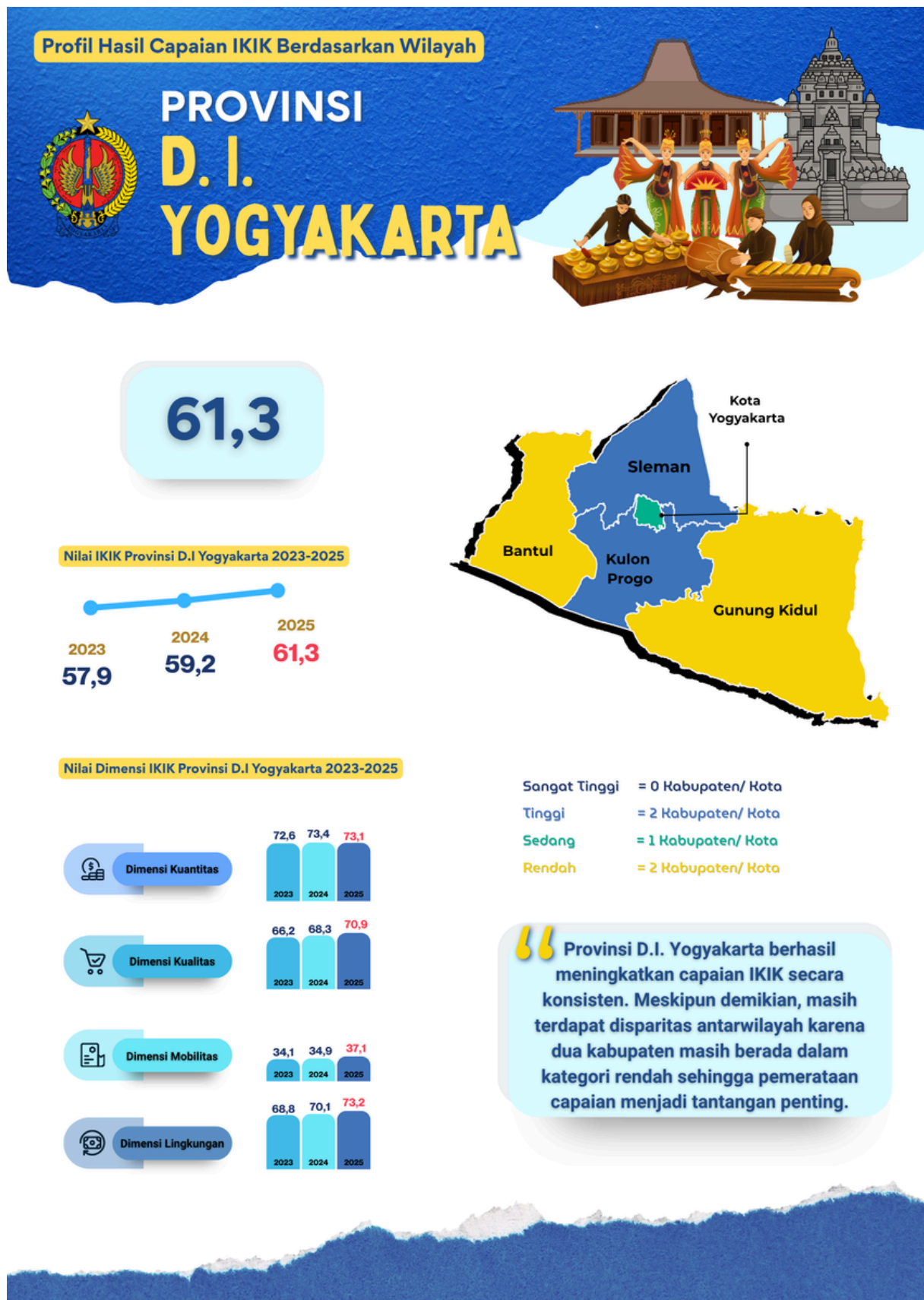
Gambar 5.11 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Banten



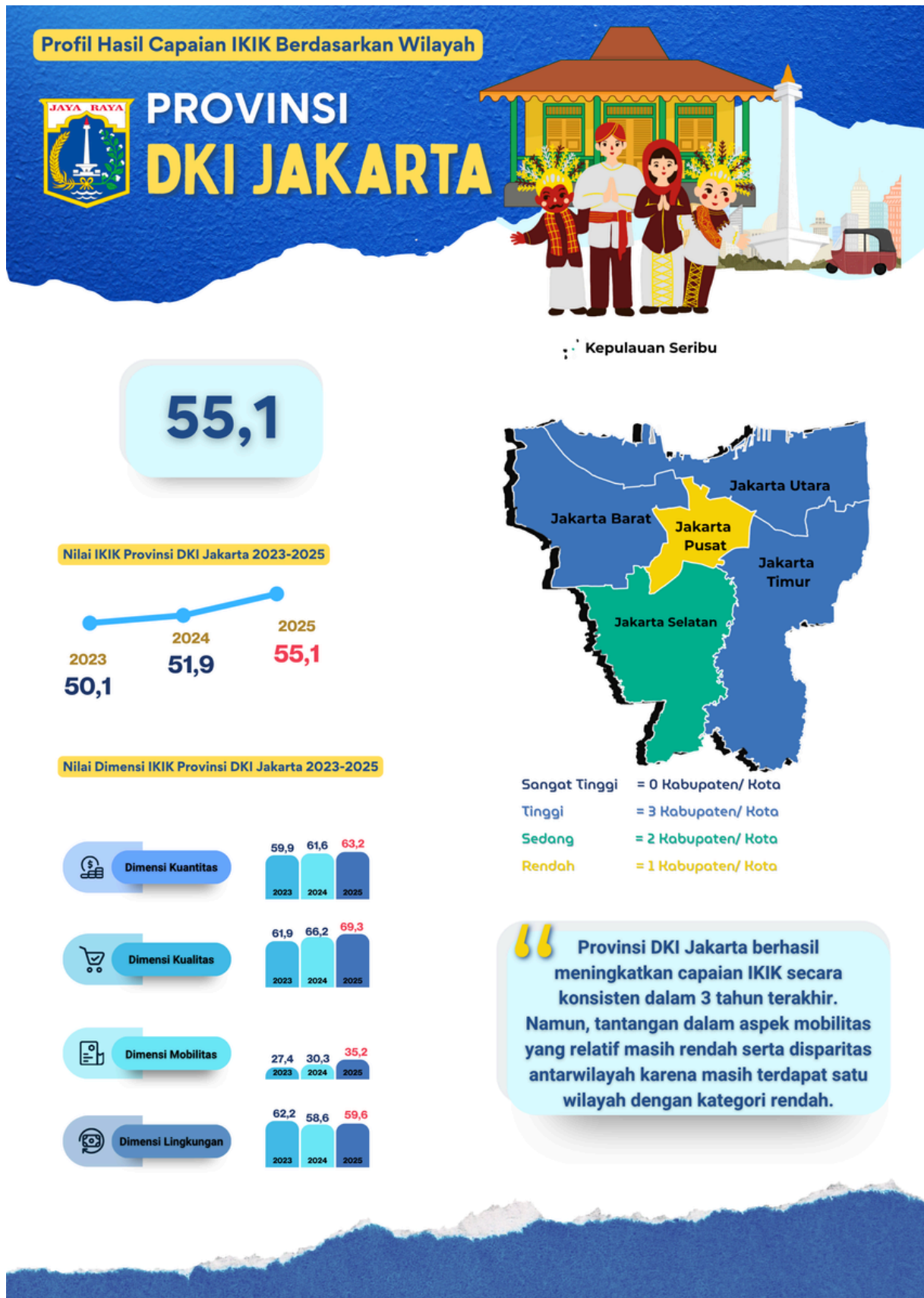
Gambar 5.12 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Bengkulu



Gambar 5.13 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi D. I. Yogyakarta



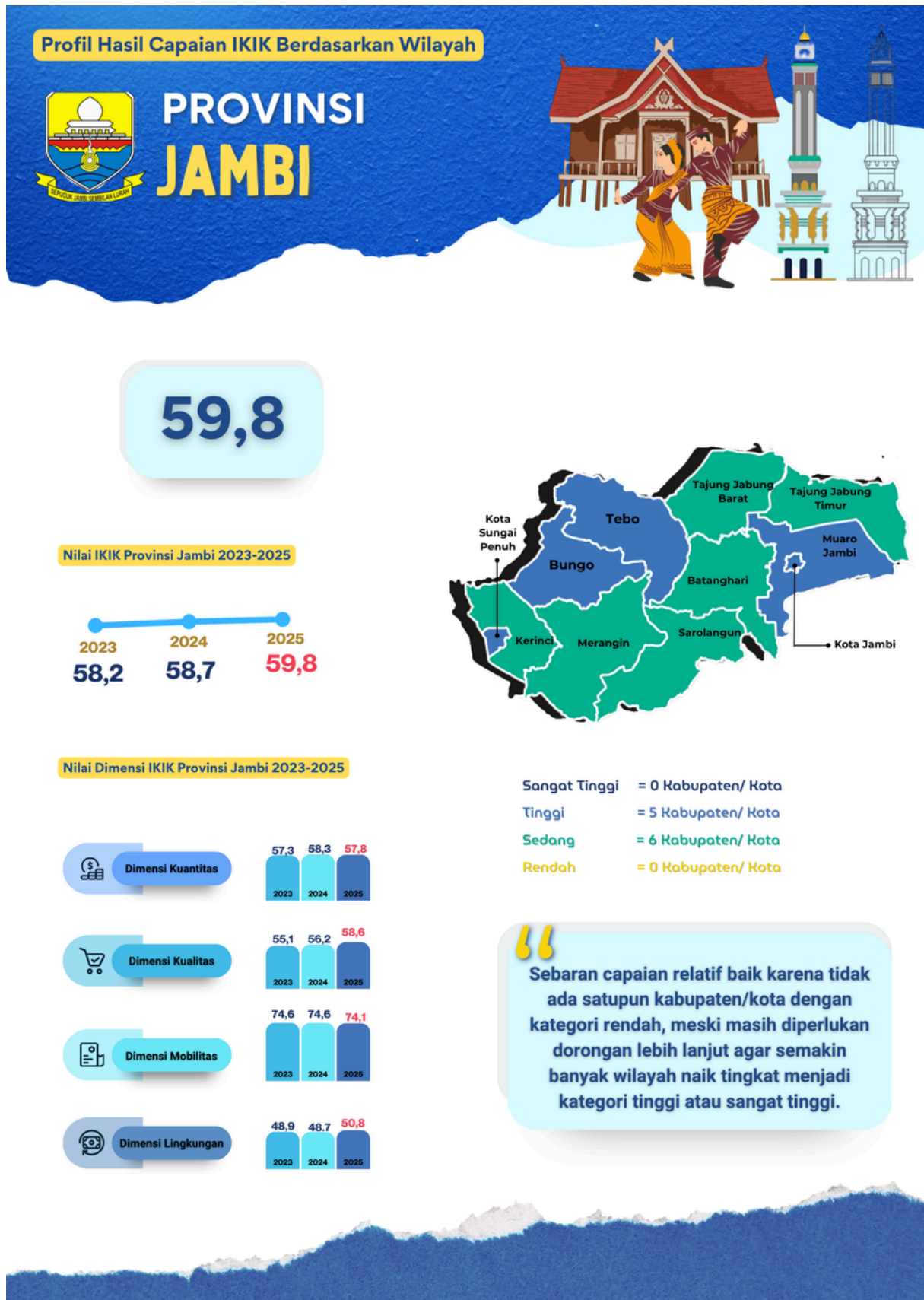
Gambar 5.14 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi DKI Jakarta



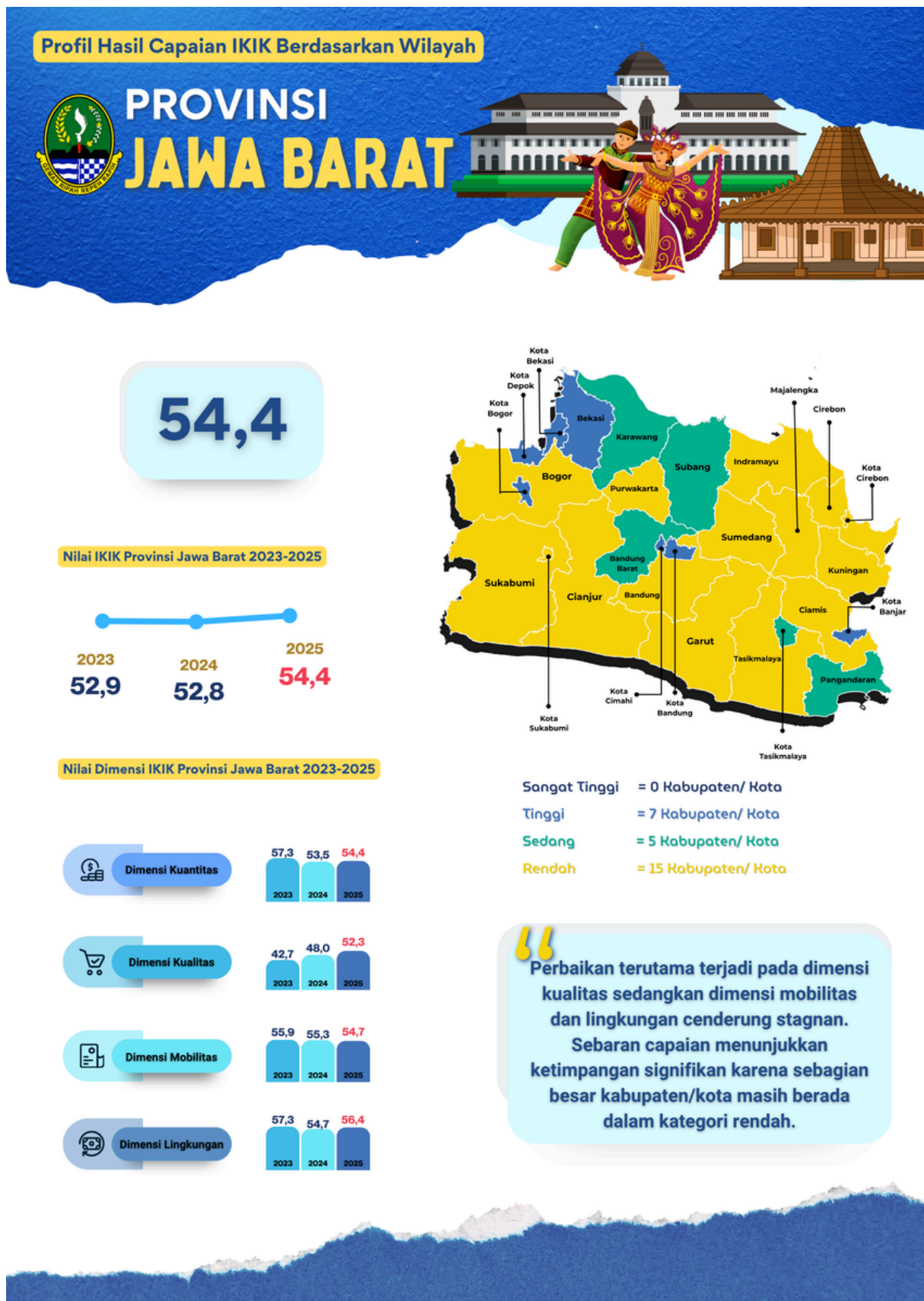
Gambar 5.15 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Gorontalo



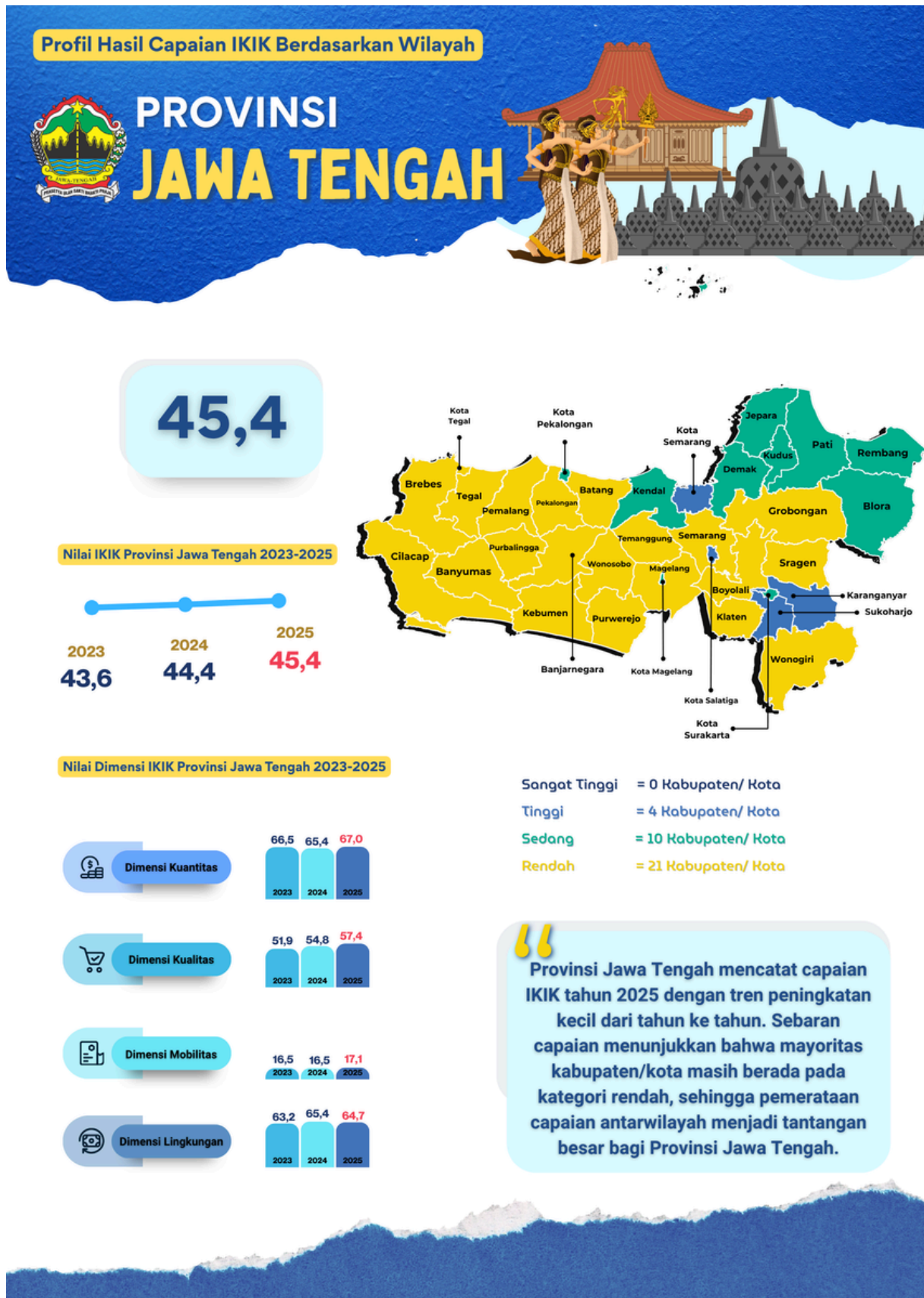
Gambar 5.16 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jambi



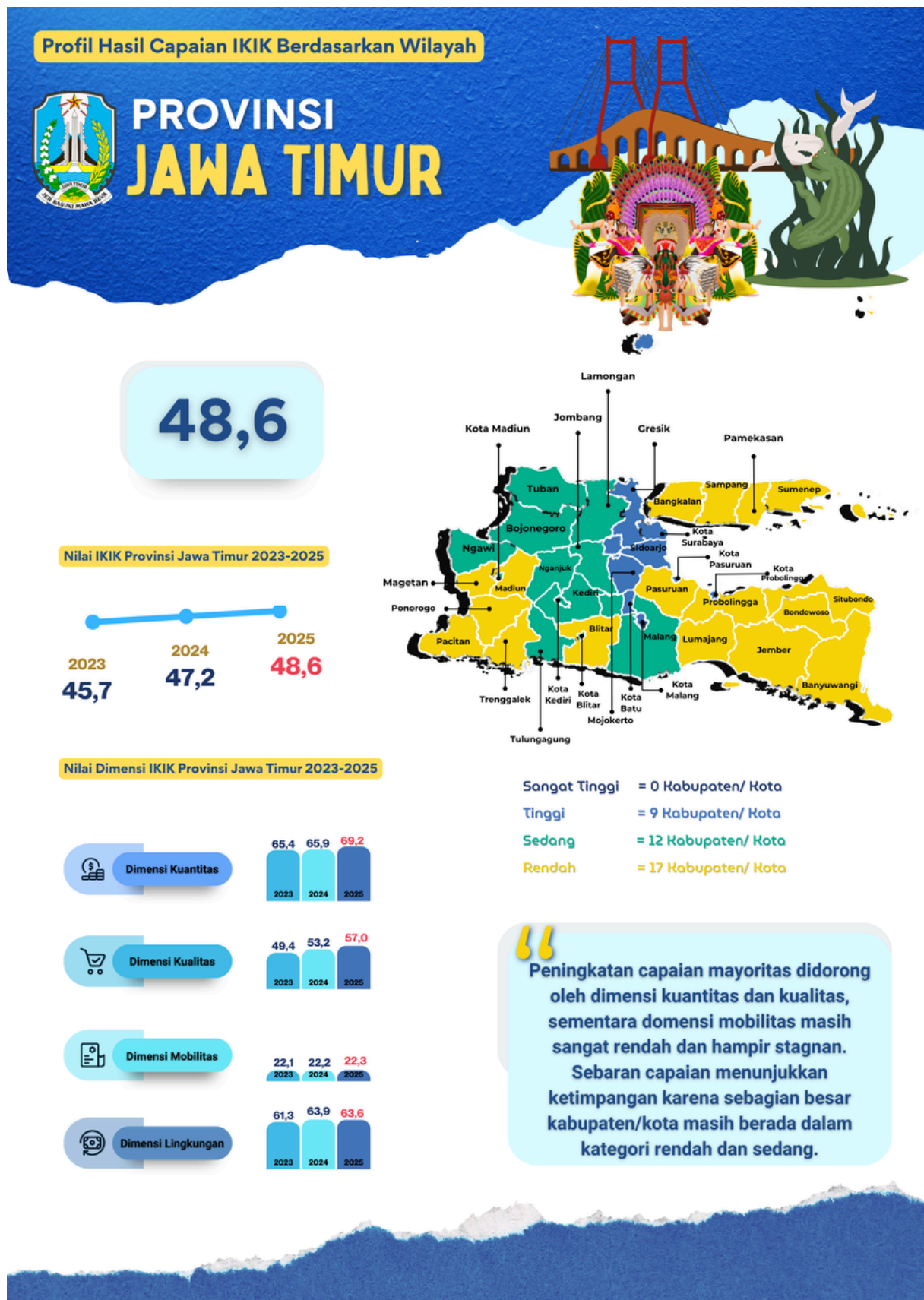
Gambar 5.17 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jawa Barat



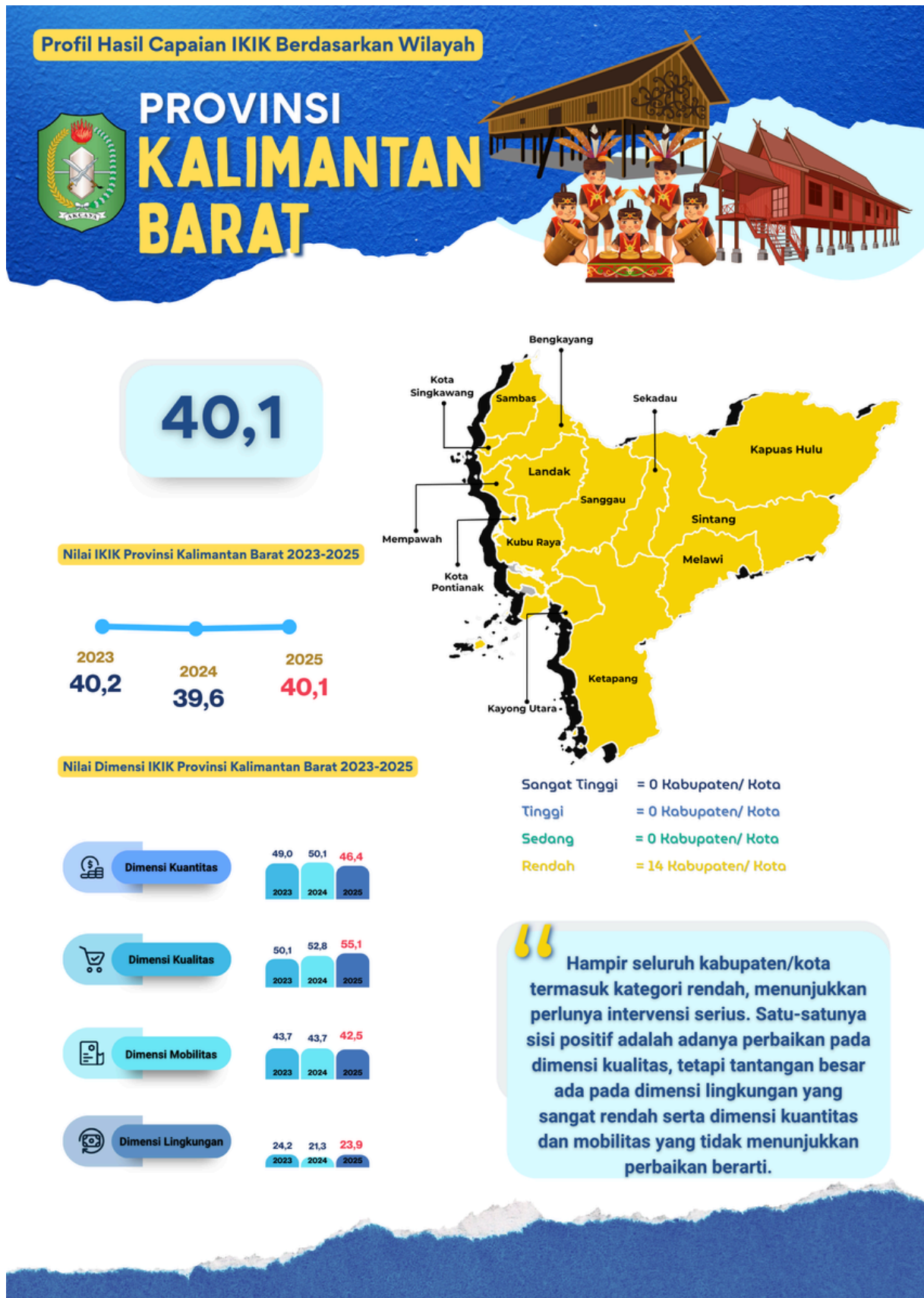
Gambar 5.18 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jawa Tengah

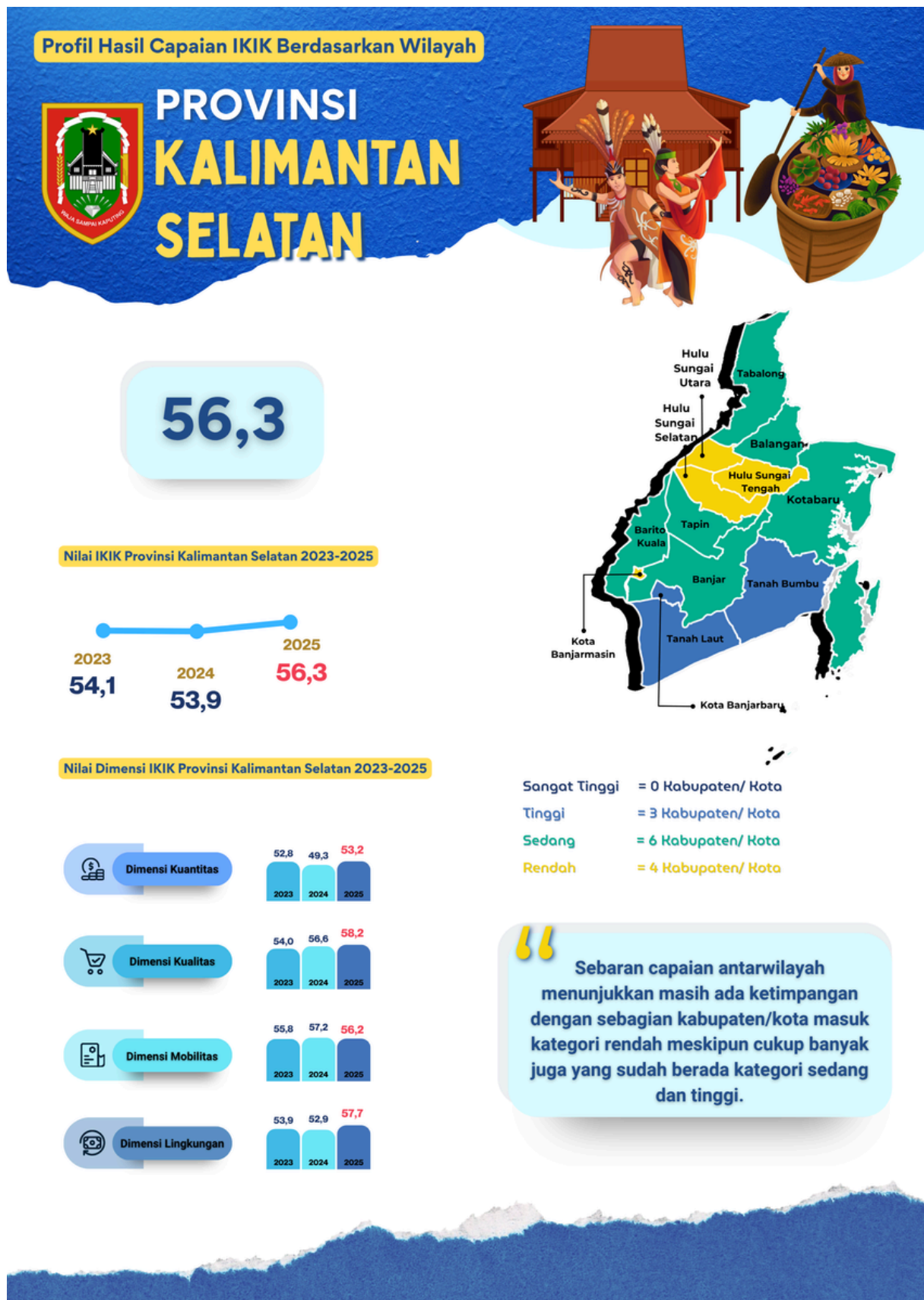


Gambar 5.19 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Jawa Timur

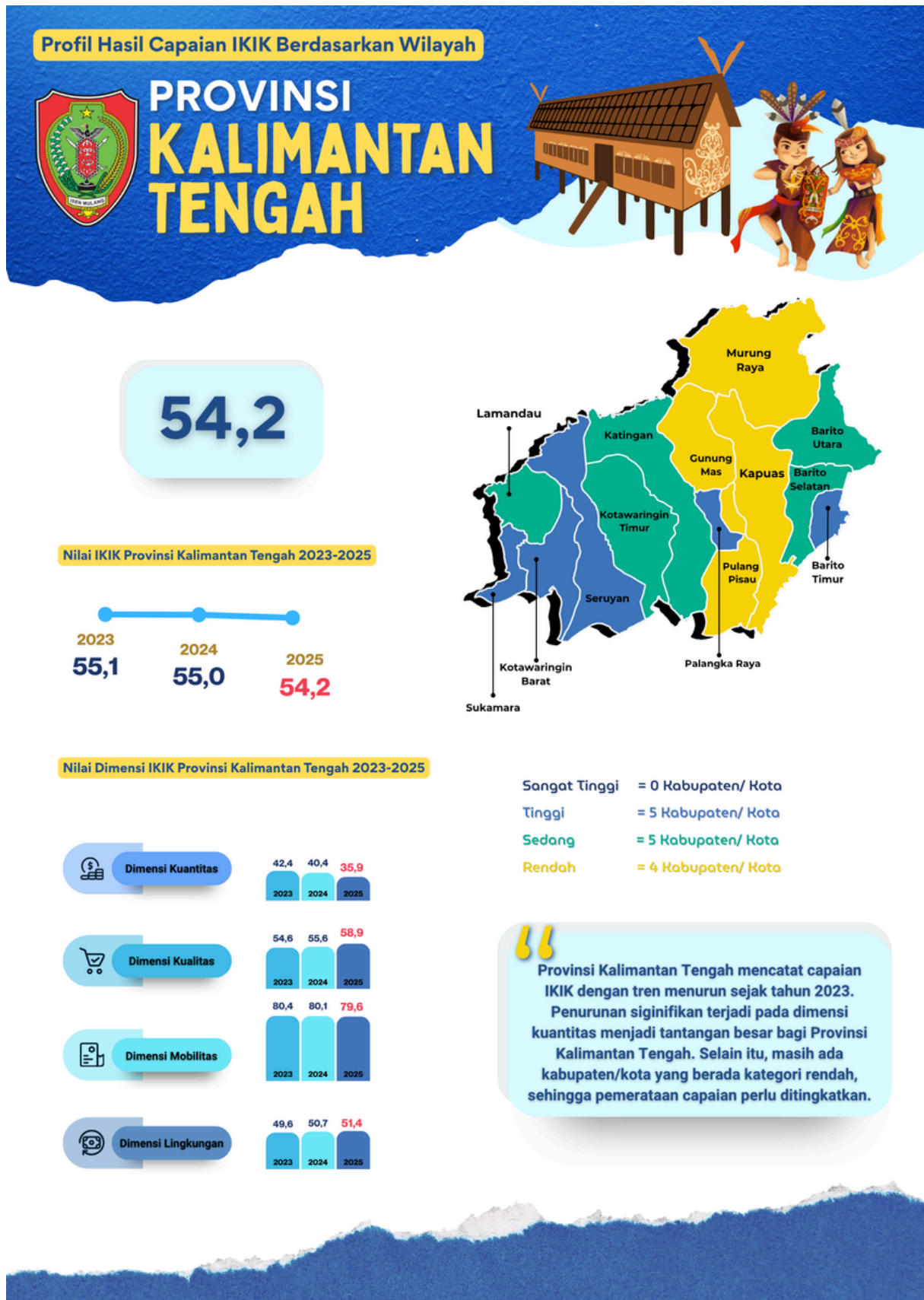


Gambar 5.20 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Barat

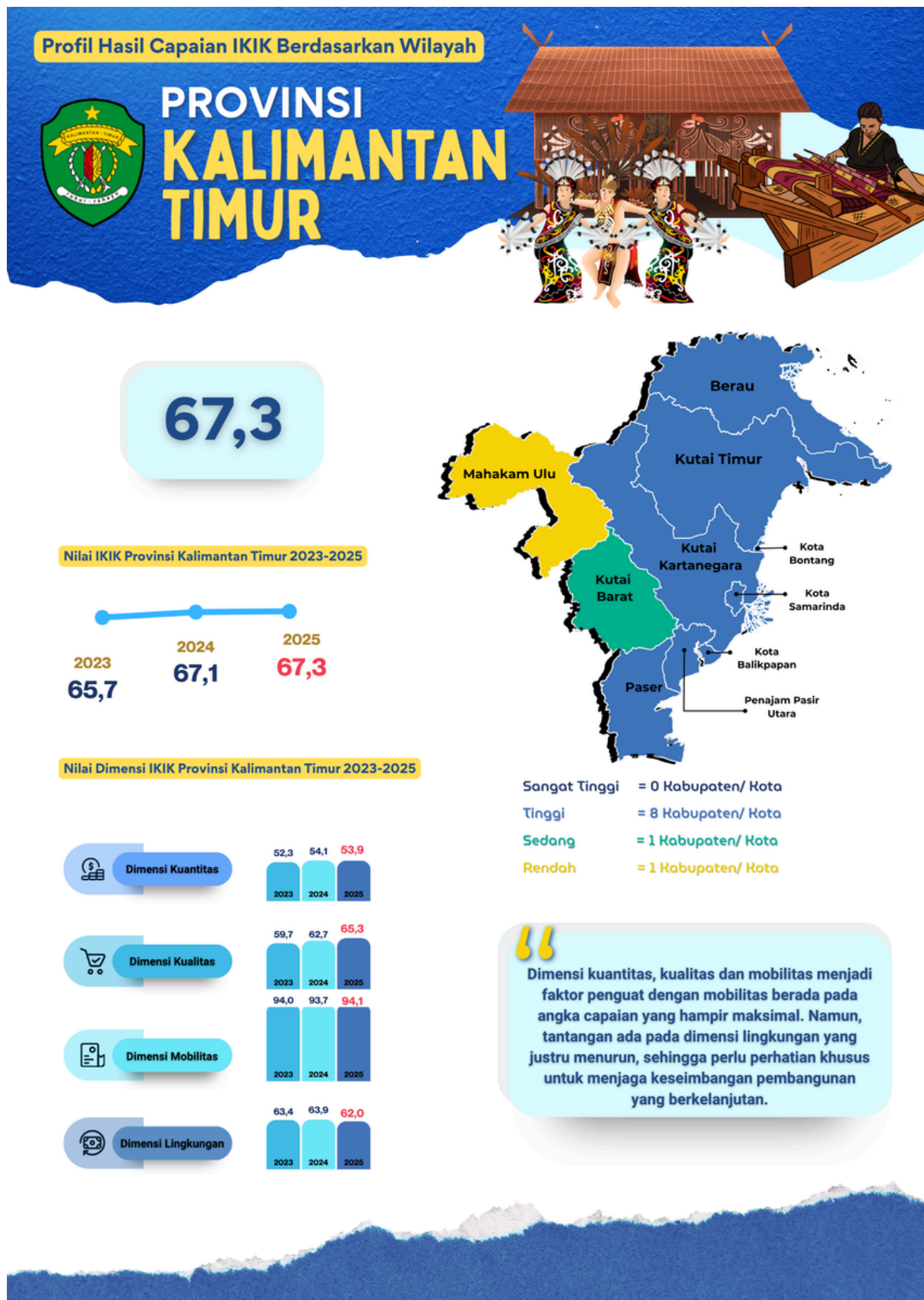


Gambar 5.21 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Selatan

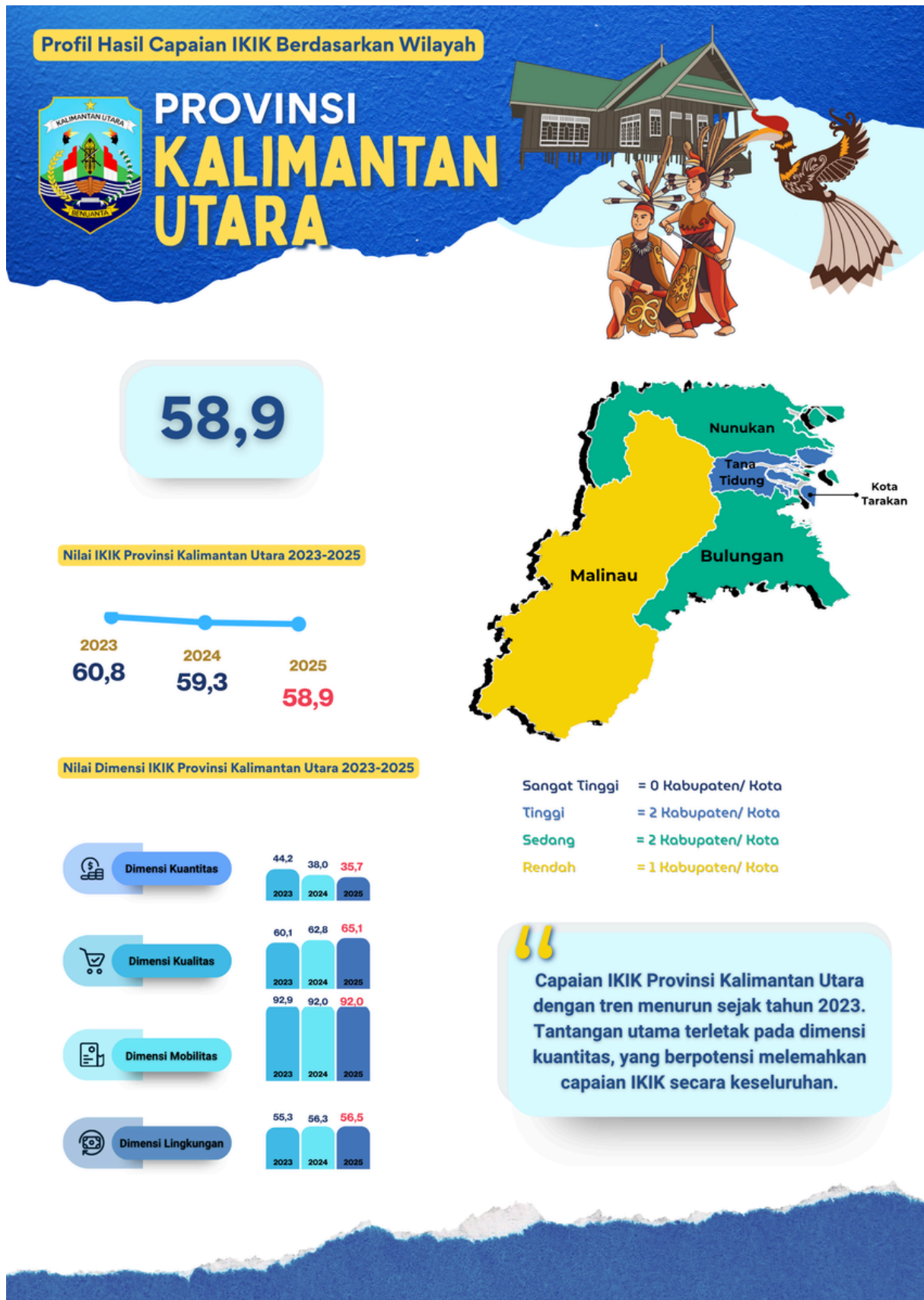
Gambar 5.22 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Tengah



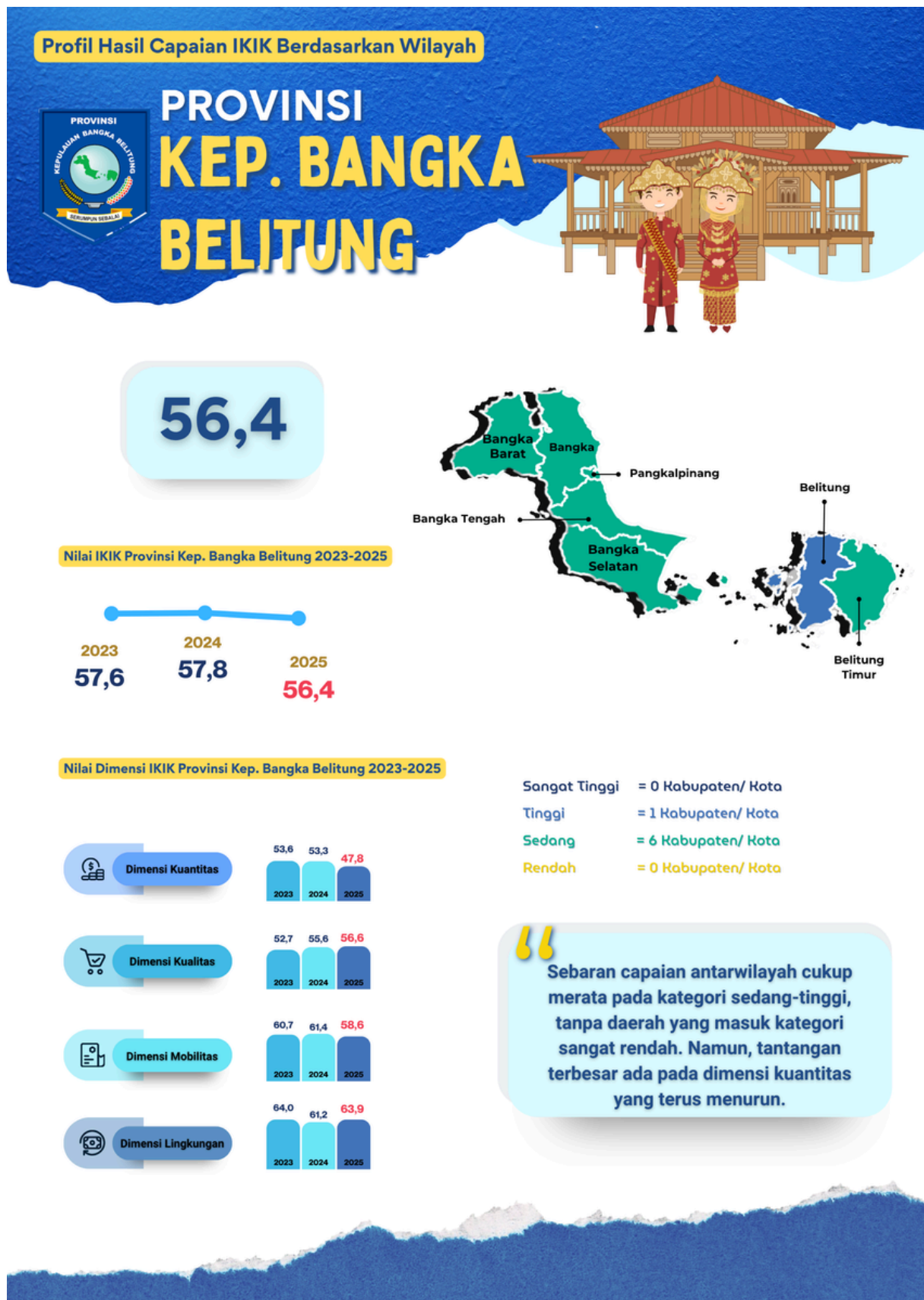
Gambar 5.23 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 5.24 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kalimantan Utara



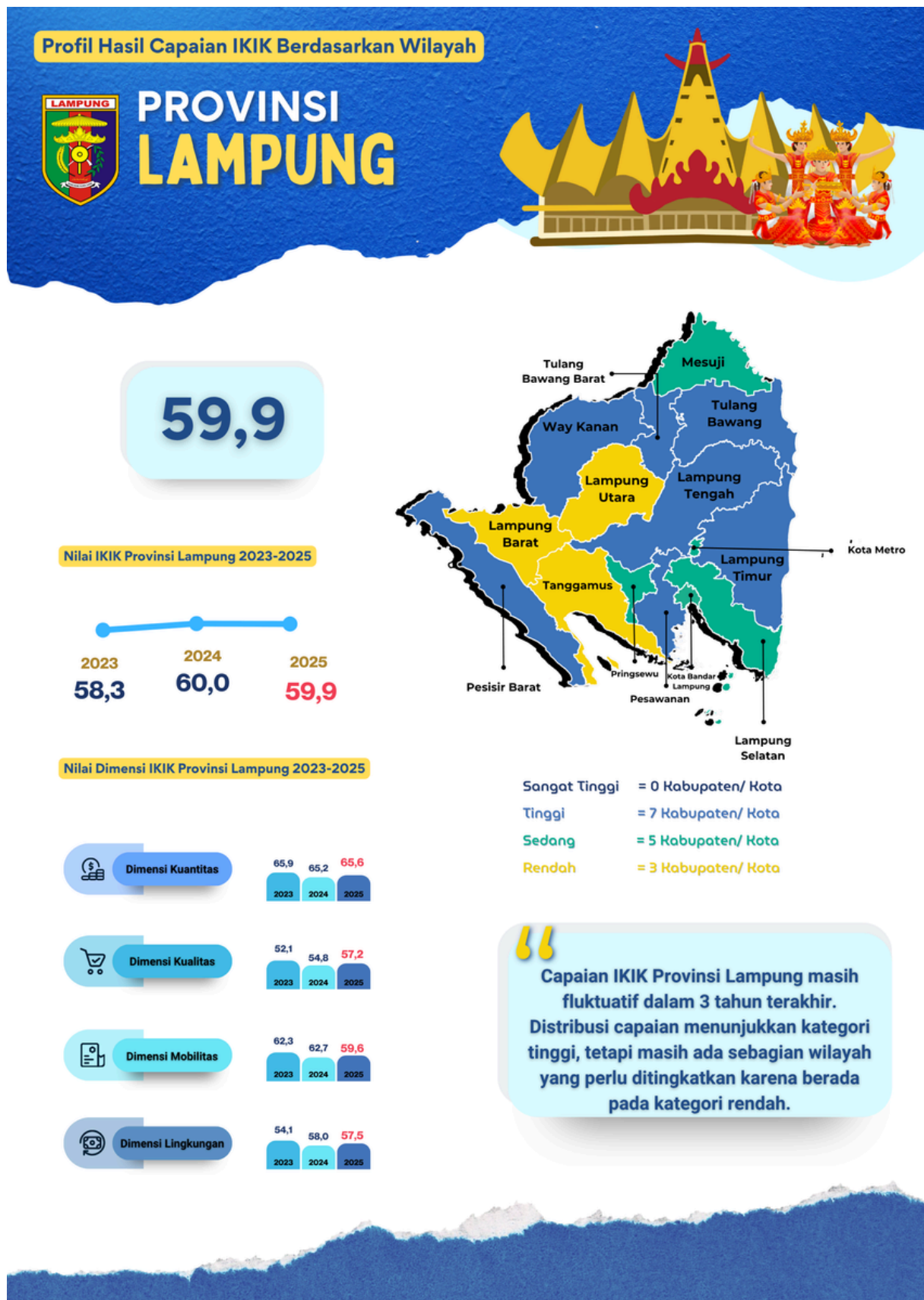
Gambar 5.25 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



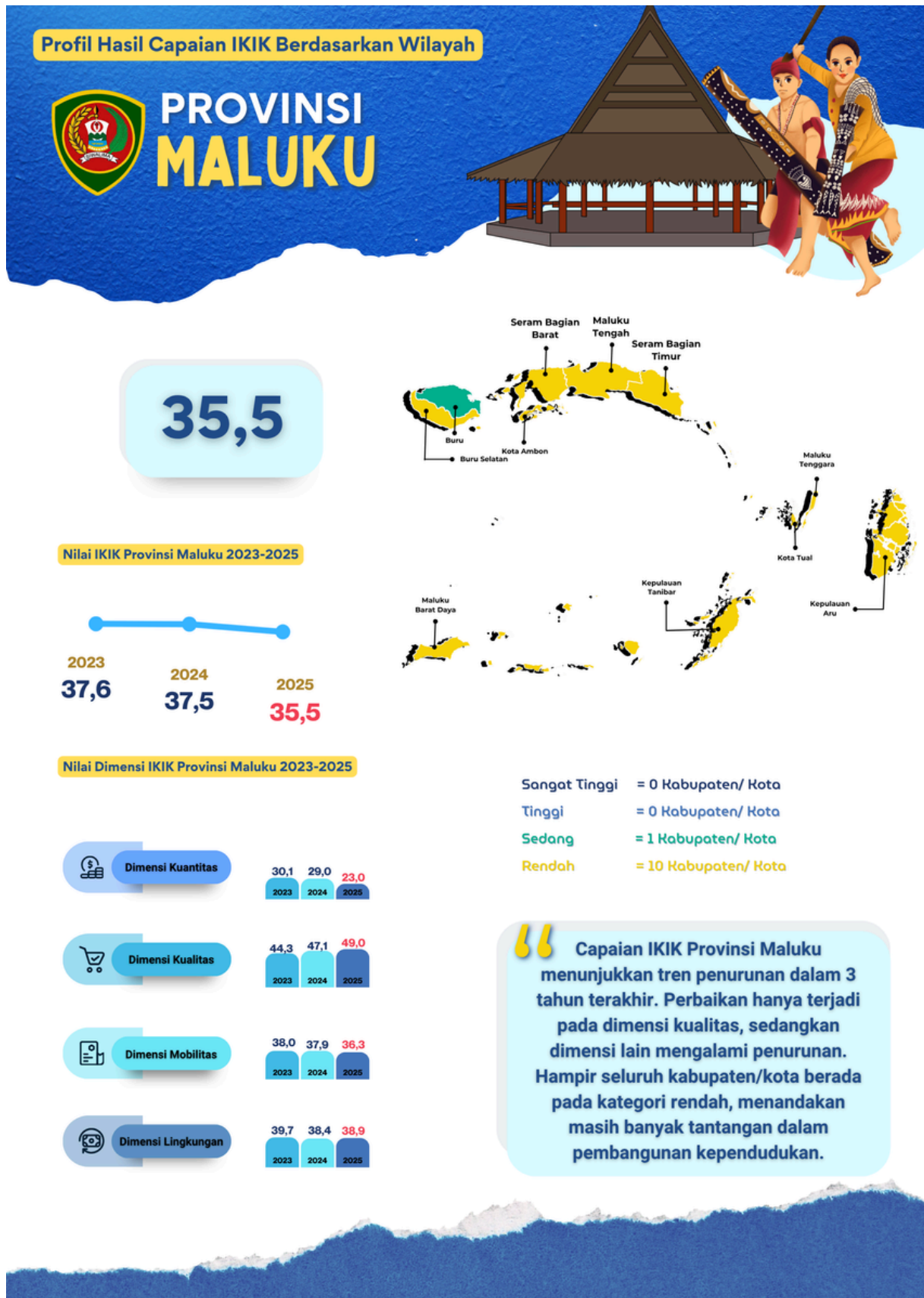
Gambar 5.26 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Kepulauan Riau



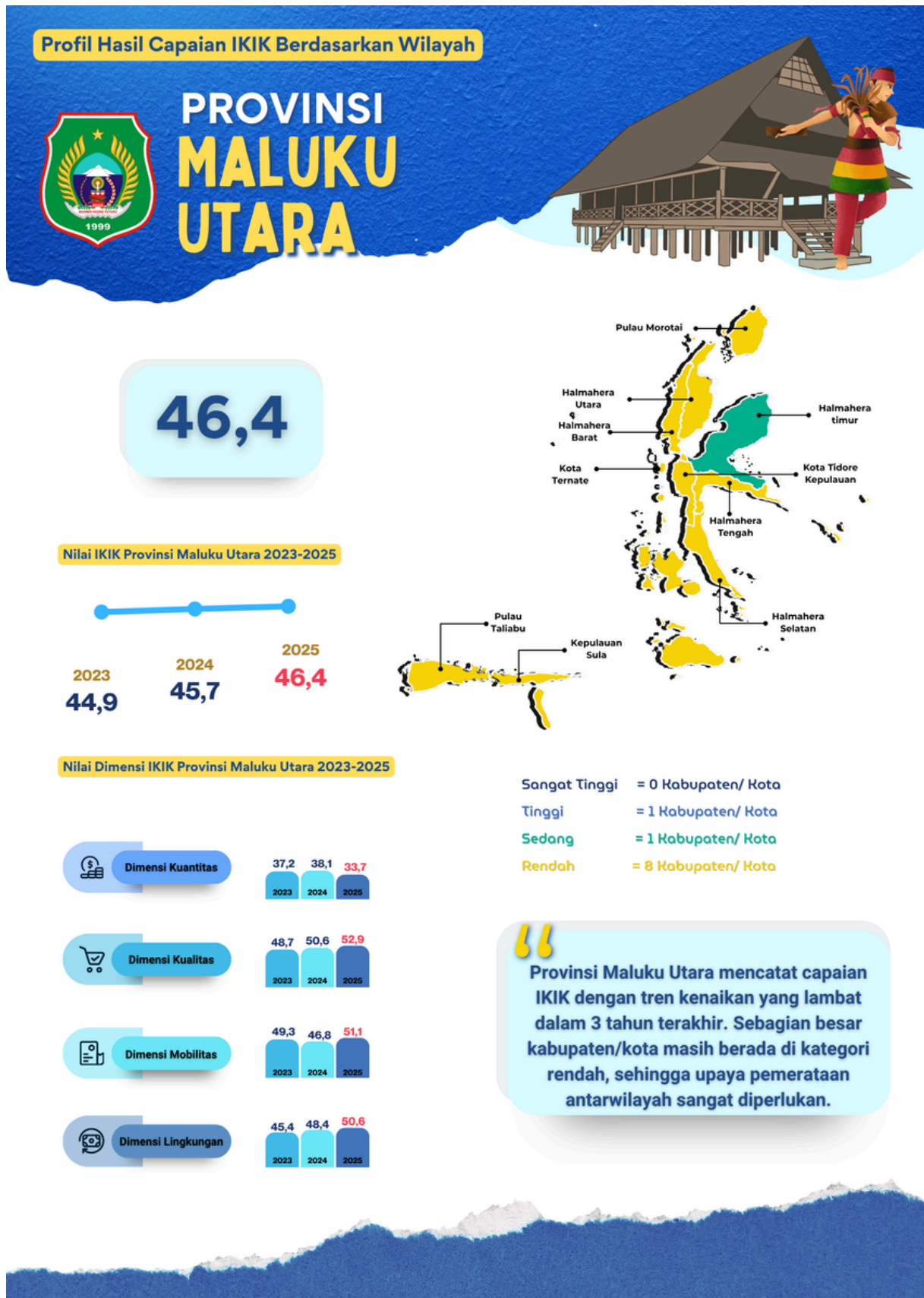
Gambar 5.27 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Lampung



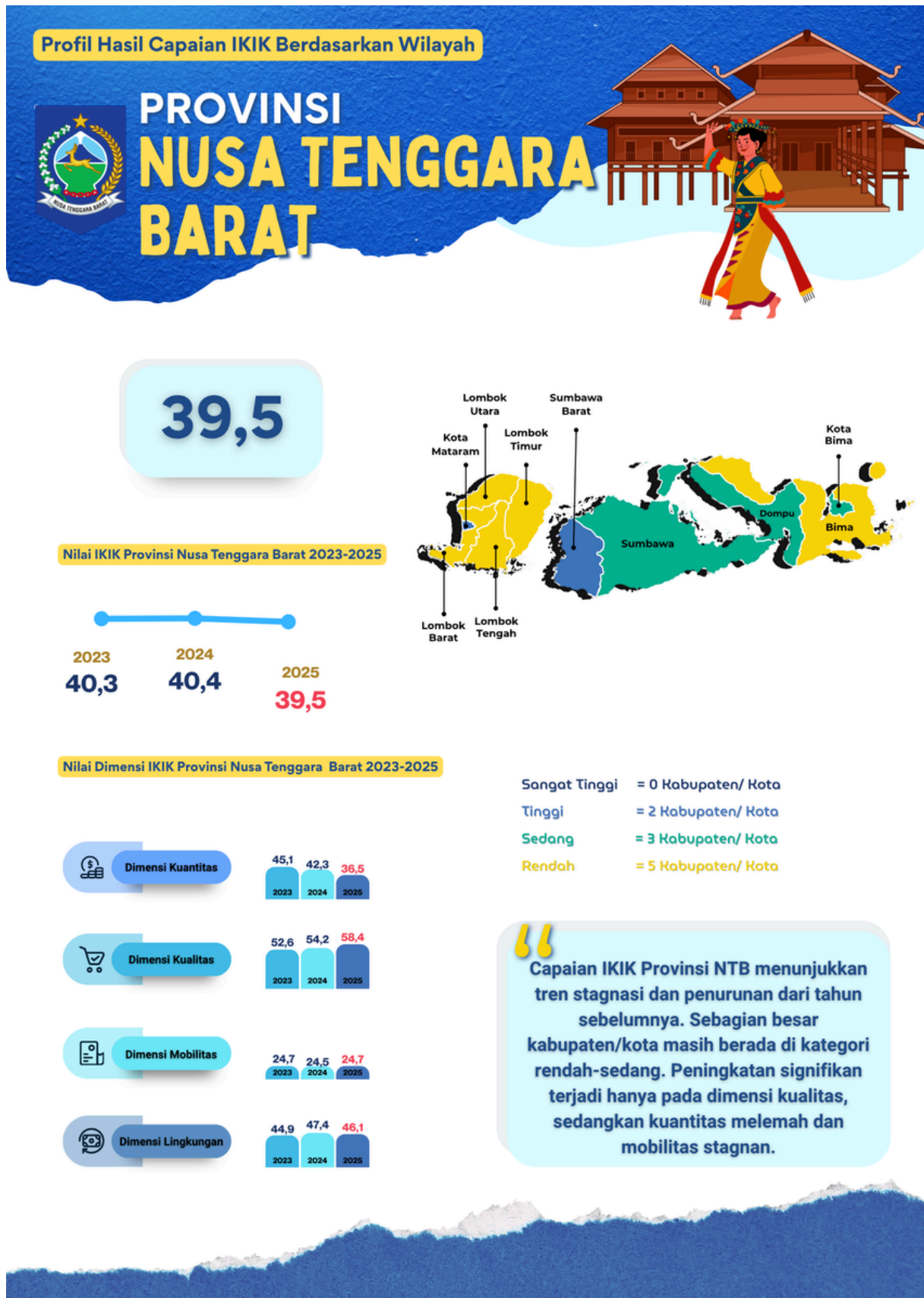
Gambar 5.28 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Maluku



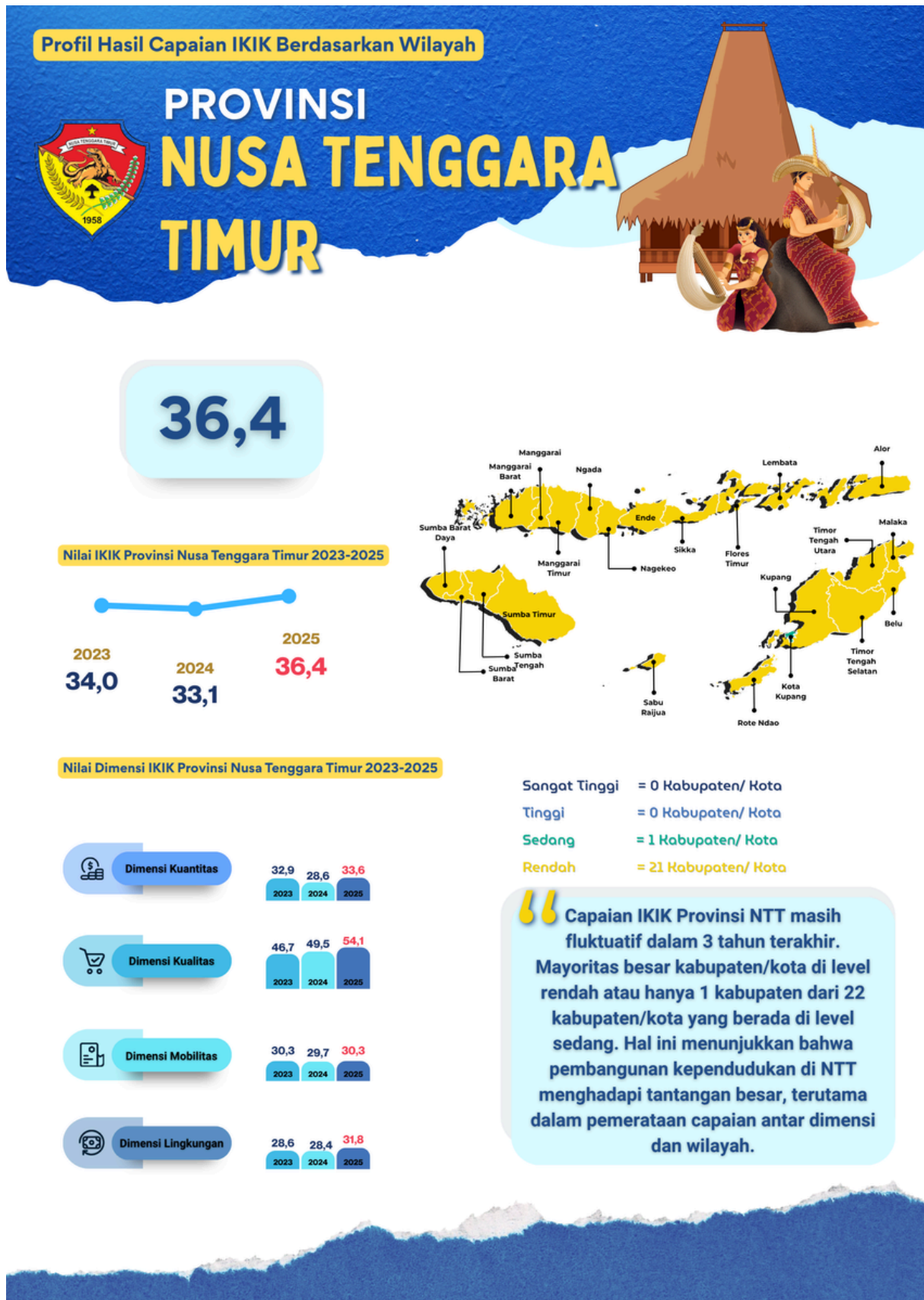
Gambar 5.29 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Maluku Utara



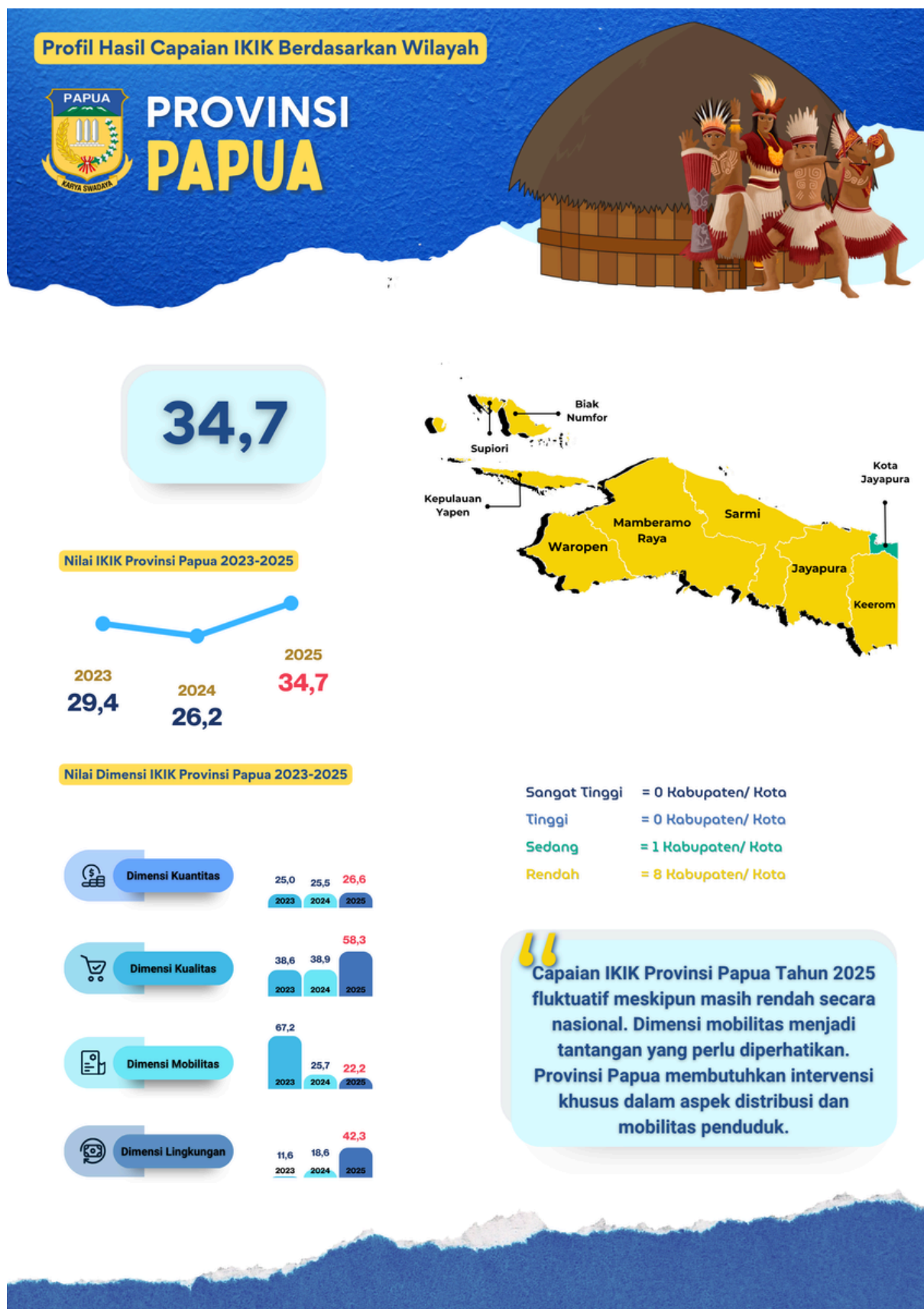
Gambar 5.30 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Nusa Tenggara Barat



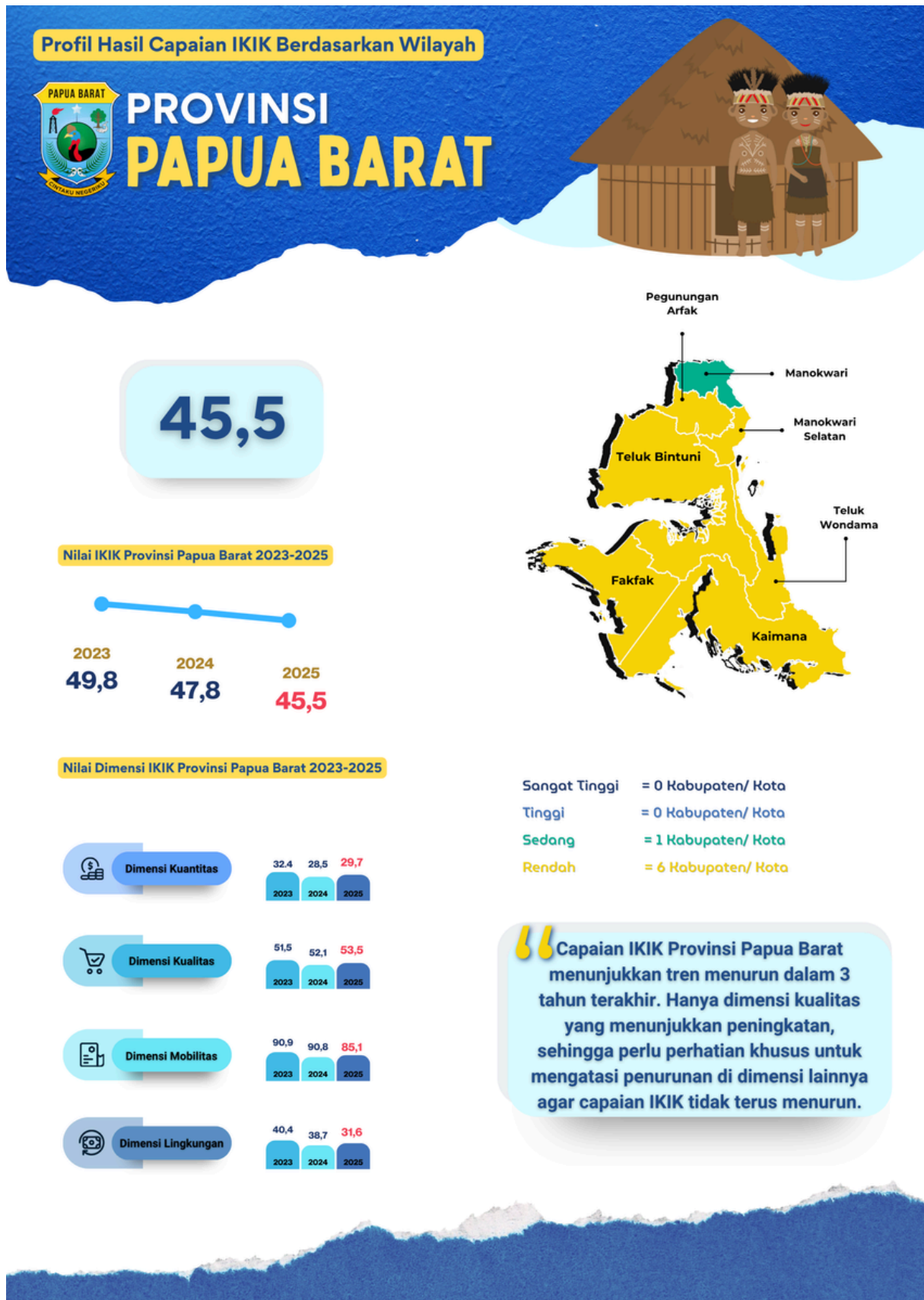
Gambar 5.31 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Nusa Tenggara Timur



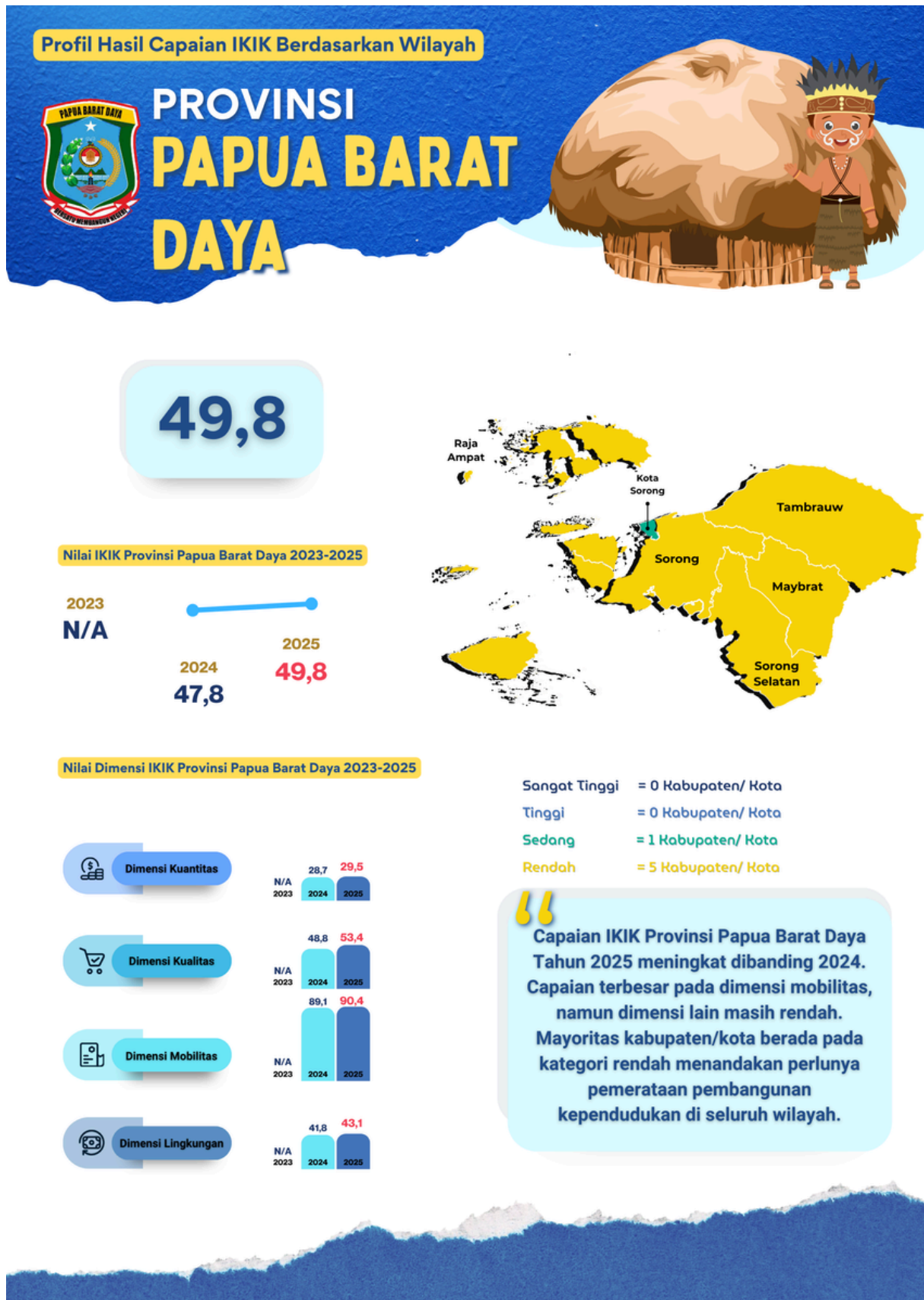
Gambar 5.32 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua



Gambar 5.33 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Barat



Gambar 5.34 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Barat Daya

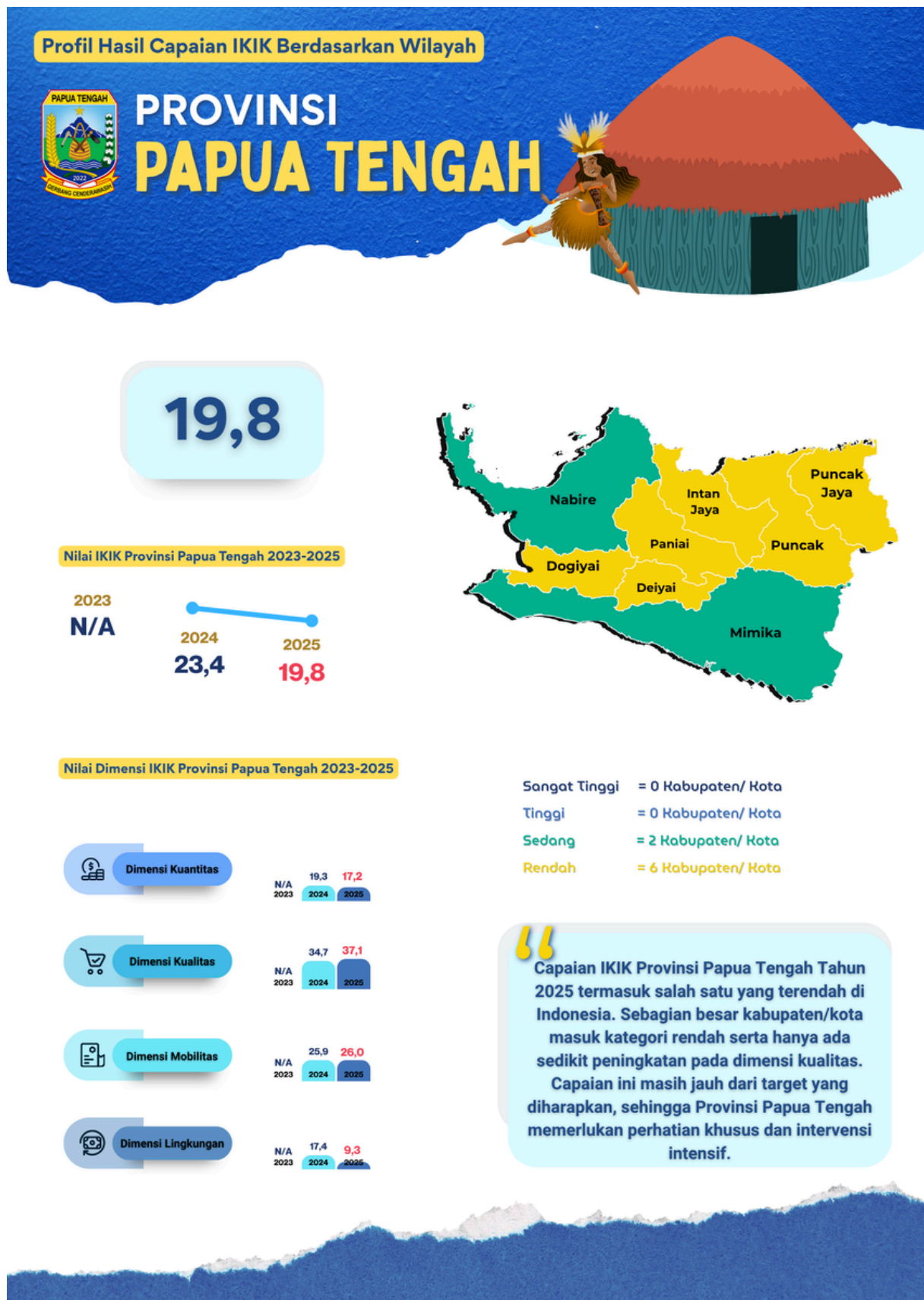


Gambar 5.35 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Pegunungan

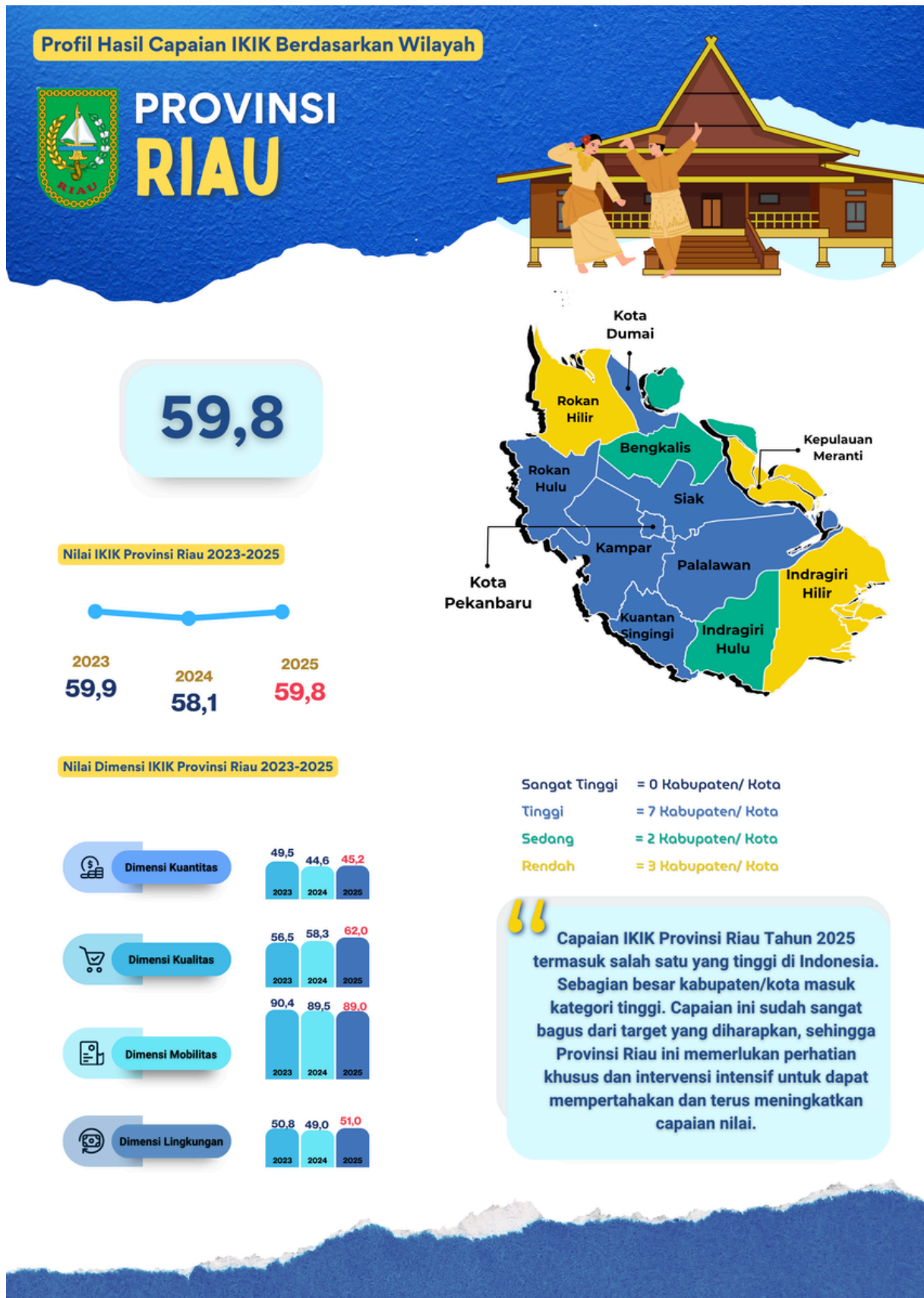
Gambar 5.36 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Selatan



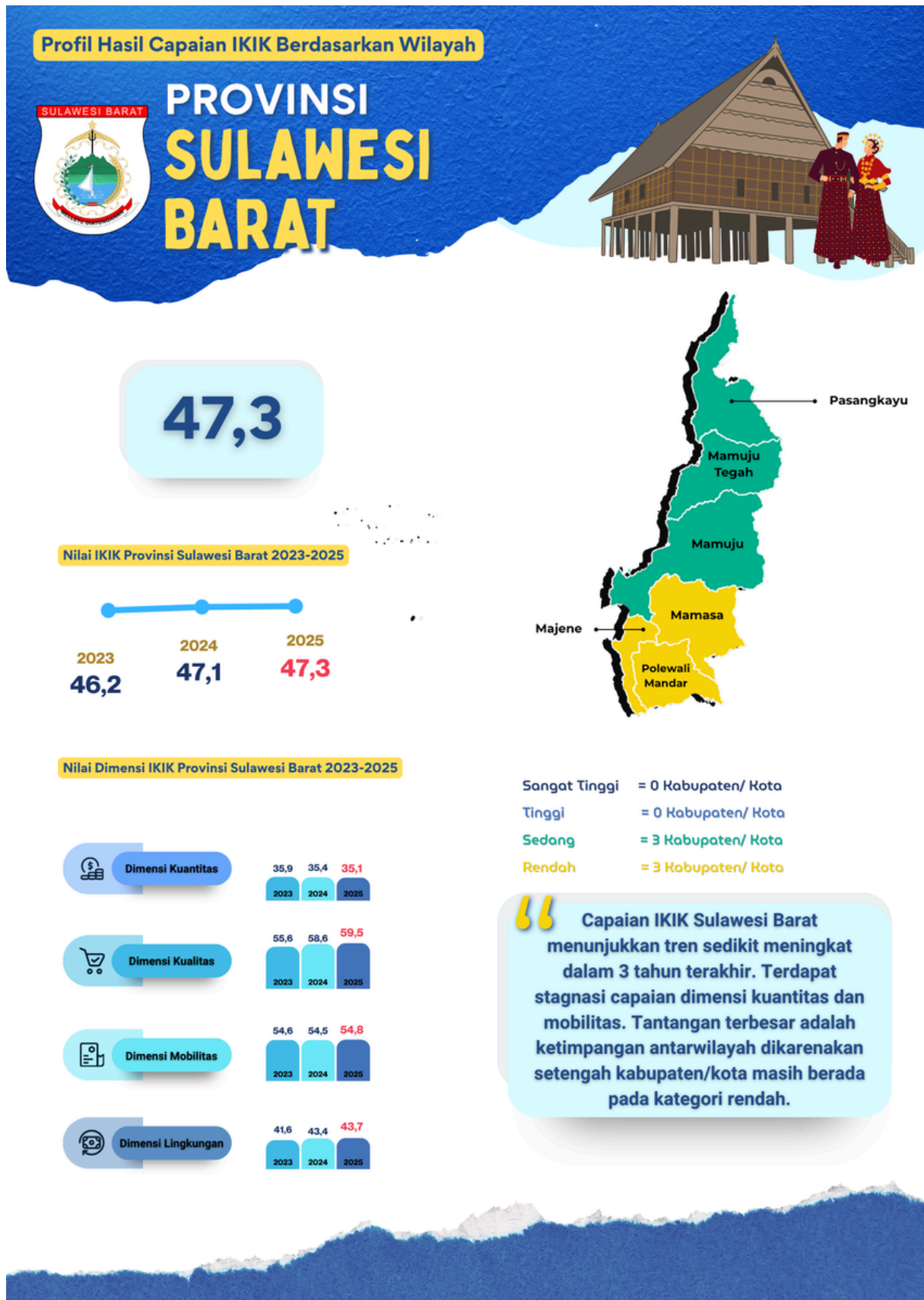
Gambar 5.37 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Papua Tengah



Gambar 5.38 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Riau

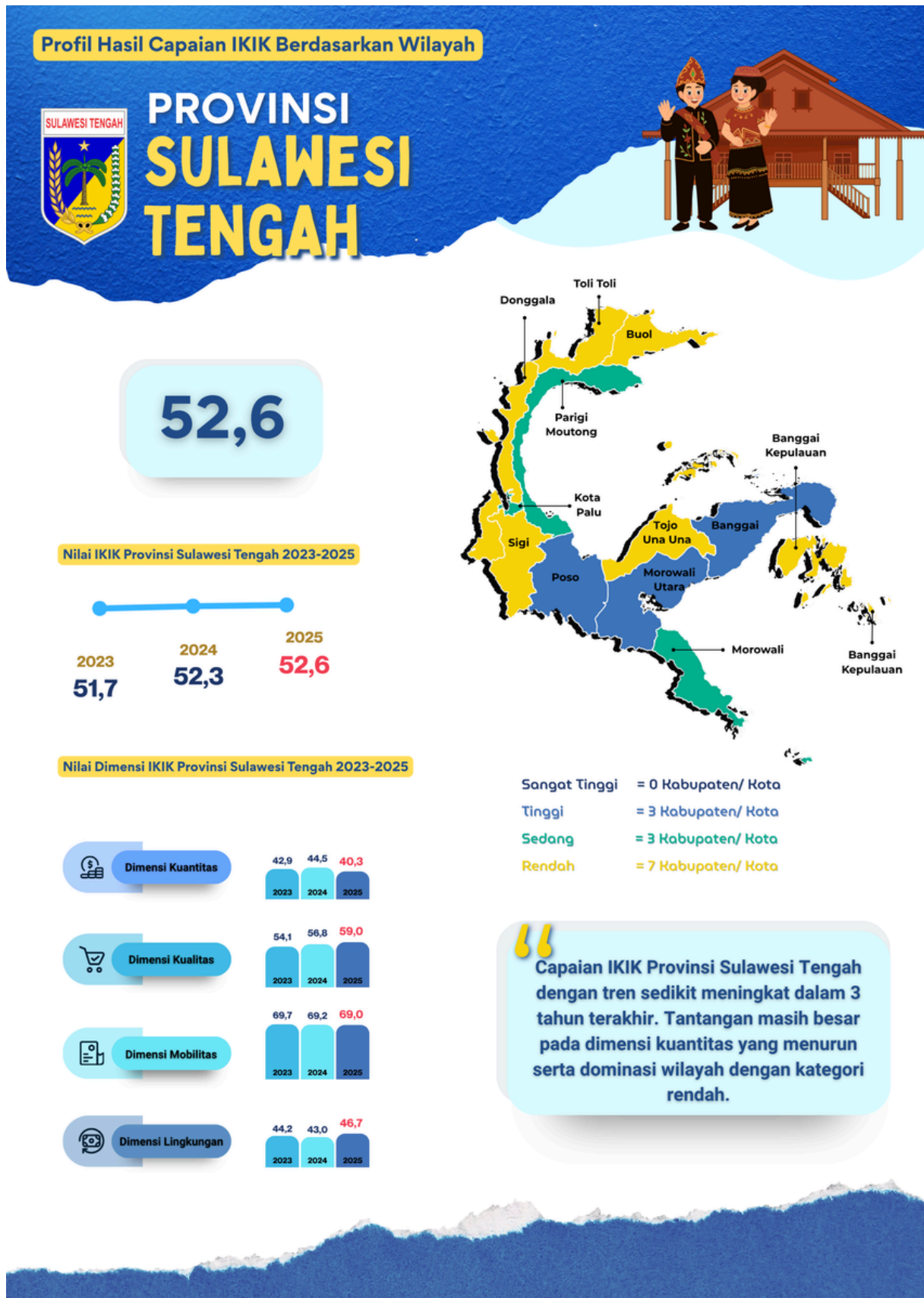


Gambar 5.39 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Barat

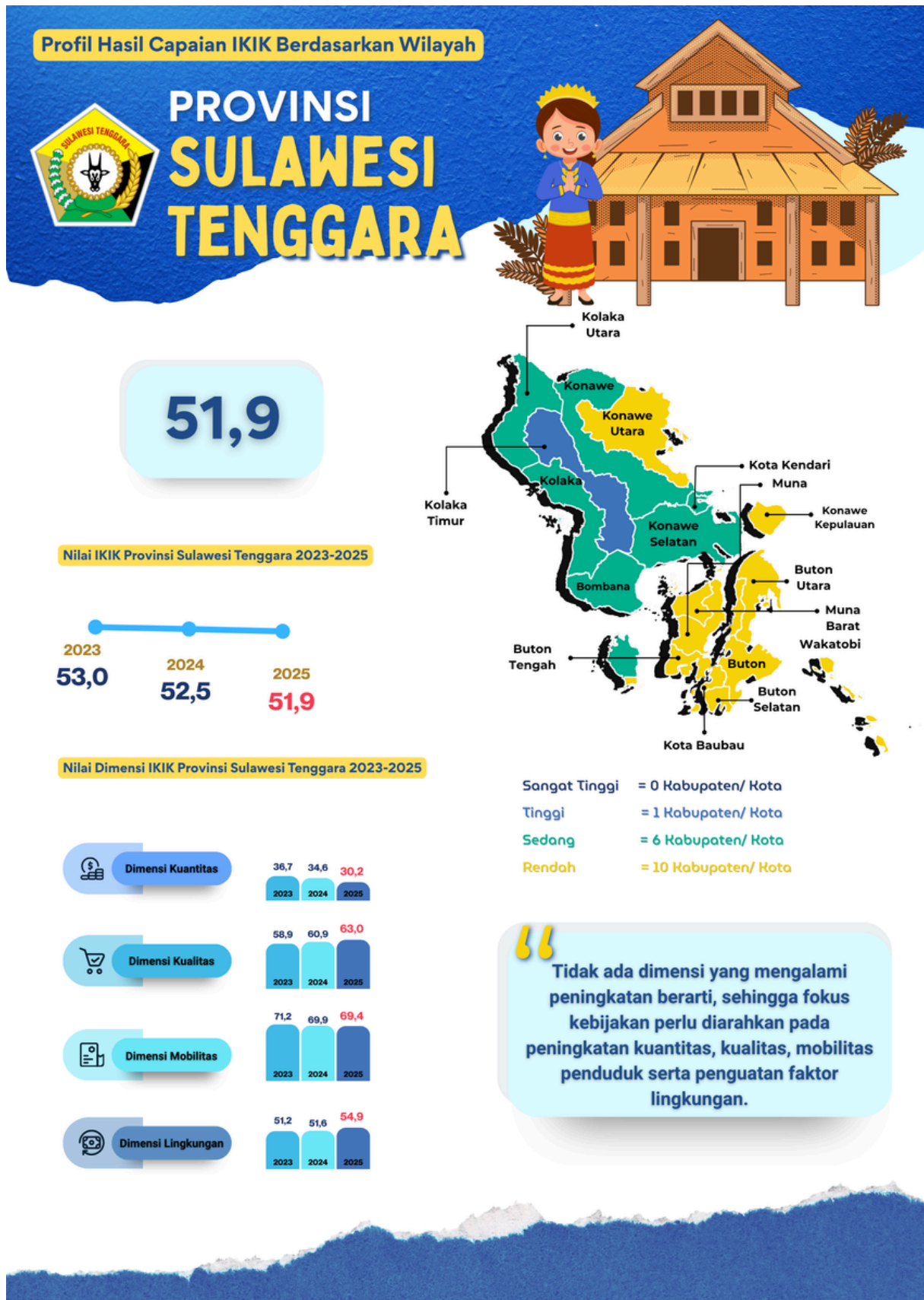


Gambar 5.40 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Selatan

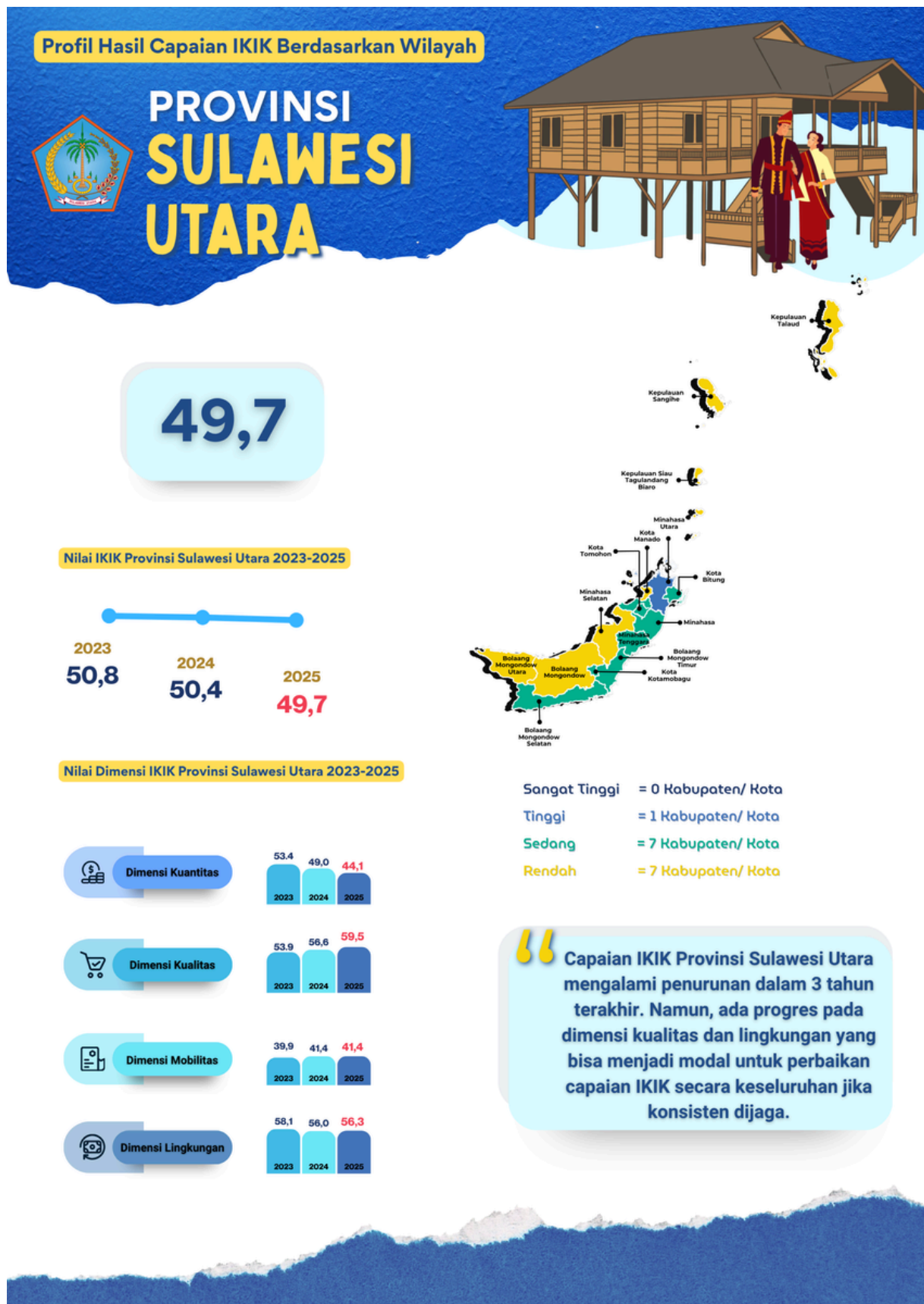


Gambar 5.41 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Tengah

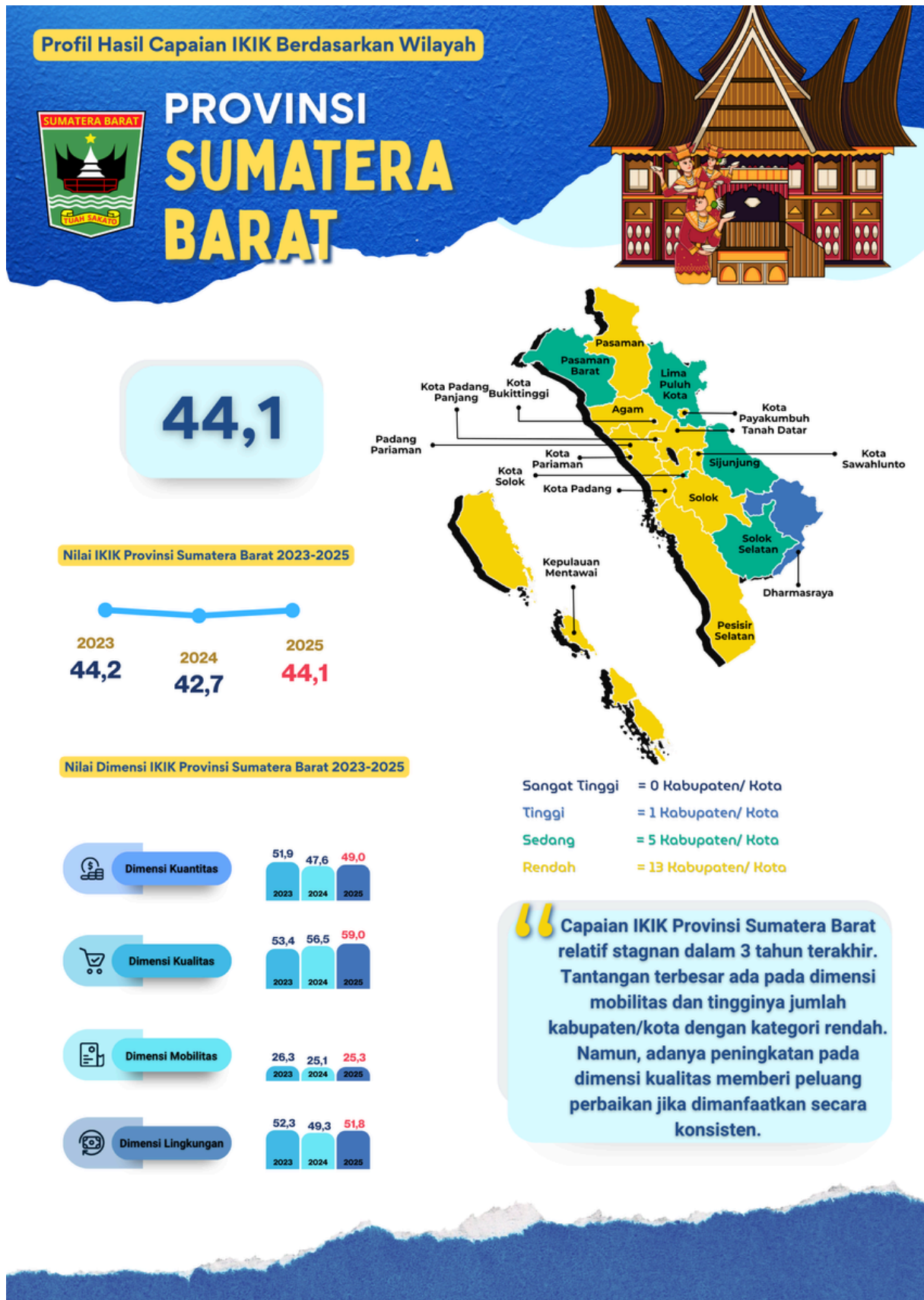
Gambar 5.42 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Tenggara



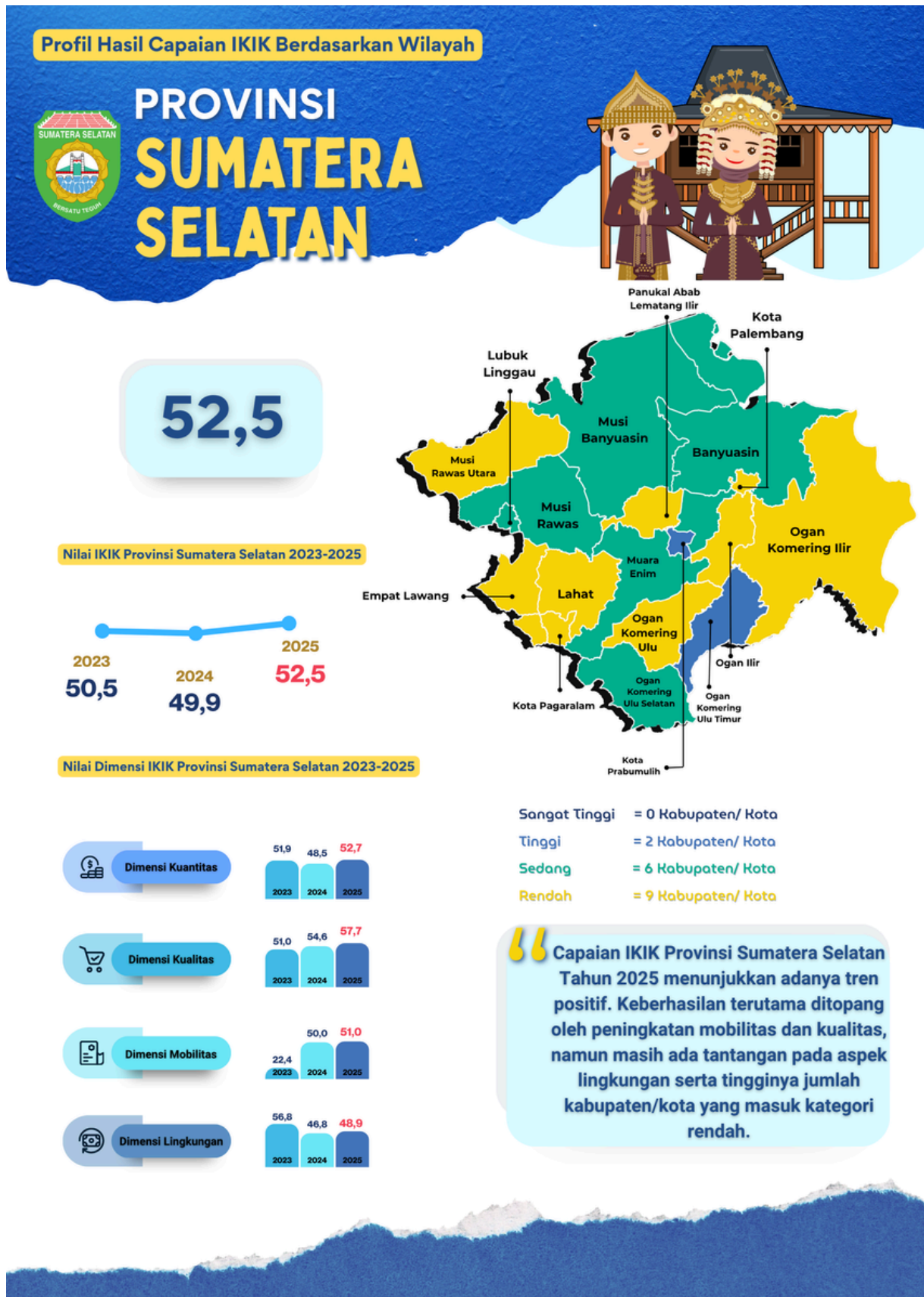
Gambar 5.43 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sulawesi Utara



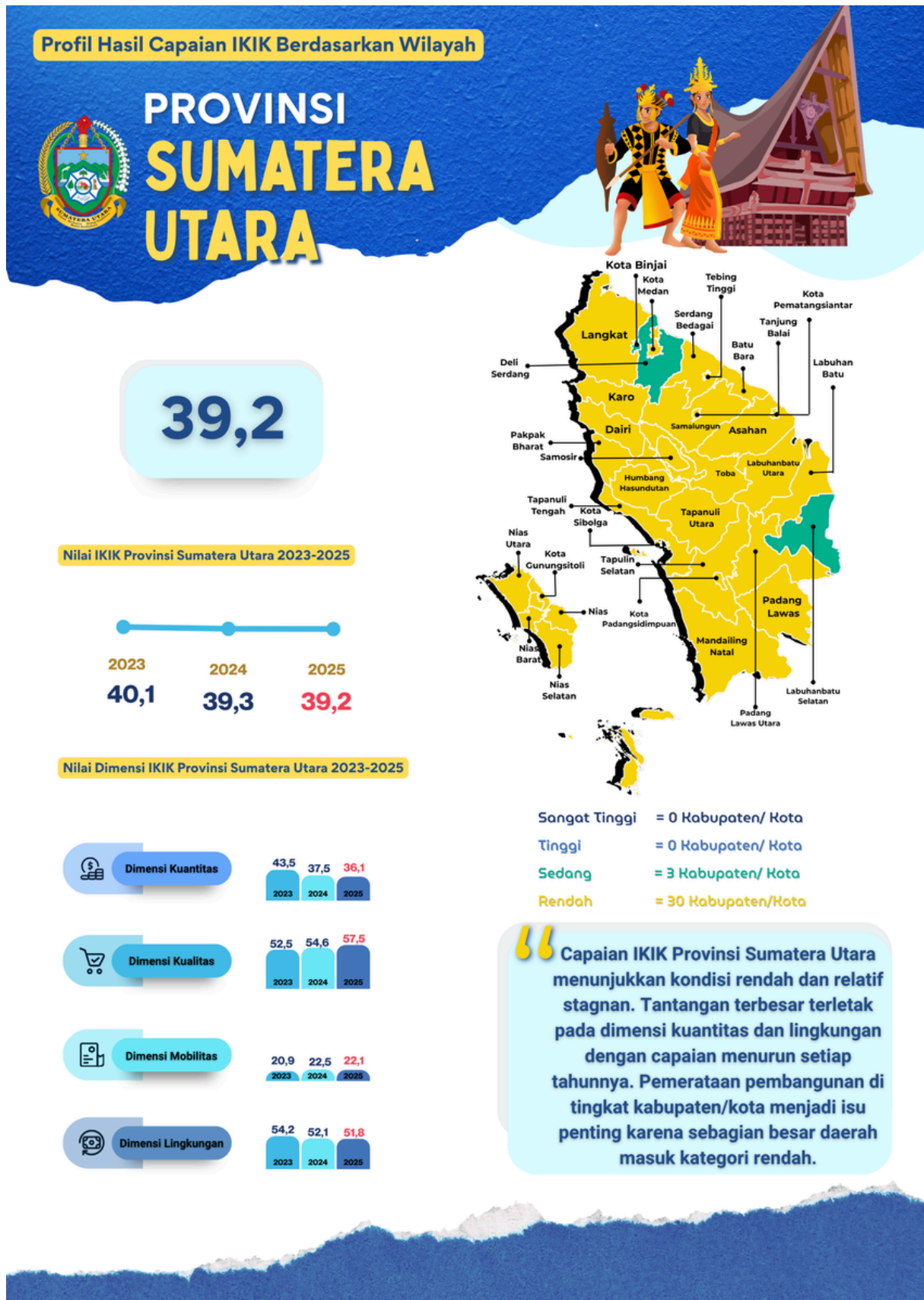
Gambar 5.44 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sumatera Barat



Gambar 5.45 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 5.46 Profil Hasil Capaian IKIK Provinsi Sumatera Utara



6

PENUTUP



6.1 Kesimpulan

Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) merupakan instrumen strategis yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan. Sebagai indeks yang memotret tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap isu kuantitas, kualitas, mobilitas, dan lingkungan penduduk, IKIK mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kependudukan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, IKIK dapat diposisikan sebagai kompas dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional agar lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

Capaian IKIK secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai IKIK nasional pada tahun 2025 sebesar 54,5 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebesar 53,7. Namun, meskipun menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, capaian IKIK tahun 2025 masih berada pada kategori sedang ($49 \leq \text{IKIK} < 58$). Hal tersebut menunjukkan bahwa telah adanya perbaikan berkelanjutan, namun masih banyak pula ruang untuk peningkatan kepedulian pada isu kependudukan. Peningkatan nilai IKIK berkaitan pula oleh perkembangan pada beberapa dimensi penyusunnya.

Perkembangan capaian dimensi yang paling terlihat signifikan, yakni pada Dimensi Kualitas yang mengalami peningkatan dari 55,2 menjadi 58,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, tingkat kepedulian pada pendidikan, kesehatan, tingkat literasi dari kepemilikan rekening, serta kesadaran memiliki identitas akta kelahiran semakin membaik dan juga tingkat perceraian dan pengangguran penduduk semakin menurun. Sedangkan, pada Dimensi Kuantitas (56,7) menunjukkan tren positif meski lambat, hal ini mengindikasikan adanya perubahan kesadaran akan penggunaan alat kontrasepsi yang semakin meningkat dan perilaku budaya menikah muda yang semakin menurun. Pada Dimensi Lingkungan juga terlihat peningkatan dari 56,1 menjadi 56,7, menunjukkan semakin adanya kemajuan kepedulian pada isu lingkungan, namun peningkatan yang stagnan juga mengindikasikan bahwa akses hunian layak dan air bersih masih belum merata. Berbeda dengan capaian dimensi lainnya yang mengalami peningkatan, Dimensi Mobilitas tidak mengalami perubahan pada nilainya yaitu 47,2 pada tahun 2024 dan 2025, namun harus menjadi catatan penting karena migrasi yang tidak terencana dapat menimbulkan ketidakstabilan keluarga, seperti masalah pengasuhan anak yang tidak memadai dan potensi ekonomi dari penduduk non-migran yang menetap di daerahnya juga belum dimanfaatkan secara optimal.

Analisis lebih dalam ditunjukkan pada capaian IKIK di tingkat provinsi, hanya terdapat 4 provinsi yang memiliki capaian nilai IKIK di atas 60, yakni Provinsi Kepulauan Riau (68,4), Kalimantan Timur (67,3), DI Yogyakarta (61,3), dan Banten (61,2), provinsi tersebut menunjukkan adanya tingkat kepedulian pada isu kependudukan yang tinggi. Saat ini, belum ada provinsi yang termasuk dalam kategori IKIK Sangat Tinggi (≥ 75). Hanya ada 9 provinsi yang masuk dalam kategori tinggi (23,7 persen), 11 provinsi (28,9 persen) berada dalam kategori sedang, dan 18 provinsi lainnya (47,4 persen) masih berada pada kategori rendah. Provinsi dengan kenaikan IKIK tertinggi adalah Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebaliknya, menjadi sebuah tantangan terutama pada provinsi baru hasil pemekaran seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menjadi provinsi dengan nilai paling rendah secara nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian IKIK menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan namun masih belum merata. Berdasarkan data, jumlah kabupaten/kota yang masuk kategori tinggi sebanyak 89 kabupaten/kota (17,3 persen) di tahun 2025. Namun, kondisi ini masih jauh dari ideal. Lebih dari separuh kabupaten/kota, tepatnya 295 kabupaten/kota (57,4 persen) dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, masih berada dalam kategori rendah. Angka ini menunjukkan bahwa di lebih dari setengah wilayah Indonesia, belum menunjukkan kepedulian terhadap isu kependudukan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih serius dan terfokus untuk mendorong peningkatan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

Secara keseluruhan, capaian IKIK 2025 mencerminkan adanya kemajuan dalam kepedulian terhadap isu-isu kependudukan. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antar daerah yang menunjukkan bahwa kepedulian ini belum merata. Upaya peningkatan perlu terus dilakukan, khususnya dalam memperkuat kesadaran terhadap isu mobilitas dan memperbaiki kondisi di wilayah-wilayah tertinggal, agar pembangunan kependudukan dapat berjalan secara lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil capaian dan analisis Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Tahun 2025, disusun beberapa saran strategis sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kepedulian serta penanganan isu kependudukan secara efektif dan berkelanjutan.

IKIK dapat digunakan sebagai alat diagnosis kebijakan. Nilai IKIK yang bervariasi antarwilayah menunjukkan adanya disparitas kepedulian terhadap isu kependudukan. Pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan capaian IKIK sebagai dasar untuk mengidentifikasi sektor dan wilayah prioritas intervensi. Misalnya, daerah dengan skor rendah pada dimensi kualitas perlu difokuskan pada peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan keluarga berencana.

Pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mengarusutamakan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelarasan regulasi, penguatan sistem informasi kependudukan yang terintegrasi, serta kampanye komunikasi publik nasional yang masif untuk meningkatkan literasi kependudukan masyarakat dalam bentuk Desain Besar Pembangunan Kependudukan Indonesia yang diturunkan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat peran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sebagai koordinator, termasuk mendorong inovasi program seperti pengembangan aplikasi digital kependudukan, optimalisasi layanan KB pascapersalinan, dan penguatan kerangka evaluasi IKIK agar lebih operasional. Optimalisasi iklim sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media perlu semakin diperkuat. Kementerian dan lembaga terkait seperti BPS, Kemendagri, Kemenkes, dan Kemendikbud harus terus menyelaraskan agenda dan program kerja melalui integrasi data, monitoring, evaluasi, serta harmonisasi kebijakan yang berorientasi pada pencapaian IKIK. Pendekatan pentahelix diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.

IKIK berfungsi sebagai pengungkit perencanaan pembangunan. Integrasi capaian IKIK ke dalam dokumen RPJMN, RPJMD, maupun Renstra OPD memungkinkan isu kependudukan masuk ke dalam arus utama pembangunan. Dengan begitu, kebijakan pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memperhatikan keseimbangan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas SDM, pengelolaan mobilitas, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) perlu dijadikan instrumen utama dalam perencanaan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan. Hasil capaian IKIK harus diintegrasikan sebagai acuan kebijakan strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, IKIK dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pemicu percepatan pembangunan kependudukan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan ke depan.

Pertama, pada dimensi kuantitas penduduk, perlu ditingkatkan fokus pada edukasi dan promosi program keluarga berencana, khususnya bagi kelompok Wanita Usia Subur (WUS) dengan jumlah anak ≤ 2 . Layanan KB pascapersalinan harus diperkuat, diiringi dengan strategi komunikasi yang ramah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelibatan komunitas serta media massa menjadi kunci untuk memperluas pemahaman publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keluarga.

Kedua, pada dimensi kualitas sumber daya manusia, pemerintah daerah didorong untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Program edukasi pra-nikah perlu diperkuat guna mencegah pernikahan dini dan menekan angka perceraian. Kolaborasi lintas sektor, khususnya antara penyuluh KB, tenaga kesehatan, serta lembaga pendidikan, harus diperkuat untuk mewujudkan keluarga yang sehat, tangguh, dan adaptif. Selain itu, materi pendidikan kependudukan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum formal maupun nonformal secara sistematis.

Ketiga, pada dimensi mobilitas penduduk, pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan yang mampu mengelola mobilitas secara seimbang dan terencana. Edukasi mengenai perencanaan mobilitas yang sehat dan inklusif perlu digencarkan agar keseimbangan antara migrasi dan non-migrasi dapat tercapai, sehingga tidak menimbulkan stagnasi maupun tekanan sosial. Integrasi materi perencanaan mobilitas ke dalam pendidikan kependudukan dan program berbasis komunitas sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Keempat, pada dimensi lingkungan, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama penyediaan akses air bersih dan perumahan layak huni di wilayah tertinggal dan rentan. Edukasi berbasis komunitas mengenai pentingnya sanitasi sehat, lingkungan bersih, dan hunian layak harus diperkuat melalui peran penyuluh KB, kader lokal, serta kemitraan dengan organisasi masyarakat. Pendekatan kolaboratif dengan sektor swasta, akademisi, dan lembaga pembangunan perlu didorong untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada.

Kelima, terkait advokasi dan sosialisasi IKIK, sebaran informasi harus diperluas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, media, akademisi, serta sektor swasta. IKIK harus diposisikan tidak hanya sebagai alat ukur teknis, tetapi juga sebagai instrumen advokasi untuk mendorong keterlibatan dan aksi nyata dalam pembangunan kependudukan. Penyempurnaan indikator serta metode pengukuran IKIK perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika kependudukan di masa depan.

Sejalan dengan variasi capaian Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) antar daerah, diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat berjenjang dan diferensial sesuai dengan tingkat capaian masing-masing wilayah. Daerah provinsi maupun kabupaten/kota dengan nilai IKIK tinggi perlu diarahkan pada kebijakan penguatan dan replikasi praktik baik (best practices). Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat mendokumentasikan dan menyebarkan inovasi kebijakan, model layanan, serta strategi komunikasi kependudukan yang terbukti efektif, untuk direplikasi di wilayah lain. Penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan kependudukan, serta pengembangan pusat pembelajaran (knowledge hub) kependudukan antardaerah menjadi langkah strategis agar capaian tinggi dapat dipertahankan sekaligus memberikan efek pengungkit secara nasional.

Sementara itu, daerah dengan nilai IKIK kategori sedang memerlukan kebijakan konsolidasi dan peningkatan konsistensi implementasi. Pada kelompok ini, fokus kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola, kesinambungan program, serta peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan. Pemerintah daerah perlu memastikan integrasi isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas aparatur dan penyuluh di lapangan. Pendampingan teknis, monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, serta penguatan peran pendidikan kependudukan menjadi kunci untuk mendorong daerah kategori sedang naik ke tingkat kepedulian yang lebih tinggi.

Adapun daerah dengan nilai IKIK rendah memerlukan kebijakan intervensi dasar dan afirmatif yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan khusus melalui penguatan sumber daya, asistensi teknis, serta prioritas pendanaan pada sektor-sektor kependudukan yang paling tertinggal. Intervensi difokuskan pada peningkatan literasi kependudukan masyarakat, pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan program keluarga berencana, serta perbaikan kondisi lingkungan permukiman. Pendekatan afirmatif melalui pendampingan intensif, kemitraan lintas sektor, dan pelibatan aktor lokal menjadi penting agar daerah dengan IKIK rendah mampu membangun fondasi kepedulian kependudukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota perlu berperan sebagai penghubung strategis antara kebijakan pusat, provinsi dan implementasi di kabupaten/kota. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah menyusun strategi daerah berwawasan kependudukan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memperkuat kapasitas kelembagaan kependudukan di tingkat kabupaten/kota, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan tingkat daerah. Kabupaten/Kota dengan capaian IKIK tinggi dapat dijadikan role model melalui program best practices, sementara provinsi dengan capaian rendah, terutama di kawasan timur Indonesia, perlu mendapatkan dukungan afirmatif dalam bentuk peningkatan anggaran, pendampingan teknis, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2025- 2029*. Retrieved from <https://rpjmn.bappenas.go.id>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). *Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045*. Retrieved from <https://media.licdn.com/dms/document/media/v2/D561FAQHBI3H3ZigfZA/feedshare-document-pdf-analyzed/B56Zf3v5e4HcAc/0/1752208225255?e=1759363200&v=beta&t7eNbM2pD0HVtoDbE45vcXx8MmrcPXJDw0mYsCTHliFc>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Indonesia Emas 2045; Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://indonesia2045.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 2015-2025*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2024*. Jakarta: BPS.
- Balaj, M., et al. (2024). Effects of education on adult mortality: a global systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(23\)00306-7](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00306-7).
- Chae, S., & Ngo, T. D. (2017). *The global state of evidence on interventions to prevent child marriage*. New York: Population Council.



Doubleday, T. (1853). *The True Law of Population shewn to be connected with the Food of The People*. London: Smith, Elder & Co.

Dumont, A. (1890). *Depopulation et Civilisation: Etude Demographique*. Paris: Lecrosnier & Babe.

Durkheim, E. (1984). *The Division of Labor in Society*. The Macmillan Press Ltd. Retrieved from <https://mypaperhub.com/Durkheim-Emile-The-Division-of-Labour-in-Society.pdf>

Ehrlich, P. R. (1988). *The Population Bomb*. Edisi Revisi. New York: Ballantine Books. Retrieved from <http://pinguet.free.fr/ehrich68.pdf>.

Haryati, H. U. (2023). The effect of education on happiness, self-acceptance, and family harmony: Empirical evidence from Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(1), 35-56. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i1.371>.

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029

Leridon, H. (2015). *The Development of Fertility Theories: a Multidisciplinary Endeavour*. *Population*. 70 (2). 309–348. Retrieved from https://www.cairn-int.info/article-E_POPU_1502_0331--the-development-of-fertility-theories.htm.

Malthus, T. (1978). *An Essay on the Principle of Population*. Retrieved from <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>.

Mifrahi, M. N., & Rahmat, H. N. (2022). Peran aspek pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi: Analisis kelompok usia pendidikan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(2), 165–176. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss2.art3>.



- Mill, J. S. (2009). *Principles of Political Economy*. Prometheus Books. Retrieved from <https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Mill,%20Principles%20of%20Political%20Economy.pdf>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia, 2009. Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009.%20Accessed%2011%20April%202025>.
- Sherwood, J. M. (1985). *Engels, Marx, Malthus, and the Machine*. The American Historical Review. 90 (4). 837-865. <http://www.jstor.org/stable/1858842>.
- Trewartha, G. T., (1969). *A Geography of Population: World Pattern*. New York : John Wiley and Sons, Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045
- United Nations (2022) World Population Conference (WPC) Reports. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). Projections of global population peak and decline. Financial Times. Retrieved from FT website.
- United Nations Population Fund. n.d. The ICPD and MDGs: Close Linkages. Retrieved from https://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/7/14_UNFPA.pdf.



United Nations. (2014). International Conference on Population and Development Programme of Action: Twentieth Anniversary Edition. Diterbitkan oleh UNFPA. Retrieved from <https://www.unfpa.org/publications/international-conference-population-and-development-programme-action>.

United Nations. (2019). Demographic megatrends and global population growth. Retrieved from www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/30/presentations/Monday/Session2/Frank_Swiaczny_UNDESA_PowerPoint_EGM%20CPD53.pdf

United Nations. (2022). World Population Prospects 2022 Summary of Results. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

United Nations. (2024). World Population Prospects 2024. Retrieved from UN website.

Weeks, D. (1992). *The Eight Essential Steps to Conflict Resolution: Preserving Relationships at Work, at Home, and in the Community*. Jeremy P. Tarcher, Inc.

Weeks, J. R. (2012). *Population: An Introduction to Concepts and Issues*. Eleventh Edition. Belmont: Wadsworth.



LAMPIRAN

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2023

2024

2025

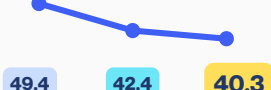
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Aceh Barat 	43,7	60,5	42,2	60,7		Sedang
Aceh Barat Daya 	38,8	59,4	46,5	58,5		Sedang
Aceh Besar 	28,7	56,1	62,6	55,2		Rendah
Aceh Jaya 	58,6	66,9	55,1	46,1		Sedang
Aceh Selatan 	42,1	57,4	23,7	54,9		Rendah
Aceh Singkil 	28,7	54,7	52,7	47,4		Rendah
Aceh Tamiang 	54,4	57,5	53,5	48,0		Sedang
Aceh Tengah 	54,1	62,8	46,7	28,8		Rendah
Aceh Tenggara 	31,7	61,2	30,6	52,4		Rendah
Aceh Timur 	29,6	49,4	34,0	43,2		Rendah
Aceh Utara 	26,8	55,8	26,6	44,5		Rendah
Bener Meriah 	54,5	62,6	77,1	29,2		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bireuen 	29,9	60,8	37,9	53,9		Rendah
Gayo Lues 	33,0	55,8	40,7	35,2		Rendah
Kota Banda Aceh 	43,7	66,7	27,4	64,8		Rendah
Kota Langsa 	43,6	61,0	55,1	51,6		Sedang
Kota Lhokseumawe 	26,9	57,2	73,8	61,8		Rendah
Kota Sabang 	49,5	77,7	24,9	58,8		Rendah
Kota Subulussalam 	23,9	56,5	85,3	37,0		Rendah
Nagan Raya 	53,9	63,3	50,4	58,5		Sedang
Pidie 	33,9	57,0	21,0	58,0		Rendah
Pidie Jaya 	34,0	61,2	29,0	53,4		Rendah
Simeulue 	34,9	60,9	37,7	52,9		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

2023

2024

2025

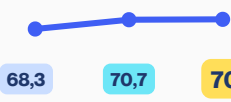
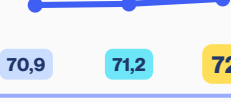
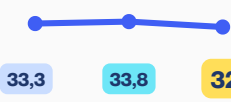
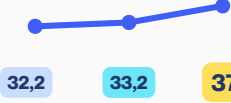
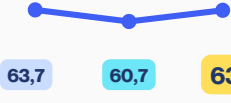
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Badung 	76,2	79,5	83,0	64,1		Sangat Tinggi
Bangli 	59,7	59,0	20,7	47,5		Rendah
Buleleng 	53,5	59,2	17,5	40,2		Rendah
Gianyar 	68,3	72,5	47,9	50,1		Tinggi
Jembrana 	59,7	67,5	19,4	51,1		Rendah
Karangasem 	32,2	56,8	8,7	36,2		Rendah
Klungkung 	53,4	66,9	10,7	56,6		Rendah
Kota Denpasar 	68,8	82,8	82,2	67,1		Tinggi
Tabanan 	71,1	70,2	34,8	49,2		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Kota Cilegon	45,7	62,7	89,3	69,7	 68,8 66,0 65,0	Tinggi
 Kota Serang	46,8	47,0	56,1	64,5	 50,3 52,0 53,1	Sedang
 Kota Tangerang	67,3	68,2	92,1	59,4	 68,3 70,7 70,8	Tinggi
 Kota Tangerang Selatan	64,4	70,4	94,4	64,5	 70,9 71,2 72,5	Tinggi
 Lebak	32,0	37,7	22,6	40,3	 33,3 33,8 32,4	Rendah
 Pandeglang	49,4	36,3	41,8	52,3	 32,2 33,2 37,5	Rendah
 Serang	49,7	36,6	41,8	52,3	 42,2 47,0 44,6	Rendah
 Tangerang	63,3	57,8	76,3	58,6	 63,7 60,7 63,6	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

2023

2024

2025

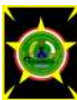
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Bengkulu Selatan	53,2	62,9	33,4	42,2	 45,0 43,7 46,6	Rendah
 Bengkulu Tengah	63,3	57,5	74,0	30,3	 51,2 51,0 53,4	Sedang
 Bengkulu Utara	64,6	60,0	83,9	49,4	 54,7 61,9 63,3	Tinggi
 Kaur	50,3	57,2	56,8	44,1	 54,3 47,6 51,8	Sedang
 Kepahiang	40,7	54,6	56,3	29,8	 49,1 49,1 43,9	Rendah
 Kota Bengkulu	54,5	69,6	59,3	62,9	 59,2 60,1 61,3	Tinggi
 Lebong	73,3	57,2	35,4	24,6	 40,7 42,3 43,7	Rendah
 Mukomuko	50,8	63,4	92,7	48,0	 61,7 60,6 61,5	Tinggi
 Rejang Lebong	68,6	58,6	47,6	27,9	 48,8 48,7 48,1	Rendah
 Seluma	71,5	58,0	55,0	39,9	 53,4 52,9 54,9	Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

2023

2024

2025

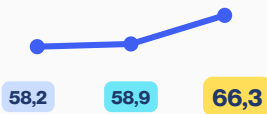
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bantul 	68,2	70,0	54,9	75,6	65,5 66,3 66,7	Tinggi
Gunung Kidul 	73,3	59,2	13,4	62,2	40,7 41,4 43,6	Rendah
Kota Yogyakarta 	69,4	73,1	27,4	71,7	54,4 53,5 56,2	Sedang
Kulon Progo 	81,5	69,3	15,3	64,3	47,4 48,4 48,5	Rendah
Sleman 	74,0	74,4	71,4	78,8	70,9 72,5 74,6	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

2023

2024

2025

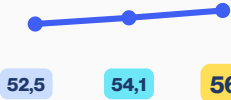
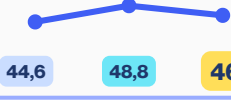
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Kepulauan Seribu 	56,2	56,1	43,4	52,9		Sedang
Jakarta Barat 	67,1	66,6	67,4	58,9		Tinggi
Jakarta Pusat 	54,6	70,7	24,6	50,0		Rendah
Jakarta Selatan 	58,5	74,6	27,4	60,0		Sedang
Jakarta Timur 	62,1	68,8	52,4	62,0		Tinggi
Jakarta Utara 	66,3	66,7	71,8	60,8		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Boalemo 	57,9	52,1	63,6	51,4		Sedang
Bone Bolango 	49,0	60,5	39,0	55,1		Sedang
Gorontalo 	47,8	57,6	24,4	49,8		Rendah
Gorontalo Utara 	30,6	56,8	49,5	53,2		Rendah
Kota Gorontalo 	46,9	65,1	35,5	61,4		Sedang
Pahuwoto 	47,7	56,6	68,4	56,9		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

2023

2024

2025

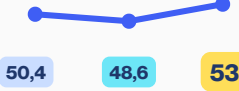
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Batang Hari	50,9	58,4	66,5	48,1	57,1 58,1 55,5	Sedang
Bungo	53,1	56,5	80,9	55,5	54,7 57,9 60,6	Tinggi
Kerinci	82,0	57,9	36,6	50,3	47,2 49,1 54,4	Sedang
Kota Jambi	57,1	62,6	58,0	61,3	60,2 58,0 59,7	Tinggi
Kota Sungai Penuh	79,7	66,9	42,6	64,0	63,9 64,0 61,7	Tinggi
Merangin	56,7	56,0	73,3	45,0	52,9 55,0 56,9	Sedang
Muaro Jambi	53,8	58,2	91,3	46,8	60,8 62,2 60,5	Tinggi
Sarolangun	51,1	53,3	70,3	47,1	52,1 50,0 54,8	Sedang
Tanjung Jabung Barat	51,3	54,5	70,6	33,8	49,8 47,3 50,8	Sedang
Tanjung Jabung Timur	65,3	57,6	62,8	41,8	54,3 58,1 56,0	Sedang
Tebo	56,6	52,4	90,3	53,6	58,8 62,1 61,5	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

2023

2024

2025

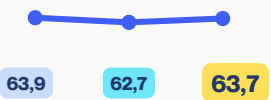
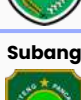
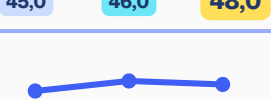
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Bandung	40,9	53,5	50,1	51,0	 47,7 48,5 48,6	Rendah
 Bandung Barat	52,8	48,0	62,2	50,3	 50,4 48,6 53,0	Sedang
 Bekasi	67,9	47,8	94,6	64,1	 66,1 63,2 66,6	Tinggi
 Bogor	34,7	42,5	63,8	53,4	 50,9 45,3 47,3	Rendah
 Ciamis	57,7	55,7	12,4	55,1	 37,9 38,4 38,5	Rendah
 Cianjur	32,7	43,7	26,9	44,9	 32,5 33,4 36,3	Rendah
 Cirebon	55,5	48,4	27,9	71,8	 49,2 45,8 48,2	Rendah
 Garut	29,3	43,8	17,7	38,2	 30,1 29,2 30,5	Rendah
 Indramayu	49,0	48,2	28,3	66,7	 47,5 47,1 46,0	Rendah
 Karawang	69,2	44,9	57,5	57,2	 52,6 52,9 56,5	Sedang
 Kota Bandung	64,1	58,8	55,2	54,6	 55,3 56,2 58,0	Tinggi
 Kota Banjar	71,0	60,2	65,7	62,2	 63,3 67,8 64,6	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

2023

2024

2025

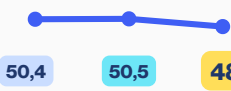
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Kota Bekasi 	62,1	61,2	90,5	63,7		Tinggi
Kota Bogor 	53,5	54,4	64,3	62,6		Tinggi
Kota Cimahi 	70,0	52,0	81,9	55,2		Tinggi
Kota Cirebon 	25,5	61,6	21,4	71,2		Rendah
Kota Depok 	68,8	65,9	88,3	62,4		Tinggi
Kota Sukabumi 	58,8	53,3	21,4	66,5		Rendah
Kota Tasikmalaya 	58,8	59,2	39,4	67,4		Sedang
Kuningan 	60,7	47,0	23,9	55,8		Rendah
Majalengka 	62,0	55,5	24,9	56,9		Rendah
Pangandaran 	74,3	63,2	38,7	54,0		Sedang
Purwakarta 	39,1	43,8	49,2	63,3		Rendah
Subang 	62,6	48,9	35,2	60,8		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

2023

2024

2025

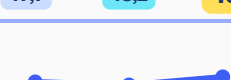
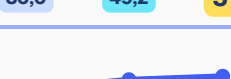
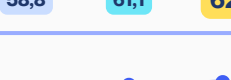
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Sukabumi 	53,0	44,1	28,3	49,7	 40,4 42,5 42,6	Rendah
Sumedang 	57,3	55,0	35,8	48,8	 50,4 50,5 48,5	Rendah
Tasikmalaya 	34,8	56,0	25,5	44,8	 39,1 38,7 38,6	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2023

2024

2025

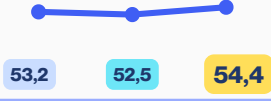
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Banjarnegara 	61,4	48,0	17,2	20,0		Rendah
Banyumas 	76,0	55,1	21,8	54,0		Rendah
Batang 	68,4	47,6	25,7	55,1		Rendah
Blora 	64,4	56,1	21,9	98,7		Sedang
Boyolali 	71,3	60,6	14,9	69,4		Rendah
Brebes 	64,4	40,3	14,1	57,3		Rendah
Cilacap 	66,9	45,4	13,5	55,4		Rendah
Demak 	64,9	57,3	31,3	67,4		Sedang
Grobogan 	52,0	57,2	20,0	94,5		Rendah
Jepara 	66,2	59,4	31,6	55,5		Sedang
Karanganyar 	67,1	65,3	46,2	73,0		Tinggi
Kebumen 	68,7	56,6	11,1	58,7		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Kendal	71,4	55,4	33,8	53,0	 50,2 50,9 51,6	Sedang
 Klaten	67,7	63,2	14,7	85,4	 47,3 47,4 48,1	Rendah
 Kota Magelang	71,1	71,0	24,7	70,2	 53,2 52,5 54,4	Sedang
 Kota Pekalongan	60,5	61,3	35,9	72,7	 49,0 52,8 55,8	Sedang
 Kota Salatiga	80,8	72,5	27,4	79,4	 58,5 57,2 59,8	Tinggi
 Kota Semarang	70,1	66,8	66,9	70,9	 67,4 66,0 68,6	Tinggi
 Kota Surakarta	61,7	70,2	23,9	76,4	 50,0 51,6 53,0	Sedang
 Kota Tegal	65,4	58,1	17,8	74,1	 45,8 48,4 47,3	Rendah
 Kudus	71,6	64,8	35,5	63,3	 58,8 54,3 56,8	Sedang
 Magelang	64,8	56,0	30,6	34,9	 43,6 43,9 44,4	Rendah
 Pati	71,4	60,2	22,0	73,3	 51,0 50,6 51,3	Sedang
 Pekalongan	56,7	55,2	26,3	58,4	 44,8 46,0 46,9	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2023

2024

2025

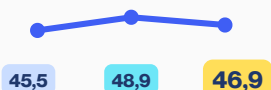
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Pemalang 	61,7	45,3	22,0	57,2		Rendah
Purbalingga 	67,4	54,0	26,2	45,0		Rendah
Purworejo 	71,7	61,9	15,2	58,8		Rendah
Rembang 	62,3	59,4	31,4	76,5		Sedang
Semarang 	72,2	59,8	19,7	62,6		Rendah
Sragen 	69,0	59,7	12,6	81,4		Rendah
Sukoharjo 	61,0	66,1	41,4	82,9		Tinggi
Tegal 	64,2	47,5	19,3	71,1		Rendah
Temanggung 	61,8	57,2	25,2	35,2		Rendah
Wonogiri 	71,5	58,9	10,2	70,4		Rendah
Wonosobo 	39,5	48,2	15,7	28,4		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bangkalan 	26,1	39,8	15,2	54,4		Rendah
Banyuwangi 	68,4	55,3	21,3	62,1		Rendah
Blitar 	75,2	54,4	19,0	62,5		Rendah
Bojonegoro 	74,7	55,3	19,0	81,4		Sedang
Bondowoso 	41,3	48,6	33,4	52,1		Rendah
Gresik 	70,4	59,2	58,4	70,6		Tinggi
Jember 	59,4	44,8	23,0	54,7		Rendah
Jombang 	71,6	58,9	33,7	66,7		Sedang
Kediri 	76,0	55,0	21,8	64,3		Sedang
Kota Batu 	75,8	63,9	70,9	43,7		Tinggi
Kota Blitar 	82,3	65,4	24,0	70,7		Sedang
Kota Kediri 	73,7	69,7	24,0	74,0		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2023

2024

2025

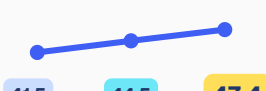
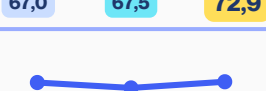
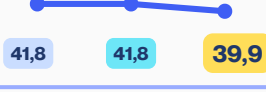
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Kota Madiun 	71,1	73,1	24,7	80,6		Sedang
Kota Malang 	75,0	65,3	53,9	70,6		Tinggi
Kota Mojokerto 	80,9	71,0	60,2	73,9		Tinggi
Kota Pasuruan 	74,1	62,2	58,0	63,1		Tinggi
Kota Probolinggo 	62,8	65,6	62,7	61,4		Tinggi
Kota Surabaya 	74,1	68,7	57,5	63,9		Tinggi
Lamongan 	81,6	58,0	19,1	72,8		Sedang
Lumajang 	53,4	51,8	24,8	58,1		Rendah
Madiun 	89,1	58,2	13,9	78,0		Rendah
Magetan 	80,6	61,0	11,8	73,2		Rendah
Malang 	64,4	50,5	34,2	53,0		Sedang
Mojokerto 	80,1	61,6	45,2	66,6		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Nganjuk	75,7	57,9	25,6	70,5		Sedang
 Ngawi	83,5	62,0	15,5	88,9		Sedang
 Pacitan	74,8	58,5	7,5	38,8		Rendah
 Pamekasan	65,1	52,9	23,0	63,8		Rendah
 Pasuruan	54,1	49,8	33,1	45,6		Rendah
 Ponorogo	83,6	57,1	13,2	73,1		Rendah
 Probolinggo	40,8	47,0	23,8	51,1		Rendah
 Sampang	49,9	36,8	16,6	69,2		Rendah
 Sidoarjo	80,0	62,9	89,4	62,9		Tinggi
 Situbondo	41,0	52,6	29,8	58,2		Rendah
 Sumenep	35,4	49,2	23,0	63,4		Rendah
 Trenggalek	55,8	54,5	11,9	46,5		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Tuban 	79,8	51,7	30,9	70,3		Sedang
Tulungagung 	81,9	60,5	23,0	64,6		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bengkayang 	34,6	60,7	59,2	38,7		Rendah
Kapuas Hulu 	40,2	63,7	46,7	33,4		Rendah
Kayong Utara 	60,4	50,9	73,3	17,0		Rendah
Ketapang 	40,0	45,7	54,7	41,0		Rendah
Kota Pontianak 	61,0	56,5	42,0	33,3		Rendah
Kota Singkawang 	38,3	50,1	60,0	34,5		Rendah
Kubu Raya 	48,3	45,6	82,2	15,9		Rendah
Landak 	33,2	61,8	33,2	15,0		Rendah
Melawi 	37,8	58,7	57,9	31,6		Rendah
Mempawah 	42,2	44,0	33,9	16,0		Rendah
Sambas 	45,6	46,4	19,3	18,8		Rendah
Sanggau 	35,4	55,3	46,8	24,6		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Sekadau 	52,1	49,7	49,7	33,0	 40,643,145,4	Rendah
Sintang 	36,6	58,4	59,6	32,6	 44,543,345,1	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

2023

2024

2025

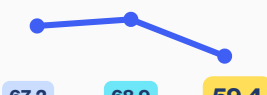
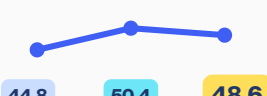
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Balangan 	52,7	58,7	49,3	64,6		Sedang
Banjar 	50,4	51,0	57,2	49,8		Sedang
Barito Kuala 	66,0	55,6	59,9	45,1		Sedang
Hulu Sungai Selatan 	48,1	58,8	12,3	52,9		Rendah
Hulu Sungai Tengah 	61,4	58,1	18,8	56,3		Rendah
Hulu Sungai Utara 	49,3	54,7	13,2	64,8		Rendah
Kota Banjarbaru 	55,6	67,3	71,5	64,3		Tinggi
Kota Banjarmasin 	59,6	59,5	23,7	64,1		Rendah
Kotabaru 	36,7	47,6	69,0	56,3		Sedang
Tabalong 	34,8	63,0	57,1	66,2		Sedang
Tanah Bumbu 	50,5	57,0	94,8	59,8		Tinggi
Tanah Laut 	52,4	57,9	88,8	53,8		Tinggi
Tapin 	46,1	55,4	49,2	56,5		Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Barito Selatan 	49,3	60,0	41,9	46,7		Sedang
Barito Timur 	66,4	66,1	69,3	53,7		Tinggi
Barito Utara 	41,4	54,6	67,5	49,2		Sedang
Gunung Mas 	29,4	56,4	56,3	42,9		Rendah
Kapuas 	31,7	48,7	55,1	39,9		Rendah
Katingan 	31,5	59,7	67,2	49,4		Sedang
Kota Palangka Raya 	53,4	70,8	74,3	71,5		Tinggi
Kotawaringin Barat 	34,4	63,6	90,6	62,6		Tinggi
Kotawaringin Timur 	36,2	52,2	79,6	49,4		Sedang
Lamandau 	32,2	65,9	88,6	50,1		Sedang
Murung Raya 	32,7	49,4	45,8	28,9		Rendah
Pulang Pisau 	34,0	57,5	69,6	41,0		Rendah
Seruyan 	46,4	57,4	95,9	53,5		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

202320242025

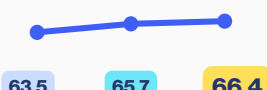
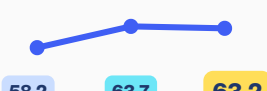
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Sukamara 	53,0	58,9	89,4	61,0	 64,761,864,2	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Berau 	50,0	62,4	92,5	55,1		Tinggi
Kota Balikpapan 	52,7	66,5	65,6	61,7		Tinggi
Kota Bontang 	59,7	64,2	73,6	69,0		Tinggi
Kota Samarinda 	66,3	68,8	83,9	67,3		Tinggi
Kutai Barat 	48,5	59,2	49,8	59,9		Sedang
Kutai Kartanegara 	44,2	64,3	87,0	64,7		Tinggi
Kutai Timur 	47,6	58,0	84,2	57,7		Tinggi
Mahakam Ulu 	24,8	62,8	56,2	56,4		Rendah
Paser 	45,4	61,4	91,1	50,3		Tinggi
Penajam Paser Utara 	47,9	66,5	87,9	56,9		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bulungan 	39,3	62,4	79,6	57,0	60,260,157,8	Sedang
Kota Tarakan 	40,2	66,8	79,3	56,4	59,158,858,9	Tinggi
Malinau 	18,7	63,9	49,8	55,2	47,943,642,6	Rendah
Nunukan 	34,4	62,4	93,5	54,2	57,955,257,4	Sedang
Tana Tidung 	35,7	68,7	92,4	60,4	61,661,960,8	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung

202320242025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bangka 	48,4	56,5	52,0	65,5	52,657,155,2	Sedang
Bangka Barat 	36,9	49,3	56,6	56,4	54,953,849,1	Sedang
Bangka Selatan 	46,7	46,1	67,0	64,3	50,855,355,2	Sedang
Bangka Tengah 	43,4	48,3	75,4	65,2	58,756,056,7	Sedang
Belitung 	57,1	62,8	56,3	57,8	58,158,058,5	Tinggi
Belitung Timur 	52,3	62,7	60,9	55,7	60,458,257,7	Sedang
Kota Pangkalpinang 	48,4	66,6	44,3	76,1	65,258,457,4	Sedang

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau

202320242025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bintan 	54,2	65,3	71,4	56,8	59,559,561,6	Tinggi
Karimun 	57,4	59,7	59,9	58,4	49,756,858,8	Tinggi
Kepulauan Anambas 	54,4	64,1	31,7	47,8	51,548,348,0	Rendah
Kota Batam 	62,1	61,8	59,3	61,0	55,057,561,1	Tinggi
Kota Tanjung Pinang 	63,5	69,6	33,3	61,0	48,950,554,7	Sedang
Lingga 	67,2	56,5	16,1	49,0	44,146,441,6	Rendah
Natuna 	53,3	65,1	58,3	62,9	58,358,859,7	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Kota Bandar Lampung 	52,3	58,8	29,7	63,4		Sedang
Kota Metro 	78,6	68,3	27,4	68,3		Sedang
Lampung Barat 	62,6	61,4	26,3	34,4		Rendah
Lampung Selatan 	58,2	53,7	40,1	53,7		Sedang
Lampung Tengah 	72,4	56,4	51,1	62,9		Tinggi
Lampung Timur 	72,4	57,5	58,2	67,6		Tinggi
Lampung Utara 	66,0	52,7	37,7	43,3		Rendah
Mesuji 	45,7	52,2	72,9	62,8		Sedang
Pesawaran 	64,9	55,3	59,4	60,5		Tinggi
Pesisir Barat 	70,3	55,8	68,6	50,7		Tinggi
Pringsewu 	74,3	56,3	44,4	59,5		Sedang
Tanggamus 	59,9	53,6	38,8	36,0		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

202320242025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Tulang Bawang Barat 	78,3	51,8	86,1	50,8	60,362,864,9	Tinggi
Tulang Bawang 	58,1	54,5	78,5	61,9	54,558,662,6	Tinggi
Way Kanan 	60,1	55,7	74,9	51,2	55,758,259,9	Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

2023

2024

2025

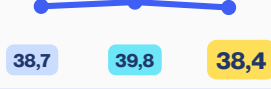
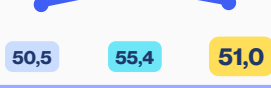
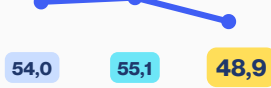
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Buru	42,4	47,9	79,4	45,8	 54,0 48,7 52,1	Sedang
 Buru Selatan	17,2	34,8	62,5	23,2	 28,9 29,5 30,5	Rendah
 Kepulauan Aru	24,9	36,6	64,4	29,1	 33,7 38,6 36,1	Rendah
 Kepulauan Tanimbar	20,5	53,2	18,8	37,0	 33,9 37,1 29,5	Rendah
 Kota Ambon	23,8	50,4	24,0	50,1	 36,8 33,1 34,7	Rendah
 Kota Tual	24,0	47,0	27,4	49,0	 46,9 34,6 35,1	Rendah
 Maluku Barat Daya	15,6	51,7	24,7	37,3	 28,7 27,0 29,4	Rendah
 Maluku Tengah	25,5	45,2	34,5	27,2	 38,0 37,3 32,3	Rendah
 Maluku Tenggara	12,8	54,4	17,9	37,8	 27,4 27,1 26,2	Rendah
 Seram Bagian Barat	23,1	40,8	32,2	28,4	 27,9 30,1 30,5	Rendah
 Seram Bagian Timur	26,1	33,7	49,0	28,6	 29,0 33,5 33,3	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Halmahera Barat 	39,8	48,7	43,0	40,7		Rendah
Halmahera Selatan 	32,6	41,8	37,7	42,0		Rendah
Halmahera Tengah 	40,8	52,7	64,9	38,2		Rendah
Halmahera Timur 	29,6	57,4	79,5	50,1		Sedang
Halmahera Utara 	33,5	40,1	57,7	51,8		Rendah
Kepulauan Sula 	18,6	44,2	42,0	43,2		Rendah
Kota Ternate 	42,8	65,2	68,5	68,6		Tinggi
Kota Tidore Kepulauan 	33,6	61,4	49,3	56,3		Rendah
Pulau Morotai 	19,8	52,0	42,1	48,4		Rendah
Pulau Taliabu 	20,1	31,5	81,4	35,9		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bima 	48,7	57,2	19,6	43,1		Rendah
Dompu 	49,2	58,6	51,6	43,8		Sedang
Kota Bima 	48,8	70,8	45,3	55,7		Sedang
Kota Mataram 	57,1	65,1	64,6	61,3		Tinggi
Lombok Barat 	37,7	52,8	38,5	37,3		Rendah
Lombok Tengah 	34,7	49,1	22,8	46,1		Rendah
Lombok Timur 	35,8	59,1	23,4	42,5		Rendah
Lombok Utara 	37,1	53,3	36,1	27,7		Rendah
Sumbawa 	60,2	61,5	50,6	55,2		Sedang
Sumbawa Barat 	51,7	65,0	64,3	62,4		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

202320242025

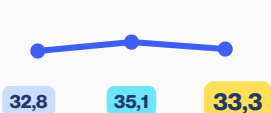
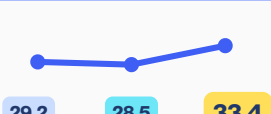
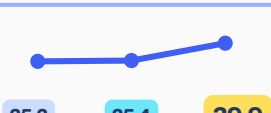
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Alor 	26,5	54,2	22,1	24,4	32,930,429,7	Rendah
Belu 	26,3	51,8	75,4	30,3	37,439,242,0	Rendah
Ende 	38,8	56,3	32,9	27,7	30,633,837,5	Rendah
Flores Timur 	28,9	59,5	13,7	22,9	24,226,727,1	Rendah
Kota Kupang 	30,0	55,2	84,0	44,3	51,050,649,8	Sedang
Kupang 	24,2	44,6	45,8	32,5	41,535,135,6	Rendah
Lembata 	43,4	65,1	56,2	33,5	36,342,548,0	Rendah
Malaka 	37,0	42,8	48,3	38,2	33,434,241,4	Rendah
Manggarai 	29,4	59,2	30,8	35,2	37,634,137,0	Rendah
Manggarai Barat 	44,0	60,2	56,6	24,1	37,837,643,6	Rendah
Manggarai Timur 	47,8	44,8	33,3	20,0	25,926,234,6	Rendah
Nagekeo 	35,5	58,6	46,5	19,2	27,131,537,0	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

2023

2024

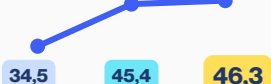
2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Ngada	40,1	61,3	32,9	39,7	 34,2 34,5 42,3	Rendah
 Rote Ndao	23,6	55,8	27,0	43,7	 30,3 33,3 35,3	Rendah
 Sabu Raijua	21,2	46,6	7,9	37,5	 21,5 23,7 23,3	Rendah
 Sikka	44,6	54,4	39,2	31,3	 37,0 38,7 41,6	Rendah
 Sumba Barat	26,9	56,1	30,8	26,0	 29,9 31,2 33,1	Rendah
 Sumba Barat Daya	24,3	29,5	30,9	18,9	 23,2 20,7 25,4	Rendah
 Sumba Tengah	24,7	51,7	31,2	12,0	 25,5 27,9 26,3	Rendah
 Sumba Timur	19,2	54,5	36,2	32,2	 32,8 35,1 33,3	Rendah
 Timor Tengah Selatan	42,9	43,1	31,0	21,8	 29,2 28,5 33,4	Rendah
 Timor Tengah Utara	29,8	51,8	37,2	44,3	 35,2 35,4 39,9	Rendah

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Biak Numfor 	21,9	48,6	31,9	34,8		Rendah
Jayapura 	23,1	61,6	25,9	47,4		Rendah
Keerom 	22,0	62,2	85,6	35,7		Rendah
Kepulauan Yapen 	18,9	37,7	38,9	31,0		Rendah
Kota Jayapura 	36,0	60,8	85,2	56,5		Sedang
Mamberamo Raya 	10,3	22,6	27,1	9,8		Rendah
Sarmi 	25,5	63,8	80,5	35,1		Rendah
Supiori 	9,0	44,1	57,4	14,0		Rendah
Waropen 	26,6	45,9	79,6	18,6		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Fakfak 	22,3	60,8	75,1	26,9		Rendah
Kaimana 	34,2	37,4	93,0	35,3		Rendah
Manokwari 	44,4	57,5	72,3	39,4		Sedang
Manokwari Selatan 	12,6	58,0	87,8	38,5		Rendah
Pegunungan Arfak 	10,6	26,1	20,3	11,8		Rendah
Teluk Bintuni 	22,4	58,6	90,5	37,9		Rendah
Teluk Wondama 	11,0	34,7	60,2	11,2		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Kota Sorong 	34,8	51,4	91,4	57,4		Sedang
Maybrat 	10,6	60,4	39,5	16,4		Rendah
Raja Ampat 	21,3	34,9	71,5	36,6		Rendah
Sorong 	33,2	57,6	66,2	31,7		Rendah
Sorong Selatan 	17,0	27,7	41,2	12,1		Rendah
Tambrau 	10,7	39,0	59,5	12,7		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan

202320242025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Jayawijaya 	32,6	26,0	50,8	9,5		Rendah
Lanny Jaya 	70,0	26,5	26,0	7,6		Rendah
Mamberamo Tengah 	19,4	30,1	26,2	6,3		Rendah
Nduga 	12,3	17,9	26,5	6,3		Rendah
Pegunungan Bintang 	10,7	20,4	25,2	7,3		Rendah
Tolikara 	14,6	21,4	25,5	6,3		Rendah
Yahukimo 	11,9	18,5	26,0	6,3		Rendah
Yalimo 	19,5	19,2	26,4	6,3		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan

202320242025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Asmat 	8,4	25,6	60,4	9,1		Rendah
Boven Digoel 	18,9	54,7	95,5	32,5		Rendah
Mappi 	7,2	23,9	59,8	10,7		Rendah
Merauke 	43,1	60,4	87,0	50,1		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah

2023

2024

2025

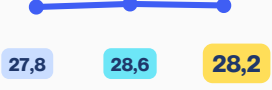
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Deiyai 	25,0	18,7	26,0	6,3		Rendah
Dogiyai 	13,3	16,8	25,5	10,1		Rendah
Intan Jaya 	7,0	17,4	26,0	9,8		Rendah
Mimika 	32,1	60,9	82,4	42,5		Sedang
Nabire 	31,8	65,9	82,0	42,8		Sedang
Paniai 	13,3	17,3	24,9	6,3		Rendah
Puncak 	11,0	18,0	26,0	6,3		Rendah
Puncak Jaya 	27,2	35,9	28,9	7,1		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bengkalis 	35,7	60,2	64,2	47,1		Sedang
Indragiri Hilir 	41,0	47,2	53,1	19,5		Rendah
Indragiri Hulu 	41,4	57,4	82,4	52,2		Sedang
Kampar 	52,5	62,9	85,4	54,0		Tinggi
Kepulauan Meranti 	53,2	56,1	12,2	17,4		Rendah
Kota Dumai 	45,4	65,8	76,7	55,8		Tinggi
Kota Pekanbaru 	43,9	71,1	71,3	59,3		Tinggi
Kuantan Singingi 	58,7	63,3	68,3	59,6		Tinggi
Pelalawan 	45,7	64,2	92,2	58,4		Tinggi
Rokan Hilir 	29,0	55,8	80,3	42,6		Rendah
Rokan Hulu 	44,1	59,3	92,1	58,1		Tinggi
Siak 	50,1	64,3	82,6	52,7		Tinggi

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat

202320242025

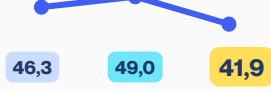
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Majene 	25,2	63,3	11,5	48,2	30,133,130,6	Rendah
Mamasa 	49,7	55,8	24,5	14,0	27,727,931,2	Rendah
Mamuju 	38,3	58,9	77,6	44,8	52,851,652,9	Sedang
Mamuju Tengah 	38,7	60,8	92,1	48,9	49,256,657,0	Sedang
Pasang Kayu 	38,2	60,5	92,5	49,1	55,755,056,9	Sedang
Polewali Mandar 	25,1	57,8	22,6	49,8	36,838,735,7	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

2023

2024

2025

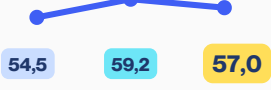
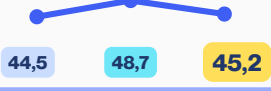
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bantaeng 	64,0	56,6	36,7	43,5	 44,0 48,6 49,1	Sedang
Barru 	48,3	57,2	13,8	54,0	 37,0 39,6 37,9	Rendah
Bone 	31,9	54,9	10,7	59,3	 34,9 35,2 32,5	Rendah
Bulukumba 	49,2	58,4	22,2	61,2	 45,1 44,8 44,4	Rendah
Enrekang 	42,1	66,5	13,0	39,1	 29,0 32,3 34,5	Rendah
Gowa 	50,1	58,2	63,9	52,7	 55,4 56,1 56,0	Sedang
Jeneponto 	28,3	49,7	15,9	64,2	 36,1 35,6 34,6	Rendah
Kepulauan Selayar 	55,6	60,0	14,3	64,5	 46,3 49,0 41,9	Rendah
Kota Makassar 	34,2	53,2	33,6	62,5	 50,7 40,9 44,2	Rendah
Kota Palopo 	18,6	60,9	27,4	63,8	 43,1 38,4 37,5	Rendah
Kota Pare Pare 	49,7	67,6	25,4	61,1	 47,1 46,7 47,8	Rendah
Luwu 	23,2	61,0	42,2	53,5	 33,3 41,2 42,3	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Luwu Timur 	35,2	61,4	80,4	61,0		Sedang
Luwu Utara 	47,5	60,4	67,4	59,0		Tinggi
Maros 	50,8	56,3	16,2	54,7		Rendah
Pangkajene dan Kepulauan 	43,8	61,6	15,8	58,5		Rendah
Pinrang 	38,6	62,5	16,4	58,5		Rendah
Sidenreng Rappang 	43,7	59,7	22,7	70,6		Rendah
Sinjai 	54,8	59,3	13,9	50,1		Rendah
Soppeng 	59,8	61,8	9,3	64,0		Rendah
Takalar 	43,5	56,3	37,7	64,4		Sedang
Tana Toraja 	23,7	59,0	10,3	17,3		Rendah
Toraja Utara 	13,4	65,0	36,5	33,1		Rendah
Wajo 	61,5	57,4	14,3	74,0		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

202320242025

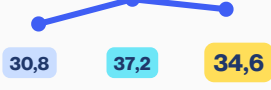
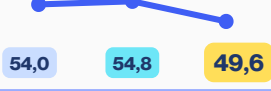
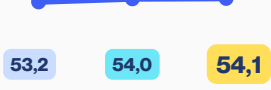
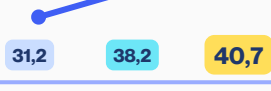
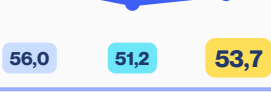
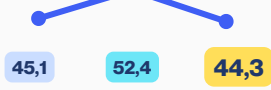
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Banggai 	64,9	56,1	81,9	55,3	58,858,863,7	Tinggi
Banggai Kepulauan 	42,1	50,9	23,9	40,4	38,542,937,9	Rendah
Banggai Laut 	32,9	48,2	66,1	39,9	44,744,945,2	Rendah
Buol 	26,2	61,4	58,9	50,6	42,341,246,8	Rendah
Donggala 	16,7	48,3	52,1	37,2	40,041,435,3	Rendah
Morowali 	37,9	64,6	71,8	59,2	55,559,556,8	Sedang
Morowali Utara 	46,6	63,5	89,6	46,4	57,254,459,2	Tinggi
Kota Palu 	35,8	68,1	72,4	60,9	56,258,657,3	Sedang
Parigi Moutong 	34,4	55,7	78,8	44,4	49,349,250,9	Sedang
Poso 	58,6	62,0	70,0	45,4	54,154,458,3	Tinggi
Sigi 	27,9	52,3	59,8	24,3	44,945,238,1	Rendah
Tojo Una Una 	24,8	56,6	47,5	41,3	39,444,340,7	Rendah
Toli Toli 	24,9	60,1	63,8	44,1	54,246,845,3	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

2023

2024

2025

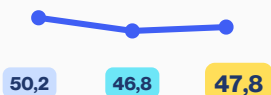
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bombana 	26,6	58,6	66,4	62,1		Sedang
Buton 	26,4	59,9	22,3	40,8		Rendah
Buton Selatan 	27,0	49,0	44,3	22,5		Rendah
Buton Tengah 	19,9	52,6	34,4	51,3		Rendah
Buton Utara 	16,3	59,7	60,2	45,5		Rendah
Kolaka 	21,9	66,3	79,4	52,5		Sedang
Kolaka Timur 	49,2	63,9	90,6	62,6		Tinggi
Kolaka Utara 	30,1	67,9	89,1	47,2		Sedang
Konawe 	33,9	63,8	72,2	59,9		Sedang
Konawe Kepulauan 	29,0	62,9	42,2	35,7		Rendah
Konawe Selatan 	29,7	60,3	81,6	56,7		Sedang
Konawe Utara 	17,4	61,5	83,7	43,0		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

2023

2024

2025

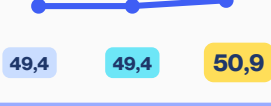
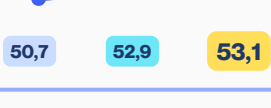
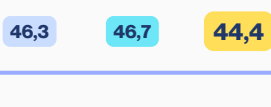
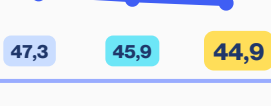
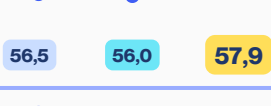
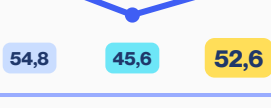
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Kota Baubau 	20,9	67,9	59,8	59,2		Rendah
Kota Kendari 	38,0	67,6	70,8	61,0		Sedang
Muna 	21,0	51,2	12,3	47,9		Rendah
Muna Barat 	22,2	55,9	81,4	51,7		Rendah
Wakatobi 	29,4	61,5	22,8	57,6		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Bolaang Mongondow 	38,2	52,1	49,3	48,8		Rendah
Bolaang Mongondow Selatan 	41,6	58,4	66,4	41,6		Sedang
Bolaang Mongondow Timur 	55,0	50,7	60,3	47,2		Sedang
Bolaang Mongondow Utara 	32,8	56,8	44,0	47,2		Rendah
Kepulauan Sangihe 	35,8	59,9	11,0	25,1		Rendah
Kepulauan Talaud 	49,0	63,4	28,4	50,6		Rendah
Kota Bitung 	29,4	56,7	80,8	63,4		Sedang
Kota Kotamobagu 	43,5	61,6	64,6	61,0		Sedang
Kota Manado 	43,1	54,3	25,7	67,2		Rendah
Kota Tomohon 	52,7	61,0	53,7	65,3		Sedang
Minahasa 	53,8	57,9	43,3	56,6		Sedang
Minahasa Selatan 	31,9	59,7	34,8	48,9		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

202320242025

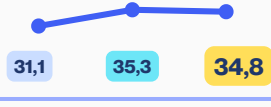
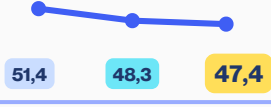
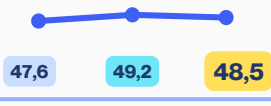
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Minahasa Tenggara 	39,2	57,8	43,8	60,1	49,347,449,4	Sedang
Minahasa Utara 	60,7	58,6	78,0	65,1	59,164,265,2	Tinggi
Siau Tagulandang Biaro 	60,0	64,6	20,9	37,0	34,838,741,6	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Agam 	40,6	59,5	30,0	53,8		Rendah
Dharmasraya 	63,0	56,0	89,0	54,7		Tinggi
Kepulauan Mentawai 	43,4	51,6	47,1	14,0		Rendah
Kota Bukittinggi 	53,7	69,6	27,4	51,8		Rendah
Kota Padang 	43,6	52,6	21,9	62,9		Rendah
Kota Padang Panjang 	45,3	71,0	27,4	57,6		Rendah
Kota Pariaman 	32,6	66,2	23,9	65,5		Rendah
Kota Payakumbuh 	59,0	65,5	24,5	58,2		Rendah
Kota Sawahlunto 	68,9	66,7	20,3	54,7		Rendah
Kota Solok 	55,0	71,4	27,4	60,2		Sedang
Lima Puluh Kota 	59,4	58,3	38,2	43,7		Sedang
Padang Pariaman 	27,2	52,8	14,5	60,2		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

202320242025

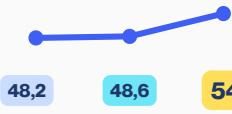
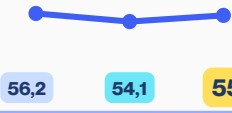
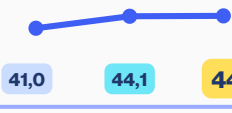
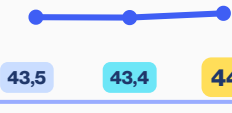
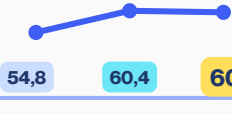
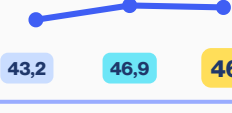
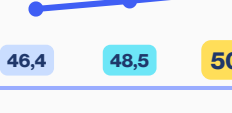
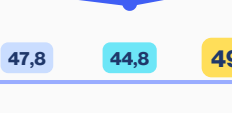
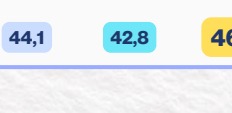
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Pasaman 	38,1	54,0	19,9	39,8	36,036,335,7	Rendah
Pasaman Barat 	41,8	57,5	58,3	49,0	48,846,951,2	Sedang
Pesisir Selatan 	53,7	56,2	33,2	50,2	48,150,447,4	Rendah
Sijunjung 	54,7	56,7	51,7	40,9	48,250,950,6	Sedang
Solok 	56,4	52,6	14,2	38,3	39,837,635,6	Rendah
Solok Selatan 	56,3	61,2	51,5	41,3	52,450,752,0	Sedang
Tanah Datar 	45,1	60,3	17,3	53,5	40,040,039,8	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 – 2025	Status Capaian IKIK 2025
Banyuasin 	58,8	52,3	87,4	32,8		Sedang
Empat Lawang 	40,9	47,7	27,7	38,3		Rendah
Kota Lubuklinggau 	52,8	60,6	53,1	56,7		Sedang
Kota Pagar Alam 	59,8	62,4	24,1	42,5		Rendah
Kota Palembang 	52,1	60,2	23,3	53,5		Rendah
Kota Prabumulih 	54,1	65,6	65,3	55,9		Tinggi
Lahat 	61,1	59,3	28,1	45,3		Rendah
Muara Enim 	47,3	56,4	53,4	46,7		Sedang
Musi Banyuasin 	35,6	59,7	64,0	43,2		Sedang
Musi Rawas 	51,4	53,3	64,9	51,2		Sedang
Musi Rawas Utara 	31,0	50,4	50,2	50,8		Rendah
Ogan Ilir 	43,6	57,4	44,2	43,9		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2023

2024

2025

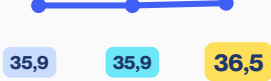
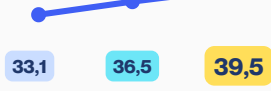
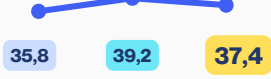
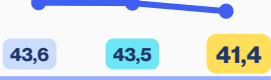
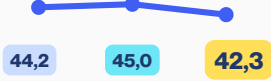
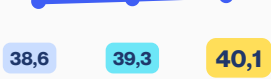
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Ogan Komering Ilir 	34,7	47,2	66,2	50,4		Rendah
Ogan Komering Ulu 	45.9	58,7	22,4	51,7		Rendah
Ogan Komering Ulu Selatan 	47,7	55,2	57,9	47,8		Sedang
Ogan Komering Ulu Timur 	65,5	54,4	55,0	59,3		Tinggi
Penukal Abab Lematang Ilir 	26,4	54,5	35,4	45,8		Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

2023

2024

2025

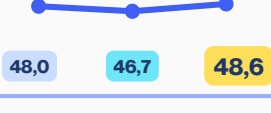
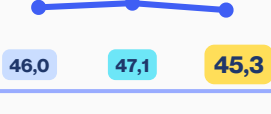
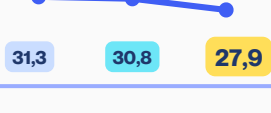
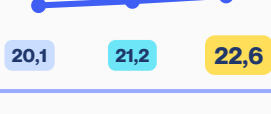
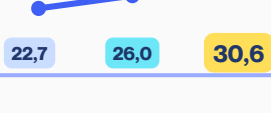
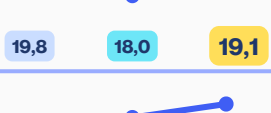
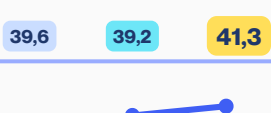
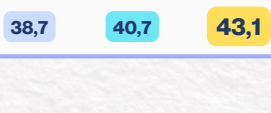
Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Asahan	45,6	55,1	17,9	54,8	 39,8 40,2 39,6	Rendah
 Batu Bara	47,3	52,9	34,0	55,7	 53,1 47,4 46,6	Rendah
 Dairi	28,5	67,9	20,9	44,0	 35,9 35,9 36,5	Rendah
 Deli Serdang	49,3	48,4	72,6	56,6	 55,0 52,1 56,0	Sedang
 Humbang Hasundutan	31,3	69,2	21,1	53,3	 33,1 36,5 39,5	Rendah
 Karo	37,2	64,0	42,7	45,1	 41,1 39,1 46,3	Rendah
 Kota Binjai	49,2	64,9	37,1	64,8	 50,4 46,7 52,6	Sedang
 Kota Gunungsitoli	27,7	62,0	27,3	41,7	 35,8 39,2 37,4	Rendah
 Kota Medan	33,0	56,5	24,0	65,9	 43,6 43,5 41,4	Rendah
 Kota Padangsidimpuan	29,9	57,2	25,4	39,4	 37,3 35,2 36,2	Rendah
 Kota Pematangsiantar	33,6	57,9	26,0	63,4	 44,2 45,0 42,3	Rendah
 Kota Sibolga	35,6	60,2	27,4	44,1	 38,6 39,3 40,1	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
 Kota Tanjungbalai	32,1	64,3	38,6	49,4	 39,8 37,9 44,5	Rendah
 Kota Tebing Tinggi	53,4	63,8	26,4	57,6	 47,2 49,4 47,7	Rendah
 Labuhanbatu	35,7	54,1	20,1	44,3	 36,6 34,0 36,2	Rendah
 Labuhan Batu Selatan	48,4	60,9	59,9	55,3	 53,6 48,6 55,9	Sedang
 Labuhan Batu Utara	47,2	59,2	38,0	52,4	 48,0 46,7 48,6	Rendah
 Langkat	54,4	51,4	29,3	51,3	 46,0 47,1 45,3	Rendah
 Mandailing Natal	24,0	46,2	16,3	33,6	 31,3 30,8 27,9	Rendah
 Nias	30,1	47,2	12,7	14,4	 20,1 21,2 22,6	Rendah
 Nias Barat	29,1	59,4	24,5	20,8	 22,7 26,0 30,6	Rendah
 Nias Selatan	18,1	29,6	19,0	13,1	 19,8 18,0 19,1	Rendah
 Nias Utara	26,7	47,3	25,6	30,2	 24,3 27,9 31,4	Rendah
 Padang Lawas	24,2	51,9	52,3	44,4	 39,6 39,2 41,3	Rendah
 Padang Lawas Utara	27,2	56,5	44,9	50,1	 38,7 40,7 43,1	Rendah

Capaian IKIK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

2023

2024

2025

Kabupaten/ Kota	Kuantitas 2025	Kualitas 2025	Mobilitas 2025	Lingkungan 2025	IKIK 2023 - 2025	Status Capaian IKIK 2025
Pakpak Bharat 	34,6	69,2	25,0	14,0		Rendah
Samosir 	27,3	70,5	19,6	30,8		Rendah
Serdang bedagai 	51,1	55,4	28,0	54,7		Rendah
Simalungun 	40,4	57,7	17,6	55,0		Rendah
Tapanuli Selatan 	23,7	57,2	17,5	27,4		Rendah
Tapanuli Tengah 	24,5	51,5	60,7	28,0		Rendah
Tapanuli Utara 	28,2	68,0	17,1	35,8		Rendah
Toba 	21,8	72,2	23,1	53,8		Rendah

